



RENCANA AKSI DETAIL SISTEM INOVASI DAERAH

**BAPEDALITBANG
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

PAINAN
2022



RENCANA AKSI DETAIL SISTEM INOVASI DAERAH

**BAPEDALITBANG
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

PAINAN
2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan atas selesainya penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah Kab.Pesisir Selatan ini. Laporan ini diperlukan sebagai panduan operasional komprehensif dalam pelaksanaan program peningkatan kematangan, penguatan dan implementasi fokus Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara sistemik dan sistematis agar efektif dan bahkan unggul dalam rangka peningkatan daya saing produk, daya saing bisnis, dan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dapat menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dan sebagai acuan kerjasama dengan berbagai instansi yang mendukung penguatan sistem inovasi dan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, universitas atau perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Laporan ini adalah hasil kerjasama antara Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Andalas. Banyak terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Painan, 5 Desember 2022
Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si
Nip. 19770522 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i-1
DAFTAR ISI	i-2
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
BAB 2 KONSEP DASAR SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)	2-1
BAB 3 KONDISI SIDA KAB.PESISIR SELATAN YANG AKAN DICAPAI	3-1
BAB 4 RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SISTEM INOVASI DAERAH	4-1
BAB 5 RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA	5-1
BAB 6 RENCANA AKSI DETAIL FOKUS SISTEM INOVASI DAERAH 1	6-1
BAB 7 RENCANA AKSI DETAIL FOKUS SISTEM INOVASI DAERAH 2	7-1
BAB 8 RENCANA AKSI DETAIL FOKUS SISTEM INOVASI DAERAH 3	8-1
BAB 9 RENCANA AKSI DETAIL FOKUS SISTEM INOVASI DAERAH 3	9-1
BAB 10 PENUTUP	10-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

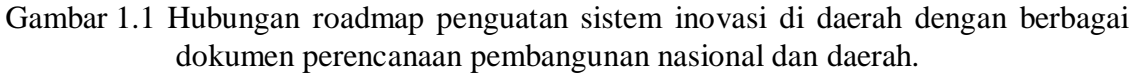
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi daerah tersebut. Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut, adalah bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi, dimana ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memanfaatkan potensi sumberdaya yang mempunyai nilai tambah dalam membangun perekonomian daerah. (Arsyad, 1999). Salah satu strategi pembangunan daerah yang sangat penting dilakukan untuk memajukan daya saing daerah adalah dengan sistem inovasi. Inovasi merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikembangkan dan memberikan dampak untuk meningkatkan iklim ekonomi kompetitif, menciptakan ekonomi yang ramah lingkungan, membuka lapangan kerja baru, membangun kemitraan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat (Global Innovation Report 2012).

Pola pembangunan daerah di Indonesia saat ini tidak hanya menyasar pada infrastruktur dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia (SDM) semata. Perencanaan pembangunan daerah dewasa ini menitikberatkan pada penguatan sistem sosial dan pemanfaatan kearifan lokal (local wisdom) masyarakat untuk menciptakan peluang pembangunan yang efektif dan efisien bagi suatu daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, langkah awal yang dapat dijadikan titik awal pembangunan adalah dengan melakukan kajian tentang potensi kolaborasi antara entitas sosial dan entitas ekonomi yang dapat dimediasi oleh perguruan tinggi. Artinya potensi-potensi yang dimiliki seluruh elemen yang ada di daerah, perlu diidentifikasi, diakomodasi, dikelola, dan kemudian

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di daerah – tak terkecuali di Kabupaten Pesisir Selatan.

Program penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) didasarkan pada Peraturan Menristek dan Mendagri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012. yang bertujuan untuk mendorong daerah memanfaatkan potensi lembaga dan inovasi yang ada di masing-masing daerah demi kemajuan masyarakat dan pembangunan. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. SIDa ini merupakan program yang akan mendukung sistem inovasi nasional. Dalam rangka melaksanakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tersebut, maka perlu disusun roadmap penguatan SIDa yang merupakan salah satu acuan perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan lebih inovatif dan progresif. Roadmap penguatan SIDa tentunya disusun berdasarkan tema strategis yang telah ditetapkan sehingga bisa terarah dalam menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir.

Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disusun harus bersinergi dan selaras dengan proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Berikut hubungan roadmap penguatan sistem inovasi daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota. Hubungan roadmap penguatan sistem inovasi di daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut



Dengan mempertimbangan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan adalah: **“Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata”**. Upaya untuk mencapai visi tersebut diwujudkan menjadi lima misi pembangunan jangka panjang yaitu:

- a. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.

- b. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi
- c. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

RPJMD tahun 2021 – 2026 merupakan bagian terakhir dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Pada tahapan ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan daerah, penumbuhan industri pangan sebagai pilot proyek pada beberapa desa tertentu, meletakkan dasar bagi pengembangan SDM di bidang industri pangan, penyiapan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung industri pangan Peraturan Daerah, SKPD yang mendukung, Internalisasi Riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan, Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Infrastruktur Pengairan, Pemeliharaan Hutan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Tenaga Listrik, dan pengkajian secara lebih mendalam tentang kemungkinan berdirinya perusahaan daerah yang bergerak pada industri pangan. Di bidang pariwisata, pembangunan lebih banyak diarahkan pada dua kawasan utama yakni Kawasan Carocok Painan yang terintegrasi dengan kawasan strategi Panasahan-Carocok dan Bukit Langkisau (Pacar Bulan). Berbagi infrastruktur dan SDM yang baik perlu disiapkan di kawasan ini.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”**

Untuk meraih visi tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan misi pembangunan tahun 2016-2021 untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah maju, sejahtera dengan basis ekonomi pangan dan pariwisata yang baik.
2. Bagaimana mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 untuk mencapai Kabupaten Pesisir Selatan yang sejahtera.
3. Bagaimana meningkatkan parameter pemeringkatan daya saing ekonomi yaitu total PDRB, laju pertumbuhan, PDRB per kapita, dan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan besar di atas, maka perlu disusun perencanaan percepatan pembangunan dengan RPJMD yang berbasis Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah. SIDA merupakan salah satu strategi pembangunan daerah dalam rangka mempercepat daya saing daerah, hal ini berdasarkan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Upaya ini dilakukan mengingat pada perkembangan ekonomi global menuntut pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong tumbuhnya pengetahuan dan inovasi lokal. Frederick dan McIlroy (1999) menjelaskan bahwa paradigma baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dipimpin oleh pengetahuan, karena proses

pembangkitan dan eksploitasi pengetahuan memainkan peran utama dalam mencapai kesejahteraan. Munculnya revolusi industri 4.0 menjadi bukti bahwa pembangunan wilayah di era ini cenderung mengarah pada eksploitasi pengetahuan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, fleksibilitas, kualitas, dan inovasi (Mudin et al., 2018).

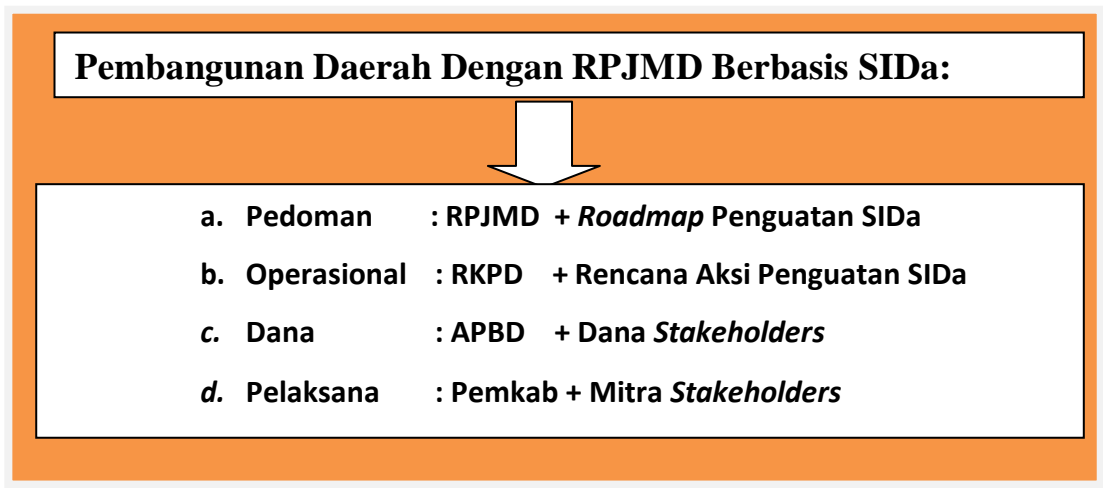
Dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, maka inovasi sangat diperlukan. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Peningkatan daya saing daerah Pesisir Selatan dapat dipercepat dengan implementasi sistem inovasi daerah yang efektif secara terarah, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Peningkatan daya saing tersebut dengan sistem inovasi daerah dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan setiap lima tahunnya dengan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sasaran yang dituju pada Sistem inovasi daerah ini adalah penumbuhan industri di daerah dengan pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk yang diunggulkan atau yang diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang lebih baik dari sebelumnya. Dari visi dan misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, maka misi yang terkait dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah dapat dilihat pada misi ke kedua pada RPJPD dan misi ke dua serta ketiga pada RPJMD yaitu:

1. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah (RPJPD).
2. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. (RPJMD)
3. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan (RPJMD).

Rencana Detail dan roadmap ini disusun berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 36 dan Menteri Riset dan Teknologi No. 3 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan bersama ini digunakan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, peningkatan daya saing daerah, dan pelaksanaan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. Berikut tahapan Pembangunan daerah dengan RPJMD berbasis Sistem Inovasi Daerah.



1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN SOLUSINYA

Dokumen roadmap penguatan SIDA merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD yang akan menjadi dokumen acuan bagi seluruh pogram dan kegiatan-kegiatan kolaboratif. Berdasarkan kebijakan yang tepat dan sistematis, maka Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pesisir Selatan telah disusun untuk waktu lima tahunan dengan program-program utama (prioritas) untuk mencapai manfaat (outcomes) sistem inovasi daerah yang matang dan kuat. Berdasarkan roadmap ini, maka dapat disusun secara holistik, sistematis dan serentak Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahunan untuk menghasilkan berbagai output yang pada akhirnya secara komprehensif akan mewujudkan outcomes untuk mencapai peningkatan kematangan dan kekuatan sistem inovasi daerah dan mewujudkan dampak yang berbentuk peningkatan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah disusun pada tahun 2021. Pada dokumen tersebut sudah di jelaskan kondisi kematangan sistem inovasi daerah di kabupaten Pesisir Selatan serta arah penguatan dan rencana aksi umum SIDA. Adapun fokus penguatan SIDA adalah peningkatan nilai tambah pada komoditi unggulan di Kab.Pesisir Selatan. Pembangunan SIDA di Kab.Pesisir Selatan saat ini fokus pada

Peningkatan nilai tambah gambir, Peningkatan produksi olahan perikanan, Pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan kawasan peternakan. Walaupun Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.Pesisir Selatan sudah ada, namun perlu identifikasi bagaimana mengoperasionalkan rencana aksi tersebut agar dapat diimplementasikan oleh para stakeholder secara sistematis. Oleh sebab itu, diperlukan rencana aksi detail Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.Pesisir Selatan agar dapat diimplementasikan oleh para stakeholder pada jadwal yang sistematis mulai tahun 2023 sampai dengan 2027.

Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Pesisir Selatan yang dihasilkan diharapkan nantinya dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam ke dalam RKPD. Dengan demikian, pembangunan daerah berbasis sistem inovasi daerah secara holistik, sistematis dan serentak dapat diwujudkan dalam rangka akselerasi peningkatan daya saing daerah yang pada ujungnya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Dokumen ini bermaksud menghasilkan Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan

Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan menjadi pedoman untuk peningkatan kematangan, kekuatan Sistem Inovasi Daerah dan daya saing yang berfokus pada produk yang diprioritaskan untuk dinaikkan nilai tambahnya di daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Manfaat

Dokumen Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi dasar penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, dapat dicapai Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang matang dan kuat yang mampu membantu akselerasi peningkatan daya saing

daerah secara holistik, sistematis dan serentak untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pengintegrasian Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah ke dalam dokumen RKPD dapat dilakukan dengan cara:

1. Memasukkan dan mensinkronisasikan substansi Rencana Detail yang terdapat dalam dokumen Roadmap ke dalam substansi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang ada di dalam dokumen RKPD.
2. Menetapkan Rencana Detail yang terdapat dalam dokumen Roadmap menjadi Memorandum Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Penetapan ini dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Memorandum Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kemudian, Memorandum Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah tadi ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

1.4 METODE KEGIATAN

Metode kegiatan yang dilakukan adalah metode survey yang mencakup koordinasi dengan instansi terkait di daerah, pengumpulan data sekunder dan primer. Untuk kelancaran pekerjaan lapangan, sebelum pelaksanaan survei lapangan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah (Kabupaten), dimana koordinasi ini dilakukan untuk pengumpulan data, peta dan informasi tambahan, mengetahui berbagai kondisi/permasalahan yang bersangkutan dengan pekerjaan dan melakukan pendekatan dengan instansi terkait di tingkat daerah.

Penelitian ini juga lebih banyak menggunakan pendekatan : *desk study*, studi lapangan dan *Focus Group Discussion*. Secara keseluruhan setiap kegiatan pengkajian dan pembahasan digunakan pendekatan Metodologi Perencanaan Partisipatif, untuk itu maka seluruh ”*stakeholders*” dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan.

1.5 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Penyusunan laporan Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini mempunyai ruang lingkup kegiatan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan usulan teknis kegiatan

- b. Pembuatan laporan pendahuluan
- c. Pengumpulan data lapangan baik data primer maupun sekunder
- d. Laporan pertengahan/antara
- e. Pengolahan dan analisa data
- f. Penyusunan laporan akhir
- g. Focus Group Discussion (FGD)
- h. Laporan akhir

1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional.
3. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
8. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi No. 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi di Daerah Otonom.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 77 Tahun 2010 tentang Jakstrada IPTEK Provinsi Sumatera Barat 2011-2015.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen ini terdiri atas 10 bab yang saling terkait satu sama lainnya dan disusun dengan sistematika sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 36 dan Menteri Riset dan Teknologi No. 3 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sebagai berikut.

NO.	JUDUL BAB	URAIAN
1	Pendahuluan	Berisi latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, ruang lingkup kegiatan, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penulisan
2	Konsep Sistem Inovasi Daerah	Berisi tentang definisi Inovasi dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), isu yang melatarbelakangi adanya SIDa dan ruang lingkup SIDa

NO.	JUDUL BAB	URAIAN
3	Kondisi SIDA Kab.Pesisir Selatan yang akan dicapai	Berisi uraian kondisi sida pesisir selatan yang akan dicapai dan strategi pencapaiannya.
4	Rencana Detail Peningkatan kematangan SIDA	Rencana detail peningkatan kematangan sida di Kab.Pesisir Selatan
5	Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA	Rencana Detail Peningkatan Kekuatan Sida Pada Pembentukan Komitmen Dan Kebijakan Penguatan SiDa Kabupaten Pesisir Selatan
6	Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Gambir	Inovasi pengembangan dan pemasaran produk Gambir (dengan inkubator dan lembaga pendukung inovasi lainnya).
	Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Olahan Perikanan	Peningkatan daya saing produk olahan perikanan melalui Pengembangan Klaster inovasi
8	Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Pengembangan Pariwisata	Berisi Uraian Rencana Detail Fokus SiDa Inovasi Pengembangan Pariwisata
7	Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Pengembangan Peternakan	Berisi Uraian Rencana Detail Fokus SiDa Inovasi Pengembangan usaha peternakan
10	Penutup	Berisi ringkasan dan kesimpulan dokumen Rencana Detail SIDA Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

KONSEP DASAR SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

2.1 DEFINISI SISTEM INOVASI DAERAH

Sistem Inovasi Daerah sebagai sebuah sistem yang didesain untuk kebijakan pembangunan daerah, Almeida, A., Figueiredo, A., & Rui Silva, M (2011) memperjelas keberadaan Sistem Inovasi Daerah sebagai sebuah sistem yang didesain untuk kebijakan pembangunan daerah, dan konsepnya sebagian besar, berasal dari konsep Sistem Inovasi Nasional yang dikemukakan oleh Freeman, 1987, 1995; Lundvall, 1992; Nelson & Rosenberg, 1993. Almeida, dkk juga mempertegas bahwasannya inovasi tidak hanya dihasilkan oleh individu, organisasi dan lembaga tetapi juga oleh pola-pola yang kompleks dari interaksi diantara mereka. Jadi, dalam suatu sistem inovasi terdapat elemen, interaksi, lingkungan dan perbatasan.

Hal senada diungkap oleh Ylinenpää, H (2009) bahwa dalam sistem inovasi, sistem yang ada bertujuan untuk mendukung pengembangan dari inovasi itu sendiri, yaitu bagaimana sistem direncanakan dan diformalkan melalui institusional (Triple Helix-based) serta kolaborasi diantaranya. Duman (2011) menambahkan, dalam sistem inovasi daerah menekankan pada ide untuk mengadopsi berbagai inovasi, atau kebijakan pembangunan di wilayah tertentu untuk tujuan pertumbuhan ekonomi. Penekanan dari pemahaman ini bahwa sistem inovasi di daerah menjelma sebagai kebijakan, yaitu kebijakan yang merupakan sistem untuk meningkatkan kapasitas produksi di wilayah tersebut, daya saing dan pasar yang dibentuk oleh kelompok-kelompok dan zona industri. Klaster dan zona industri adalah daerah sub di mana inovasi, aglomerasi industri berinteraksi dan litbang berlangsung.

Konsep sistem inovasi daerah ternyata tidak hanya menekankan pentingnya kedekatan geografis sebagai katalis pengembangan teknologi dan manfaat yang diperoleh dari lokalisasi dan konsentrasi spasial. Namun menurut Fiore, A., Grisorio, M., & Prota, F. (2011). Kehadiran aktor lokal, bahkan jika sangat berkomitmen untuk menjalankan inovasi, tidak selalu cukup

untuk memulai suatu proses jangka panjang dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Seringkali, sebaliknya, pengembangan dan penerapan yang sesuai "kebijakan publik" diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar yang menghambat pengerahan penuh dari faktor pengembangan potensi dan memulai sistem inovasi daerah dengan prospek keberhasilan.

Beberapa definisi dikemukakan oleh Cooke (2002) yang menjelaskan bahwa sistem inovasi daerah sebagai infrastruktur yang membantu dalam proses penciptaan inovasi yang diwujudkan dalam interaksi di antara banyak entitas. Hudec (2007) menyatakan bahwa sistem inovasi daerah (dari sudut pandang sistematis) diartikan sebagai sistem yang menstimulasi kemampuan inovasi perusahaan di suatu wilayah dan bertujuan pada pembangunan ekonomi dan sosial serta tingkat daya saing.

Analisis pemahaman sistem inovasi daerah adalah satu hal yang relatif kompleks (Potts, 2000). Salah satu sub sistem dalam sistem inovasi daerah adalah adanya produksi dan penyediaan jasa (peran subjeknya adalah komersialisasi produk inovatif yang dihasilkan oleh sistem), (Vaskivska, K., 2020; 57-72). Oleh sebab itu untuk menganalisis sistem inovasi di daerah, maka perlu dilakukan penetapan fokus produk dalam sistem inovasi yang akan dinaikkan nilai tambah dan produksinya.

Pengembangan sistem inovasi daerah dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul karena cakupan yang besar dari implementasi produk inovatif atau desainnya. Sistem seperti itu di tingkat daerah dapat dikembangkan sesuai dengan spesialisasi daerah, yang harus disesuaikan dengan fitur spesifiknya, dan fokus produk pada daerah. sistem inovasi daerah menurut Vaskivska (2020) terdiri dari:

1. Subsistem produksi dan penyediaan jasa (peran subjeknya adalah komersialisasi solusi inovatif yang dihasilkan oleh sistem);
2. Subsistem pendidikan dan penelitian (tugas mata pelajarannya adalah menghasilkan pengetahuan dan transformasinya menjadi subsistem lain);
3. Subsistem kelembagaan (termasuk lembaga yang memberikan dukungan untuk pembangunan produk inovatif);
4. Subsistem sosial budaya (mendefinisikan kekhasan pengembangan sistem).

Sistem Inovasi Daerah di Indonesia secara prinsip telah diatur oleh Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Republik Indonesia masing-masing No: 03 Tahun 2012 dan No:

36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah. Untuk menyiapkan dan memperkuat sistem inovasi daerah diperlukan konsep dasar yang jelas dan dapat diimplementasikan. Inovasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama tersebut di atas adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Tujuan umum implementasi SIDA adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Sebelum dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan peningkatan kekuatan SIDA itu sendiri yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Berikut diuraikan peningkatan kekuatan SIDA berdasar Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Republik Indonesia masing-masing No: 03 Tahun 2012 dan No: 36 Tahun 2012 yang dilaksanakan pada:

Ruang Lingkup Penguatan SIDA
Determinan Kematangan SIDA

2.2 RUANG LINGKUP PENGUATAN SIDA

Sistem inovasi daerah digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Semakin kuat sistem inovasi daerah, semakin tinggi tingkat daya saing daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah. Ruang lingkup penguatan SIDA meliputi:

1. Kebijakan penguatan SIDA;
2. Penataan unsur SIDA;
3. Pengembangan SIDA.

Uraian berikutnya di bawah ini menjelaskan ketiga aspek tersebut sesuai peraturan bersama di atas.

1. Kebijakan Penguatan SIDA

Secara nasional, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDA yang

tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian. Terkait hal ini, di tingkat daerah, Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan, Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota. Kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam:

- a. *Roadmap* Penguatan SIDA;
- b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); dan
- c. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Kebijakan penguatan SIDA disusun oleh tim koordinasi. Gubernur dan bupati/walikota menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDA yang memuat:

- a. Kondisi SIDA saat ini;
- b. Tantangan dan peluang SIDA
- c. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. Rencana aksi penguatan SIDA.

Roadmap Penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud di atas ke dalam dokumen RPJMD. Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD. Perubahan peraturan daerah tersebut harus mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA.

Tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA tersebut ke dalam dokumen RKPD. Dalam hal peraturan kepala daerah tentang RKPD sudah ditetapkan, kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang RKPD. Perubahan peraturan tersebut harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDA.

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA tingkat pusat. Gubernur melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/Walikota melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;
- b. Melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA; dan
- c. Memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

2. Penataan Unsur SIDA

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan penataan unsur SIDA secara nasional. Gubernur melaksanakan penataan unsur SIDA di provinsi. Bupati/walikota melaksanakan penataan unsur SIDA di kabupaten/kota. Unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama tersebut di atas adalah:

Kelembagaan SIDA yang terdiri atas:

1. Lembaga/organisasi yang meliputi:
 - a. Institusi pemerintah, dimana penataannya dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDA.
 - b. Pemerintahan daerah, dimana penataannya dilakukan dengan cara:
 - Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
 - Meningkatkan kapasitas dan peran Balitbang Daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA;
 - c. Lembaga kelitbangan, dimana penataannya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Lembaga pendidikan, dimana penataannya dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
 - e. Lembaga penunjang inovasi, dimana penataannya dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.
 - f. Dunia usaha, dimana penataannya dilakukan dengan cara:
 - memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan
 - meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA.
 - g. Organisasi kemasyarakatan di daerah, dimana penataannya dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.
2. Peraturan, yang merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA, dimana penataannya dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA.
3. Norma/etika/budaya yang merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA, dimana penataannya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

- A. Jaringan SIDA yang merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga dalam satu rantai kegiatan. Penataan jaringan SIDA dilakukan dengan:
1. Komunikasi intensif antara lembaga SIDA yang dilakukan melalui:
 - a. Penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan
 - c. Forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.
 2. Mobilisasi sumber daya manusia yang dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan
 - c. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - d. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.
 3. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilakukan melalui:
 - a. Pemanfaatan HKI;
 - b. Pemanfaatan informasi SIDA; dan
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.
- B. Sumber daya SIDA, yang terdiri dari:
1. Kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya;
 2. Kekayaan intelektual dan informasi; dan
 3. Sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Penataan sumber daya SIDA dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA, yang meliputi:

- Pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA;
- Pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- Pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- Pemanfaatan data dan informasi; dan
- Pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pengembangan SIDA

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri melaksanakan pengembangan SIDA secara nasional. Gubernur melaksanakan pengembangan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/ Walikota melaksanakan pengembangan SIDA di kabupaten/kota. Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud di atas didelegasikan kepada tim koordinasi yang meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah; yang dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.
- b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA yang dilakukan melalui:
 1. Identifikasi dan pengumpulan data;
 2. Pemetaan; dan
 3. Analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.
- c. Pemberlanjutan penguatan SIDA. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA. Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA tersebut menjadi acuan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

4. Tim Koordinasi SIDA

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Koordinasi Nasional Penguatan SIDA. Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen *Roadmap* nasional penguatan SIDA;
- b. Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen rencana strategis kementerian dan lembaga;
- c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;

- d. Melakukan penataan unsur SIDA secara nasional;
- e. Melakukan pengembangan SIDA secara nasional;
- f. Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA secara nasional;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Tim Koordinasi Nasional yang dimaksud terdiri dari:

Ketua I : Deputi Bidang Jaringan IPTEK Kemenristek
Ketua II : Kepala BPP Kemendagri
Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan IPTEK Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.

Tim Koordinasi Nasional yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat provinsi.
Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat kabupaten/kota.

Tim Koordinasi yang dimaksud mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
- b. Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. Melakukan penataan unsur SIDA di daerah;
- e. Melakukan pengembangan SIDA di daerah;
- f. Memersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di daerah;
- g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Tim Koordinasi terdiri dari:

Pengarah : Kepala Daerah
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Bappeda/Balitbangda
Sekretaris : Sekretaris Bappeda/Balitbangda
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Tim Koordinasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5. Koordinasi SIDA

Tim Koordinasi Nasional melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan tim koordinasi tingkat provinsi untuk penguatan SIDA paling sedikit empat kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Tim Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan tim koordinasi tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk penguatan SIDA paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan. Koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meniadakan SIDA dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

6. Pembinaan dan Pengawasan SIDA

Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BPP Kemendagri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penguatan SIDA. Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penguatan SIDA. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di kabupaten/kota.

Pembinaan penguatan SIDA meliputi:

- a. Koordinasi penguatan sida;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan sida;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan sida;
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Melaksanakan kegiatan kelitbang dalam rangka penguatan sida; dan

- f. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan sida.

Pengawasan penguatan SIDA meliputi:

- a. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan; dan dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran.
- b. Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan. dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

7. Pendanaan SIDA

Pendanaan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaporan SIDA

Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA provinsi kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut disampaikan satu kali. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDA kabupaten/kota kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

9. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan *Roadmap* Penguatan dan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK).

- b. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- i. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 002 Tahun 2011 tentang Panduan Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi di Daerah Otonom.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jakstrada IPTEK Provinsi Sumatera Barat 2011-2015.
- m. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan
- n. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Barat.
- o. Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Sumatera Barat.

10. Hubungan Antar Dokumen

Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) disusun bersinergi dan selaras dengan proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Berikut hubungan *roadmap* penguatan sistem inovasi daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.



Gambar 2.1 Hubungan *roadmap* penguatan sistem inovasi di daerah dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Berdasarkan aspek-aspek yang berperan pada SIDA yang diuraikan di atas, maka dapat ditentukan aspek-aspek kekuatan SIDA (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Aspek Kekuatan Sistem Inovasi Daerah

No	Aspek Kekuatan SIDA
1.	Komitmen, dan kebijakan khusus SIDA di RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Tim Koordinasi Penguatan SIDA dan Dewan Riset Daerah
2.	<i>Roadmap</i> Penguatan dan Rencana Aksi Daerah SIDA serta fokus produk prioritas daerah

No	Aspek Kekuatan SIDA
3.	MoU kerjasama SIDA dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha
4.	RPJMD berdasarkan Roadmap Penguatan SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek No. 03 & 36 tahun 2012
5.	RKPD berdasarkan Rencana Aksi SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek No. 03 dan 36 tahun 2012.
6.	Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA kabupaten/kota, Provinsi Sumbar dan Nasional
7.	Penataan unsur-unsur SIDA melalui (a). Kelembagaan (lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya), (b). Jaringan (komunikasi antarlembaga, mobilisasi SDM, dan optimalisasi IPTEK), dan (c). Sumber daya (kepakaran, kekayaan intelektual, dan informasi, serta sarana dan prasarana IPTEK).
8.	Pelaksanaan SIDA (tim koordinasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan)
9.	Pengembangan SIDA (tahapan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan pemberlanjutan penguatan SIDA)

2.3 TINGKAT KEMATANGAN SIDA

Analysis of National Innovation Systems (ANIS)

ANIS adalah alat untuk menakar kematangan sistem inovasi nasional atau daerah. Analisa dilakukan melalui metode survei dengan penyebaran kuesioner. Responden terdiri dari empat unsur ABGC (*Academics, Business, Government, Council*). Dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang akurat, lengkap dan terpercaya tentang potret sistem inovasi untuk perumusan kebijakan dalam hal inovasi nasional/daerah. Pengisian harus sesuai dengan keadaan atau kondisi saat ini. Bukan kondisi ideal yang diinginkan. (Tatang, 2012).

Workshop Sistem Inovasi Nasional (SINAS, 2010) memberikan batasan bahwa inovasi merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembang-kan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan IPTEK yang telah ada kedalam produk atau proses produksi. ANIS mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah perekonomian dari sistem regional atau lokal dan negara termasuk pemeriksaan menyeluruh dan evaluasi status

sistem inovasi yang ada. Penggunaan ANIS ini dengan melakukan wawancara dengan para ahli (ABGC) di level makro, meso dan tingkat mikro yang akan memberikan gambar rinci ekonomi secara nasional dan regional. Pendekatan analitis ini dimaksudkan terutama untuk negara berkembang di mana standar benchmarking inovasi dan pemantauan pendekatan mungkin tidak tepat. Pendekatan ANIS menyediakan cepat dan komprehensif. Akibatnya, kebijakan yang ditargetkan tindakan dapat dirumuskan untuk mengatasi faktor penentu. Kebijaksanaan pembuat sehingga dapat mendapatkan keuntungan dari nasihat jelas ketika berjuang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem inovasi mereka dan mengidentifikasi faktor penentu yang harus mendapat perhatian khusus (BPPT, 2011).

Pendekatan ANIS didasarkan pada asumsi bahwa sistem inovasi sangat dipengaruhi oleh pendapat para aktor penentu dari pemerintahan, perguruan tinggi dan swasta yang masing-masing mencerminkan aspek dari sistem inovasi. Faktor penentu itu dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat (Seidel, 2013), yakni:

A. Level Makro (Kebijakan).

Level makro SIDA bersifat global dan menopang komitmen dan arah pengembangan sistem inovasi. Level ini merupakan level kebijakan, rencana induk dan regulasi penopang inovasi dan terdiri dari tujuh determinan yaitu kebijakan inovasi nasional, kebijakan inovasi daerah, *master plan*, pelatihan dan pendidikan, *foresight research & development (R&D) agenda*, kebijakan klaster, dan regulasi ramah inovasi.

B. Level Meso (Kelembagaan dan Program)

Level meso SIDA berada pada tataran menengah sebagai pendukung sistem inovasi dan terdiri dari dua bagian yaitu dukungan kelembagaan inovasi dan dukungan program (dan anggaran) inovasi. Bagian kelembagaan terdiri dari tujuh determinan yaitu pusat alih teknologi, *technopark*, inkubator-inkubator, klaster-klaster, lembaga promosi bisnis, penyedia layanan inovasi, dan lembaga pendanaan inovasi. Sementara, bagian program pendukung terdiri dari delapan determinan juga yaitu skema pembiayaan sains, teknologi dan inovasi (STI), program riset dasar, program riset terapan, skema pendanaan bersama, upaya pendampingan sains, teknologi dan inovasi (STI), dukungan kewirausahaan, program pengembangan klaster, dan fasilitasi internasional.

C. Tingkat Mikro (Kapasitas Inovasi).

Level mikro SIDA bersifat teknis dengan berbagai pelaksana langsung sistem inovasi. Level ini merupakan level kapasitas inovasi dan terdiri dari delapan determinan yaitu universitas, balai riset dasar, balai riset terapan swasta, inovator-inovator, investor swasta, wirausahawan, usaha kecil dan menengah (UKM), dan industri besar.

Determinan-determinan SIDA yang berjalan efektif dan unggul, pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing produk, daya saing bisnis, dan daya saing daerah. Berikut uraian ringkas masing-masing determinan untuk setiap levelnya.

Definisi Determinan ANIS

Kondisi SIDA yang matang (*mature*) sesuai dengan ANIS (Analysis of National Innovation System) adalah apabila SIDA Kabupaten Pesisir Selatan memiliki determinan-determinan ANIS yang telah terimplementasikan secara efektif dan unggul. Determinan-determinan SIDA tersebut merupakan faktor-faktor penentu efektifitas SIDA yang dikelompokkan ke dalam tiga level atau aras (makro, meso, dan mikro) dan terdiri dari 30 determinan. Tabel 2.2 memperlihatkan determinan tataran makro, meso, dan mikro yang harus dimiliki, berjalan efektif, dan bahkan unggul oleh Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.2 Determinan Tataran Makro, Meso, dan Mikro Sistem Inovasi Daerah

SISTEM INOVASI DAERAH			
Level (Aras)			
Makro	Meso		Mikro
Kebijakan dan Regulasi Inovasi	Dukungan Kelembagaan Inovasi	Dukungan Program Inovasi	Kapasitas Inovasi
1. Kebijakan Inovasi Nasional 2. Kebijakan Inovasi Daerah 3. <i>Master Plan</i> 4. Pelatihan dan Pendidikan 5. <i>Foresight Research &</i>	1. Pusat Alih Teknologi 2. <i>Technopark</i> 3. Inkubator-inkubator 4. Klaster-klaster 5. Lembaga Promosi Bisnis 6. Penyedia Layanan Inovasi	1. Skema Pembiayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) 2. Program Riset Dasar 3. Program Riset Terapan 4. Skema Pendanaan Bersama 5. Upaya Pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)	1. Universitas 2. Balai Riset Dasar 3. Balai Riset Terapan Swasta 4. Inovator-inovator 5. Investor Swasta

SISTEM INOVASI DAERAH			
Level (Aras)			
Makro	Meso		Mikro
Kebijakan dan Regulasi Inovasi	Dukungan Kelembagaan Inovasi	Dukungan Program Inovasi	Kapasitas Inovasi
<i>Development Agenda</i> 6. Kebijakan Klaster 7. Regulasi Ramah Inovasi	7. Lembaga Pendanaan Inovasi	6. Dukungan Kewirausahaan 7. Program Pengembangan Klaster 8. Fasilitasi Internasional	6. Wirausahawan 7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 8. Industri Besar

Level makro SIDA bersifat global dan menopang komitmen dan arah pengembangan sistem inovasi. Level ini merupakan level kebijakan, rencana induk dan regulasi penopang inovasi dan terdiri dari tujuh determinan yaitu kebijakan inovasi nasional, kebijakan inovasi daerah, *master plan*, pelatihan dan pendidikan, *foresight research & development (R&D) agenda*, kebijakan klaster, dan regulasi ramah inovasi.

Level meso SIDA berada pada tataran menengah sebagai pendukung sistem inovasi dan terdiri dari dua bagian yaitu dukungan kelembagaan inovasi dan dukungan program (dan anggaran) inovasi. Bagian kelembagaan terdiri dari tujuh determinan yaitu pusat alih teknologi, *technopark*, inkubator-inkubator, klaster-klaster, lembaga promosi bisnis, penyedia layanan inovasi, dan lembaga pendanaan inovasi. Sementara, bagian program pendukung terdiri dari delapan determinan juga yaitu skema pembiayaan sains, teknologi dan inovasi (STI), program riset dasar, program riset terapan, skema pendanaan bersama, upaya pendampingan sains, teknologi dan inovasi (STI), dukungan kewirausahaan, program pengembangan klaster, dan fasilitasi internasional.

Level mikro SIDA bersifat teknis dengan berbagai pelaksana langsung sistem inovasi. Level ini merupakan level kapasitas inovasi dan terdiri dari delapan determinan yaitu universitas, balai riset dasar, balai riset terapan swasta, inovator-inovator, investor swasta, wirausahawan, usaha kecil dan menengah (UKM), dan industri besar.

Determinan-determinan SIDA yang berjalan efektif dan unggul, pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing produk, daya saing bisnis, dan daya saing daerah. Berikut uraian ringkas masing-masing determinan untuk setiap levelnya.

A. Level Makro (Kebijakan, Rencana Induk dan Regulasi Inovasi)

Level ini meliputi berbagai kebijakan, rencana induk dan regulasi yang menopang kondusifnya sistem inovasi di suatu daerah, sebagai berikut.

1. Kebijakan Inovasi Nasional

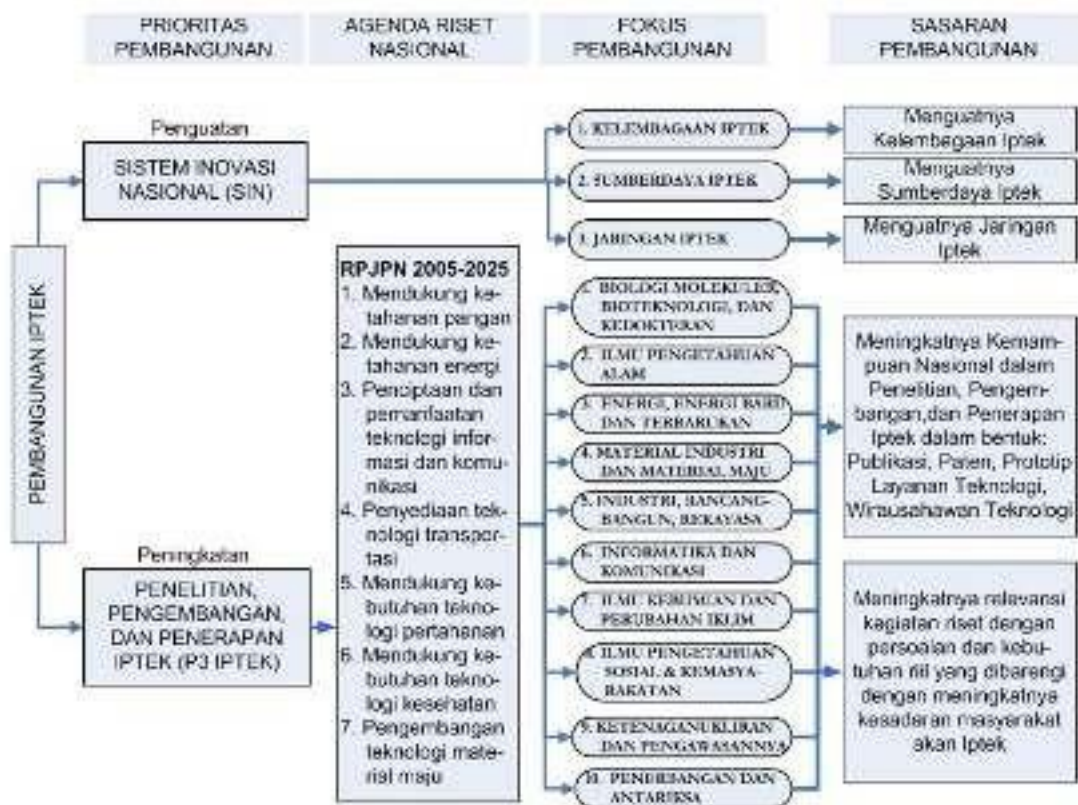
Kebijakan inovasi nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk menopang implementasi inovasi di pemerintah dan masyarakat. Kebijakan inovasi nasional secara umum tercantum pada dua cita dari Nawacita Pemerintah Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (lihat Gambar 2.2), yaitu:

- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



Gambar 2.2 Nawacita Pemerintah Presiden Jokowi-Jusuf Kalla

Kebijakan umum inovasi nasional tersebut diuraikan dengan kebijakan IPTEK nasional dalam RPJMN. Gambar 2.3 memperlihatkan kebijakan nasional terkait pembangunan IPTEK secara nasional. Salah satu kebijakan pengembangan IPTEK sebagai prioritas pembangunan adalah penguatan sistem inovasi nasional dengan tiga fokus pembangunan yaitu kelembagaan, sumberdaya dan jaringan IPTEK.



Gambar 2.3. Kebijakan Nasional Terkait Pembangunan Iptek

Untuk program implementasinya, kebijakan inovasi nasional tercantum pada Inisiatif Inovasi 1-747 yang terdiri dari alokasi anggaran 1% dari GDP per tahun untuk menunjang program inovasi, 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi, dan 7 sasaran visi inovasi 2025 (lihat Gambar 2.4).

Untuk dapat diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan Pemerintah Daerah, kebijakan inovasi nasional juga didukung oleh Peraturan Bersama Menristek

Nomor 3/2012 dan Mendagri Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

INISIATIF INOVASI (1-747)			
1. Visi dan Misi Inovasi Daerah	2. Strategi Inovasi Daerah	3. Kebijakan Inovasi Daerah	4. Rencana Aksi Inovasi Daerah
<p>1. Visi dan misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>2. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>3. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>4. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>5. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>6. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>7. Misi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p>	<p>1. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>2. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>3. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>4. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>5. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>6. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>7. Strategi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p>	<p>1. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>2. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>3. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>4. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>5. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>6. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>7. Kebijakan inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p>	<p>1. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>2. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>3. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>4. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>5. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>6. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p> <p>7. Rencana aksi inovasi daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.</p>

Gambar 2.4. Kebijakan inovasi nasional yang tercantum pada Inisiatif Inovasi (1-747)

2. Kebijakan Inovasi Daerah

Kebijakan inovasi daerah terdiri dari kebijakan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan Inovasi Daerah di tingkat Provinsi Sumatera Barat tercantum di:

- Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3/2012 dan Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat
- *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Barat
- Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Barat.

Kebijakan Inovasi Daerah di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di:

- Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3/2012 dan Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
- *Roadmap* Penguatan dan Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Agar SIDA Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan peningkatan daya saing daerah dapat terimplementasikan secara efektif dan bahkan unggul/optimal, Roadmap Penguatan SIDA tersebut diintegrasikan ke dalam RPJMD lima tahunan dan Rencana Aksi SIDA diintegrasikan ke dalam RKPD tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Master Plan

Suatu master plan atau rencana induk inovasi disusun untuk meningkatkan kapasitas inovasi daerah. Master plan harus mampu menjabarkan kebijakan inovasi nasional dan daerah ke dalam program implementasi. Di dalam master plan terdapat isu-isu prioritas menurut kebutuhan daerah dan implementasi tersebut ke dalam program dan aksi spesifik yang jelas. Master plan disusun berdasarkan evaluasi akibat dan asesmen dampak dari kebijakan, program, proyek, dan organisasi. Master plan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di:

- RPJMD dan Renstra SKPD serta *master plan* pengembangan sektor pertanian subsektor perikanan dan peternakan
- *Master plan* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berisi perencanaan detail implementasi determinan-determinan dan fokus komoditas/produk inovasi sistem inovasi daerah yang akan dinaikkan nilai tambah dan kapasitas produksinya di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pelatihan dan Pendidikan

Kapasitas inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh level pendidikan daerahnya. Oleh sebab itu, kebijakan pelatihan dan pendidikan diterbitkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualifikasi tinggi untuk dapat masuk ke dalam proses inovasi dan responsif terhadap perkembangan inovasi, terlebih sebagai pelaku inovasi dan bisnis. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi dapat mendorong sumberdaya manusia mampu mengembangkan produk dan proses baru. Akreditasi dan/atau peringkat sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi ukuran kualitas dan potensi pendidikan sumberdaya manusia untuk memiliki kompetensi lengkap dan kreatifitas. Kebijakan pelatihan dan pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

- Kebijakan pendidikan dan pelatihan yang tercantum di dalam RPJMD

- Kebijakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kebijakan pendidikan keahlian/vokasi, dan kebijakan pendidikan dan pelatihan keahlian yang dikeluarkan bersama oleh SKPD terkait, balai diklat pemerintah, dan perguruan tinggi mitra.

5. Foresight Research & Development Agenda

Research and development (R&D) atau penelitian dan pengembangan merupakan domain penting sebagai prasyarat di dalam kebutuhan inovasi ke masa depan. Di dalam inovasi, R&D mesti menghasilkan nilai tambah produk dan proses agar bisnis mampu bersaing. Kebijakan R&D mesti dapat mempengaruhi arah dan target serta program lembaga riset pemerintah dan swasta serta lembaga riset dasar dan terapan. Kebijakan mesti dapat mendorong efektifitas input seperti pendanaan untuk menghasilkan output seperti produk dan proses baru serta paten atau lisensi.

Bagi banyak hal, output riset dasar dapat menjadi landasan riset terapan. Kebijakan R&D dapat berupa foresight research & development agenda, dimana di daerah dapat berupa Jakstrada IPTEK yaitu Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disusun sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan serta agenda riset bagi seluruh pelaku pembangunan IPTEK, baik dari unsur pemerintahan (Ristek, lembaga litbang departemen, daerah dan perguruan tinggi), maupun pihak swasta.

6. Kebijakan Klaster

Salah satu aspek penting sistem inovasi adalah jaringan atau networking dan salah satunya dalam bentuk klaster. Menurut Kemenkop-UMKM, klaster adalah kelompok kegiatan terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, dimana kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah jaringan. Dengan jaringan, dapat dengan mudah diakses sumber bahan baku, teknologi, sumber hasil riset produk dan proses baru, SDM, permodalan, dan pasar/konsumen. Jaringan dapat terbentuk dengan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator,

perguruan tinggi dan lembaga riset sebagai sumber IPTEK, industri pendukung, industri terkait, dan lembaga-lembaga dan sektor-sektor pendukung. Faktor-faktor ini mendukung untuk meningkatkan daya saing usaha. Untuk itu, perlu diterbitkan kebijakan klaster terutama untuk industri di suatu daerah. Kebijakan klaster industri terutama untuk IKM dapat diperoleh dari Kemenperin, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Regulasi Ramah Inovasi

Regulasi merupakan salah satu faktor sistem inovasi. Regulasi mengatur sistem inovasi berjalan sesuai hukum dan kepentingan daerah. Regulasi mesti ramah terhadap inovasi dimana regulasi mendorong dan bukan menghambat proses inovasi untuk menghasilkan produk dan/atau proses baru untuk meningkatkan daya saing usaha di daerah sejauh tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi lainnya. Regulasi dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah (berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah). Untuk mendukung inovasi, diperlukan dokumen evaluasi peningkatan tingkat keramahan inovasi pada regulasi daerah. Berdasarkan dokumen evaluasi ini, seluruh regulasi diubah agar ramah inovasi.

B. Level Meso (Dukungan Kelembagaan dan Program Inovasi)

Determinan-determinan (faktor penentu) Level Meso kelembagaan ini terdiri dari tujuh lembaga pendukung keberlanjutan pelaksanaan inovasi, yaitu:

1. Pusat Alih Teknologi

Pusat alih teknologi adalah lembaga yang melaksanakan proses alih keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas dari pihak yang berkompetensi kepada yang membutuhkan yang akan menjadikan produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.

Alih teknologi (transfer of technology, TOT) adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara pemerintah atau universitas dan lembaga lain untuk

memastikan bahwa perkembangan IPTEK dapat diakses dengan lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ke dalam produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa [Wikipedia].

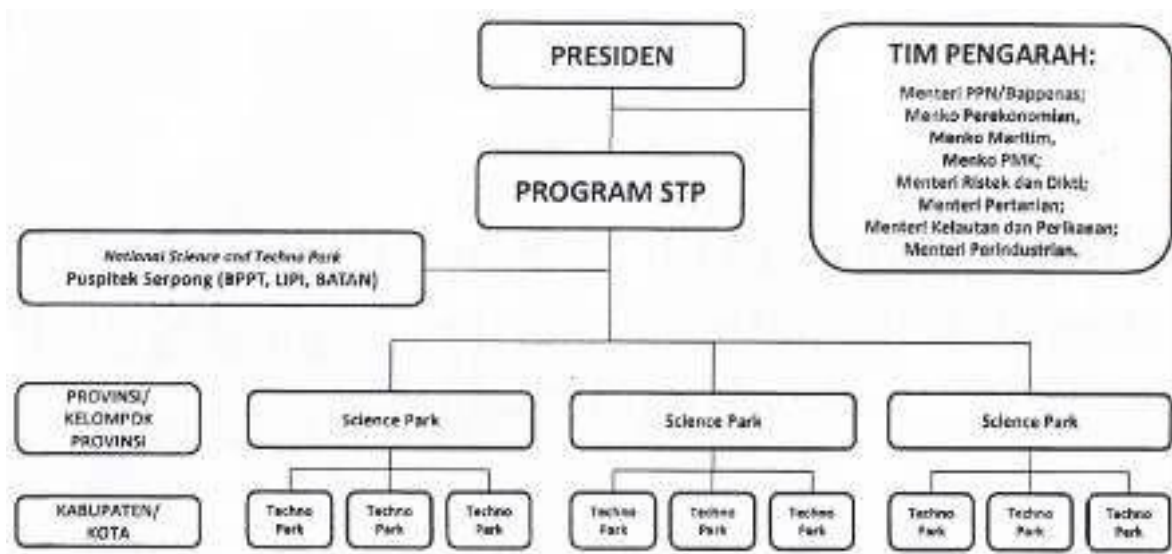
Pusat alih teknologi mengkhususkan diri dalam acara-acara perijodohan usaha, pelatihan, seminar, konferensi, inkubasi untuk start-up, kolaborasi proyek nyata dan lain-lain; lebih lanjut menyediakan penempatan bisnis, serta membantu fasilitasi akses pasar yang mudah dan solusi bermitra dengan para entitas.

2. Technopark

Science and Technology Park (STP) adalah lembaga yang mampu memfasilitasi aliran investasi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif. Di banyak negara maju, lembaga tersebut terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. Gambar 2.4b memperlihatkan program *science-technopark* nasional yang secara organisasi berada di bawah Presiden. Program STP ini membina seluruh *science park* yang berada di tingkat provinsi dan *technopark* di tingkat kabupaten/kota. Arah kebijakan dan strategi pengembangan *science-technopark* sebagai berikut:

- a. Pembangunan *Science-technopark* Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai: Pusat pengembangan sains dan teknologi maju; Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
- b. Pembangunan *Science Park* Provinsi diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di *technopark*; dan Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
- c. Pembangunan *Technopark* Kabupaten/Kota diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; dan tempat pelatihan,

pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas.



Gambar 2.5 Program *Science-Technopark* Nasional [Bappenas, 2015]

Technopark adalah suatu kawasan terpadu yang dikelola untuk mempromosikan inovasi. Secara fisik, kawasan itu memiliki berbagai fasilitas IT (information technology), litbang (penelitian dan pengembangan), diklat (pendidikan dan pelatihan), produksi, inkubator teknologi dan bisnis, konsultasi dan mediasi bisnis, klaster industri, perkantoran, konvensi, pusat ekspo dan perdagangan. Berbagai UKM yang menjadi tenant dapat menggunakan seluruh fasilitas tersebut dan dibina melalui program inkubasi dan pendampingan agar mampu tumbuh kembang secara mandiri.

Secara kelembagaan, unit tersebut merupakan kawasan bersama terpadu, yang menyediakan informasi dan teknologi untuk bisnis hasil inovasi, yang di dalamnya berbagai entitas bekerjasama seperti industri, perguruan tinggi, lembaga litbang dan diklat, inovator, wirausahawan, UKM/IKM, perusahaan besar, jasa keuangan, Pemerintah Pusat, dan Pemda.

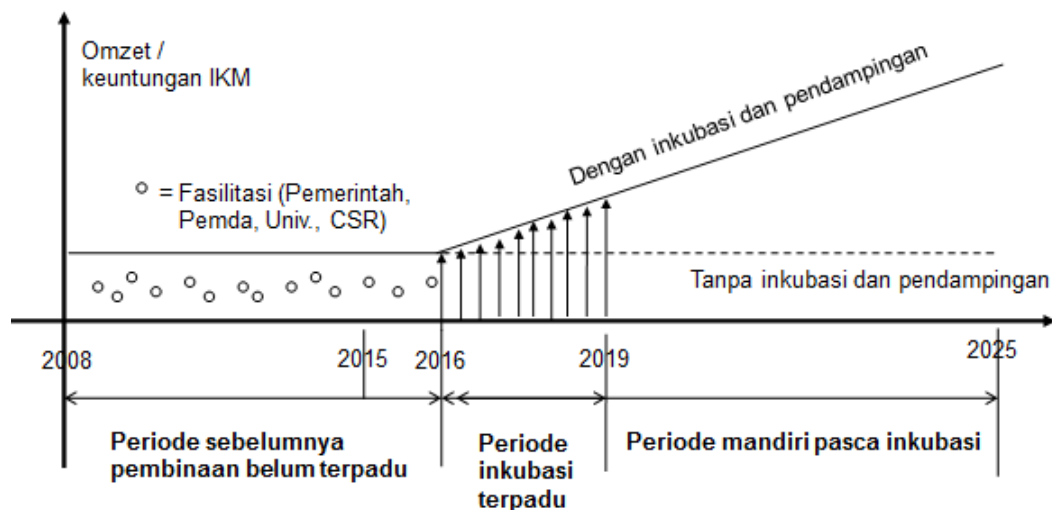
Technopark berbeda dengan inkubator yang didedikasikan untuk start-up dan tahap awal perusahaan. Technopark cenderung merupakan proyek skala besar yang menaungi segala hal dari perusahaan, pemerintah atau laboratorium universitas sampai perusahaan kecil. Kebanyakan technopark tidak menawarkan

jasa bantuan usaha, yang merupakan inti dari program inkubasi bisnis. Namun, banyak technopark memiliki program inkubasi.

3. Inkubator-inkubator

Inkubator adalah lembaga yang melaksanakan inkubasi yaitu model penumbuhkembangan UKM dimana pengusaha dididik untuk menguasai semua aspek bisnis, dibekali dengan sarana dan modal kerja, serta didampingi secara intensif. Program inkubasi secara umum bertujuan untuk menghasilkan UKM atau IKM dan pengusaha yang mandiri dan mampu bersaing dalam memproduksi dan berbisnis produk industri.

Dengan program ini akan diperoleh berbagai manfaat di antaranya semakin tumbuh dan berkembangnya industri dan bisnis di daerah. Dampak yang akan diperoleh dari sektor industri dan bisnis tersebut adalah meningkatnya penerimaan daerah, pendapatan per kapita tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja di daerah.



Gambar 2.6 Omzet atau keuntungan UKM/IKM sebelum, ketika dan setelah program inkubasi dan pendampingan.

Gambar 2.6 memperlihatkan kinerja UKM/IKM dengan indikator kinerja utama omzet atau keuntungan sebelum, selama dan setelah program pemberdayaan (dengan inkubasi dan pendampingan). Seperti diketahui, kinerja UKM belum seperti diharapkan yaitu menjadi mandiri dan mampu bersaing walau berbagai

fasilitas telah banyak digulirkan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan tinggi dan swasta. Inkubasi dan pendampingan diperlukan untuk membina kapasitas UKM baik ke arah dalam (internal) maupun ke arah luar (eksternal), baik secara kelembagaan maupun unit produksi dan bisnis sehingga kinerja tersebut meningkat. Dukungan pemberdayaan ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta. Dengan inkubasi dan pendampingan, rencana kinerja UKM berupa peningkatan omzet dan keuntungan setiap tahunnya dapat direalisasikan.

Pengembangan UKM seperti di atas dapat dilakukan dengan inkubasi dan pendampingan selama kurun waktu tertentu misalnya lima tahun sampai industri menengah dan besar dapat terwujud. Dengan pendampingan, para UKM dapat dibina dan difasilitasi sampai menjadi pengusaha mandiri dengan indikator kinerja utama (KPI) yaitu omzet dan keuntungan yang meningkat seperti industri di daerah dan negara lain.

Proses inkubasi terdiri dari pra-inkubasi, tahap inkubasi dan pasca-inkubasi. Inkubator terdiri dari:

- Inkubator bisnis (*business incubator*) yang berorientasi memberikan dukungan dalam memulai bisnis melalui saran, sewa ruang, dan menawarkan fasilitas administratif dan layanan lainnya. Inkubator yang kuat apabila memiliki koneksi yang baik dengan sumber pendanaan atau bahkan menjadi investor bisnis.
- Inkubator teknologi (*technological incubator*) yang membantu perusahaan-perusahaan yang sebagian besar berorientasi teknologi sebagai perusahaan *start-up* dan perusahaan *spin-off*. Perusahaan *spin-off* muncul ketika teknologi tingkat tinggi (misalnya teknologi militer atau mobil balap) digunakan untuk komersialisasi umum. Biasanya, perusahaan-perusahaan tersebut sangat dekat dengan universitas, lembaga riset atau *science-technopark*.

Kegiatan atau layanan inkubator adalah sewa tempat, ruang kuliah dengan peralatan, ruang konferensi, menyediakan akses ke ruang computer dan internet, konseling dan kerjasama dalam penyusunan rencana bisnis dan dalam proses akuisisi dana, jasa administrasi untuk perusahaan yang diinkubasi, dan promosi

layanan yang diberikan oleh inkubator. Inkubator menjadi mitra jaringan dari program perusahaan yang dirancang untuk *start-up*. Inkubator melaksanakan berbagai pelatihan, pertemuan, seminar dan presentasi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Inkubator juga membantu penciptaan proyek, jaringan klaster, presentasi perusahaan, penciptaan desain, dan organisasi acara. Inkubator bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra untuk pendidikan dan konseling.

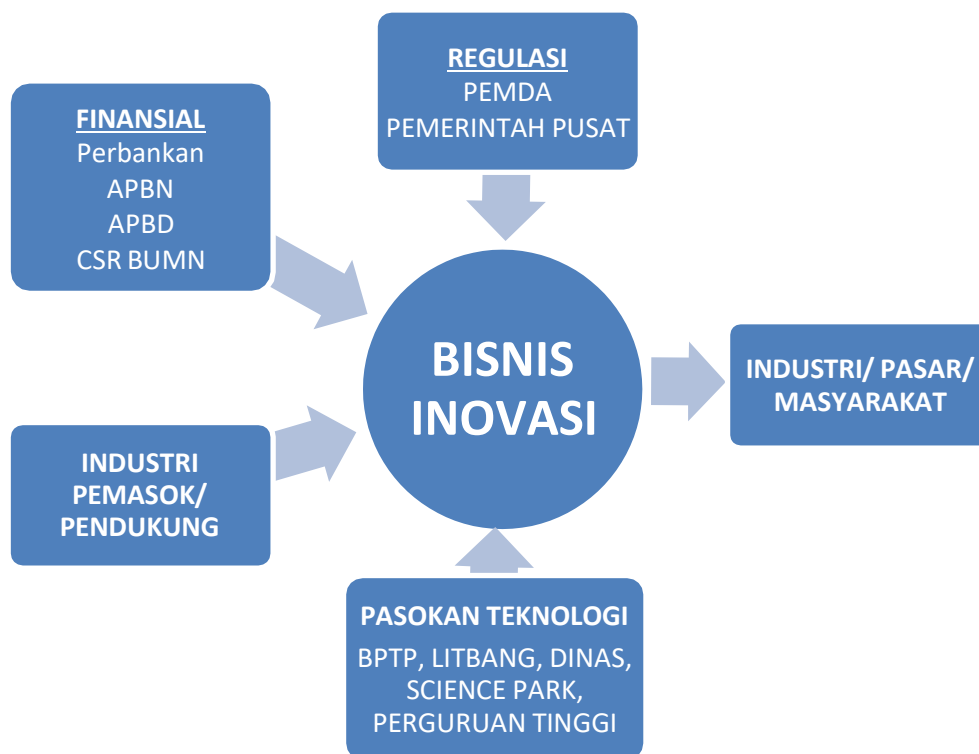
Layanan inkubator paling umum adalah: membantu dasar-dasar bisnis, kegiatan *networking*, bantuan pemasaran, membantu akuntansi dan manajemen keuangan, akses ke pinjaman bank, dana pinjaman dan program jaminan akses kepada investor perintis atau modal ventura, membantu kemampuan presentasi, akses ke sumber pendidikan tinggi, akses ke mitra strategis, membantu program komprehensif pelatihan bisnis, dewan penasihat dan mentor dan bantuan teknologi komersialisasi. Meskipun sebagian besar inkubator menawarkan ruang kantor klien dan pelayanan administrasi bersama, inti program inkubasi bisnis sebenarnya adalah layanan yang disediakan untuk memulai perusahaan (*start-up*).

4. Klaster-klaster

Klaster-klaster yang diharapkan ada pada suatu daerah dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah berupa klaster inovasi dan klaster industri. Berikut uraian keduanya.

a. Klaster Inovasi

Klaster inovasi adalah kelompok kegiatan bisnis inovasi yang saling terkait yang terdiri dari bisnis inovasi itu sendiri, industri pemasok, lembaga pasokan teknologi, industri/pasar/masyarakat sebagai pengguna output bisnis inovasi, regulasi dan finansial. Gambar 2.7 memperlihatkan sebuah klaster inovasi. Output klaster ini dapat berupa SDM kompeten, produk, metode, aplikasi atau proses inovatif.



Gambar 2.7 Klaster Inovasi

b. Klaster Industri

Klaster industri adalah kelompok kegiatan terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, pemasok bahan baku, industri terkait, lembaga pendukung sistem klaster dan pembeli, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, dimana kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah jaringan. Industri inti tentunya adalah industri produk olahan. Juga terdapat pemasok bahan baku dan komponen. Industri pendukung terdiri dari PLN, bank dan lembaga keuangan, jasa transportasi, telekomunikasi dan pengemasan. Industri terkait terdiri dari pemasok energi, pemasok mesin, dan pemasok suku cadang. Lembaga pendukung sistem klaster di antaranya instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dan KADIN. Di pihak pengguna terdapat distributor, industri pengolahan lainnya, perusahaan, pemerintah, konsumen, dan sebagainya. Gambar 2.8 mengilustrasikan sebuah klaster industri produk perikanan dan pertanian



Gambar 2.8 Klaster Industri Produk Perikanan dan Pertanian

Dengan termasuk dalam suatu klaster, dunia usaha atau industri akan memiliki efisiensi dan daya saing yang tinggi. Pihak-pihak di dalam suatu klaster dipadukan melalui sebuah piagam kesepahaman bersama dengan MoU. Klaster ditetapkan oleh kepala daerah dengan sebuah surat keputusan. Klaster dijalankan dengan kontribusi, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. Lembaga Promosi Bisnis

Lembaga promosi bisnis bertanggung jawab untuk memperoleh dan menyediakan jasa konsultasi profesional untuk perusahaan yang ingin mendirikan anak perusahaan atau menjalankan bisnis. Lembaga promosi bisnis adalah lembaga yang mengkhususkan diri sebagai representatif dan penyedia informasi layanan dukungan analisis bagi klien di bidang kegiatan ekonomi dan investasi yang merupakan faktor kunci keberhasilan untuk pengembangan bisnis modern. Tujuan lembaga promosi bisnis adalah:

- Merealisasikan kepentingan ekonomi klien dengan cara yang paling efisien
- Menyusun hubungan saling menguntungkan dan jangka panjang dengan mitra

- Bekerja sama dengan orang-orang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab dan profesional.

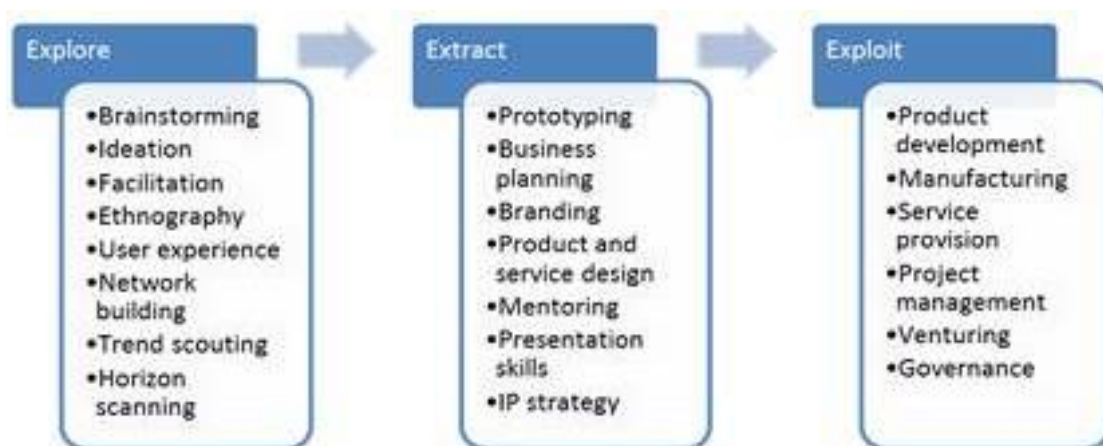
Lembaga promosi bisnis menjalankan misi untuk mencapai keberhasilan bisnis klien dengan prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

- Manajemen proyek
- Sistem dan pendekatan yang kompleks untuk mencapai tujuan
- Pendekatan sesuai kepentingan klien
- Kualitas tinggi dan kecepatan pelaksanaan tugas
- Berlokasi di pusat bisnis maju dan modern.

Lembaga Promosi Bisnis menyediakan program bantuan komprehensif untuk membantu pengusaha atau calon pengusaha usaha untuk peningkatan kapabilitas dan memperoleh peluang-peluang penumbuh-kembangan usaha. Bersama dengan asosiasi dan mitra industri, dapat dikembangkan klaster industri yang kompetitif dan ekosistem inovatif perusahaan-perusahaan yang tangguh.

6. Penyedia Layanan Inovasi

Penyedia Layanan Inovasi membantu pengusaha atau calon pengusaha dalam mengeksplor ide-ide, menyusun rencana dan desain, dan merealisasikan keduanya (lihat Gambar 2.9).



Gambar 2.9 Tahapan layanan inovasi

Penyedia Layanan Inovasi dapat berasal dari perguruan tinggi, balai riset, konsultan teknologi, perusahaan, ventura, kantor hukum, konsultan pasar, dan sebagainya. Penyedia layanan inovasi dapat berupa konsultansi untuk mendukung inovasi, yaitu:

- Pengembangan teknologi berupa studi kelayakan teknik sebelum bisnis dimulai dan dukungan teknologi ketika memulai bisnis, yang masing-masing terdiri dari:
 - a. Studi kelayakan:
 - Asesmen teknologi baru
 - Riset awal dan *prototyping*
 - Adopsi dan pengembangan produk-produk baru, teknologi proses, aplikasi, praktek, atau operasinya
 - Peningkatan produk-produk yang telah ada, teknologi proses, aplikasi, praktek, atau operasinya.
 - b. Dukungan teknologi:
 - Desain dan pengembangan produk
 - Desain, pengembangan dan optimisasi produk
- Pengetesan, evaluasi dan validasi temuan
- Pendiagnostikan bisnis dan aspek legal proyek inovasi
- Pandangan konsumen.

7. Lembaga Pendanaan Inovasi

Lembaga Pendanaan Inovasi adalah lembaga yang memberikan fasilitas pendanaan untuk melaksanakan bisnis inovasi. Pengguna lembaga ini adalah grup/klaster riset sektor public dan/atau perusahaan. Fasilitas ini dapat berupa:

- a. *Voucher* paket peningkatan kapasitas,
- b. Hibah (*grant*),
- c. Bantuan subsidi,
- d. Dana bergulir, dan
- e. Pinjaman atau kredit.

Voucher peningkatan kapasitas dapat berupa serangkaian paket kegiatan komprehensif dan terintegrasi (seperti pelatihan dan konsultasi yang biasanya perlu biaya) yang disediakan secara gratis bagi pengusaha atau calon pengusaha

agar dapat memulai menjalankan bisnis inovasi. Hibah dapat diberikan untuk proses produksi dan distribusi berupa pembelian peralatan, bahan baku, atau biaya promosi. Bantuan subsidi diberikan untuk sebagian biaya pembelian mesin produksi dan sebagainya atau membayar biaya bunga pinjaman. Dana bergulir diberikan kepada pengusaha yang mesti dikembalikan untuk jangka waktu tertentu untuk pinjaman pengusaha lainnya dengan tanpa bunga atau bunga yang disubsidi. Pinjaman merupakan bantuan karena menerapkan bunga rendah namun masih menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.

C. Level Meso (Program Pendukung Inovasi)

Determinan-determinan (faktor penentu) Level Meso terdiri dari delapan program/skema pendukung pelaksanaan inovasi, yaitu:

1. Skema Pembiayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)

Skema pembiayaan sains, teknologi dan inovasi (STI) berasal pada umumnya dari pemerintah dan industri besar serta perguruan tinggi. Pembiayaan ini merupakan pendanaan riset yang meliputi berbagai bentuk pendanaan untuk riset ilmiah, dalam area ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan teknologi. Pendanaan ini umumnya diperoleh melalui proses yang kompetitif, di mana proyek-proyek penelitian potensial dievaluasi dan hanya yang paling menjanjikan yang akan menerima dana. Proses yang dijalankan oleh pemerintah, perusahaan atau yayasan itu, mengalokasikan dana yang tidak umum. Kebanyakan dana penelitian berasal dari dua sumber utama, perusahaan (melalui penelitian dan pengembangan departemen) dan pemerintah (terutama dilakukan melalui universitas dan lembaga pemerintah khusus; seperti dewan riset). Untuk implementasi skema ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Skema Pembiayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI).

2. Program Riset Dasar

Program riset dasar adalah program dan anggaran untuk melaksanakan riset dasar. Riset dasar atau murni bertujuan untuk mengembangkan teori-teori ilmiah untuk meningkatkan pemahaman atau prediksi fenomena alam atau lainnya. Riset dasar

umumnya dimulai dari rasa ingin tahu. Walaupun begitu, riset dasar mendorong adanya inovasi sains terapan atau teknologi. Untuk implementasi program ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Program Riset Dasar.

3. Program Riset Terapan

Program riset terapan adalah program dengan anggaran untuk melaksanakan riset terapan. Riset terapan adalah bentuk penelitian sistematis yang melibatkan aplikasi praktis sains. Ini mengakses dan menggunakan teori-teori, pengetahuan, metode, teknik untuk tujuan spesifik, dan sering didorong oleh pemerintah, bisnis, atau klien. Riset terapan berhubungan dengan *problem solving* dan umumnya menggunakan metode empiris. Program riset terapan dapat menjalankan dan mendanai inovasi untuk menghasilkan produk dan proses baru serta paten atau lisensi. Untuk implementasi program ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Program Riset Terapan.

4. Skema Pendanaan Bersama

Skema pendanaan bersama disediakan termasuk untuk memfasilitasi pendanaan program inovasi. Program kemitraan pendanaan bersama umumnya bersifat kompetitif dan merupakan inisiatif dana pendamping yang dilakukan dalam kolaborasi dengan agen/badan pendanaan, hibah, CSR, kementerian atau perusahaan. Program ini khususnya melibatkan pengajuan proposal bersaing kepada komunitas riset. Skema pendanaan bersama dapat berupa tematik dan dapat menggunakan dana sampai 50%. Jumlah eksaknya akan dipengaruhi sifat strategis kolaborasi dan potensi untuk menyempurnakan pelaksanaan agenda riset dan inovasi.

Skema pendanaan bersama ini dipimpin oleh industri dan didukung oleh mitra swasta dan bersama dengan berbagai mitra industri, akademik, riset, dan lembaga. Ini akan menciptakan hubungan kuat antara proyek demonstrasi, fundamental dan terapan dan mempercepat pengembangan. Untuk implementasi skema ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Program Riset Dasar.

5. Upaya Pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)

Upaya pendampingan sains, teknologi dan Inovasi (STI) adalah langkah-langkah yang diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas inovasi UKM yang telah ada. Upaya pendampingan dilakukan untuk mencegah UKM rubuh karena turunnya daya saing. Ini dilakukan untuk UKM yang sedang berkembang atau yang baru selesai diinkubasi. Kesadaran pentingnya inovasi serta kapasitas perusahaan untuk berinovasi dan melaksanakan litbang masih terbatas. Pendampingan ini berupa serangkaian *training* di lokasi bagi staf UKM seperti bagaimana melakukan manajemen inovasi, analisis inovasi atau riset pasar. Untuk implementasi skema ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI).

6. Dukungan Kewirausahaan (Entrepreneurial Supports)

Dukungan kewirausahaan memungkinkan individu kewirausahaan untuk sukses yaitu untuk para wirausahawan dan *start-up* (pengusaha pemula) sebagai pendorong kunci bagi inovasi. Dukungan kewirausahaan dapat berasal dari pemerintah, perusahaan dan industri besar, KADIN dan universitas. Dukungan kewirausahaan dapat berupa fasilitasi kemudahan inkubasi, ventura, akses modal, pelatihan, dan sebagainya. Seperti bisnis lain, banyak bentuk dukungan yang dapat mencakup bantuan mengembangkan rencana bisnis, mengamankan pinjaman atau pendanaan untuk biaya *start-up*, akuntansi dukungan dalam hal membayar pajak dan masalah penggajian lainnya, serta mengambil keuntungan dari inisiatif kerja dan insentif pajak. Dukungan juga bisa dalam hal menyewa ruang kantor, membeli *furniture* dan sebagainya. Untuk implementasi skema ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Dukungan Kewirausahaan.

7. Program Pengembangan Klaster

Program pengembangan klaster adalah berbagai kegiatan pengembangan klaster bisnis secara ekonomi. Pemerintah dan universitas sangat berperan dalam pengembangan klaster. Pengembangan klaster bertujuan untuk meningkatkan

daya saing ekonomi satu atau beberapa sektor bisnis. Pengembangan klaster diatur sebagai kolaborasi antara sejumlah pelaku sektor publik dan swasta, seperti perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga akademis.

Klaster berpotensi untuk mempengaruhi persaingan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan di klaster, dengan mendorong inovasi di lapangan, dan dengan merangsang bisnis baru di bidangnya. Untuk implementasi program ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Program Pengembangan Klaster.

8. Fasilitas Internasional

Fasilitas internasional di dalam sistem inovasi daerah berupa (1). peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang relevan, (2). pengembangan HaKI, mutu, standar dan kelestarian lingkungan, (3). pengembangan teknologi dunia usaha, dan (4). pengembangan/penguatan kerjasama internasional. Untuk implementasi fasilitas ini yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB Fasilitas Internasional.

C. Level Mikro (Kapasitas Inovasi)

Determinan-determinan (faktor penentu) Level Mikro terdiri dari delapan aktor pelaksana inovasi. Kedelapan aktor inovasi ini dikerahkan untuk melaksanakan inovasi dan bisnisnya melalui suatu kerjasama yang dinaungi oleh kesepakatan bersama dalam bentuk MoU. Aktor-aktor pelaksana ini memberikan kontribusi dengan memiliki program, dan tugas pokok dan fungsi di dalam Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kedelapan aktor inovasi tersebut adalah:

1. Universitas

Universitas adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tiga dharma ini universitas dengan kapasitasnya sanggup untuk menghasilkan lulusan (vokasi, akademik S1, S2 dan S3, serta profesi) sebagai sumber daya manusia yang berkompetensi dan diperlukan masyarakat dan dunia

kerja, invensi dan inovasi. Di dalam sistem inovasi, universitas berperan menghasilkan SDM dan produk, teknologi, dan proses inovatif. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan universitas dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Institusi Riset Dasar

Institusi Riset Dasar adalah satuan atau unit yang melaksanakan berbagai riset dasar terutama untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan-pertanyaan fenomena dasar alam dan sosial. Penelitiannya umumnya bersifat berskala laboratorium dan outputnya berupa penemuan (*discovery*) atau teori. *Discovery* dapat digunakan untuk menghasilkan invensi produk atau proses terapan tertentu yang baru atau yang lebih baik. Biasanya, pemerintah melaksanakan riset-riset dasar ini. Di dalam sistem inovasi, Institusi Riset Dasar melaksanakan penelitian dasar. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan institusi riset dasar dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Institusi Riset Terapan

Institusi Riset Terapan adalah satuan atau unit yang melaksanakan berbagai riset terapan berdasarkan temuan *discovery* atau invensi sebelumnya, terutama untuk memberikan solusi dari berbagai persoalan teknologi dan pemanfaatannya. Penelitiannya umumnya bersifat berskala satu banding satu (prototipe) dan bahkan skala produksi dan outputnya adalah invensi dan bahkan inovasi. Hasil riset terapan dapat dikembangkan menjadi skala difusi dan komersialisasi. Di dalam sistem inovasi, Institusi Riset Terapan melaksanakan penelitian terapan. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan institusi riset terapan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Inovator-inovator

Inovator adalah seseorang atau kelompok yang pertama kali memperkenalkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya atau baru sama sekali. Para innovator menerapkan penemuan dasar (*discovery* atau invensi) untuk menghasilkan produk atau proses terapan tertentu. Inovasi produk adalah pengembangan produk atau

jasa baru atau yang lebih baik, sedangkan inovasi proses mengacu pada metode atau distribusi yang baru atau yang lebih baik. Dengan inovasi, suatu produk atau proses yang baru atau yang lebih baik akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang lebih baik. Dibandingkan dengan penemu *discovery* dan/atau inventor, para inovator harus mampu membuat produknya masuk ke dalam pasar komersial. Di dalam sistem inovasi, para inovator menghasilkan inovasi produk dan proses. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB inovator dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Investor Swasta

Investor swasta adalah seseorang atau kelompok yang mampu mengarahkan sumberdaya untuk melaksanakan usaha yang potensial atau sudah terbukti menguntungkan secara komersial. Usaha atau bisnis ini dapat terkait bagaimana mengubah penemuan, invensi, difusi, dan produk kepada keuntungan. Di dalam sistem inovasi, investor berperan membantu investasi dan melaksanakan usaha. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB investor swasta dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

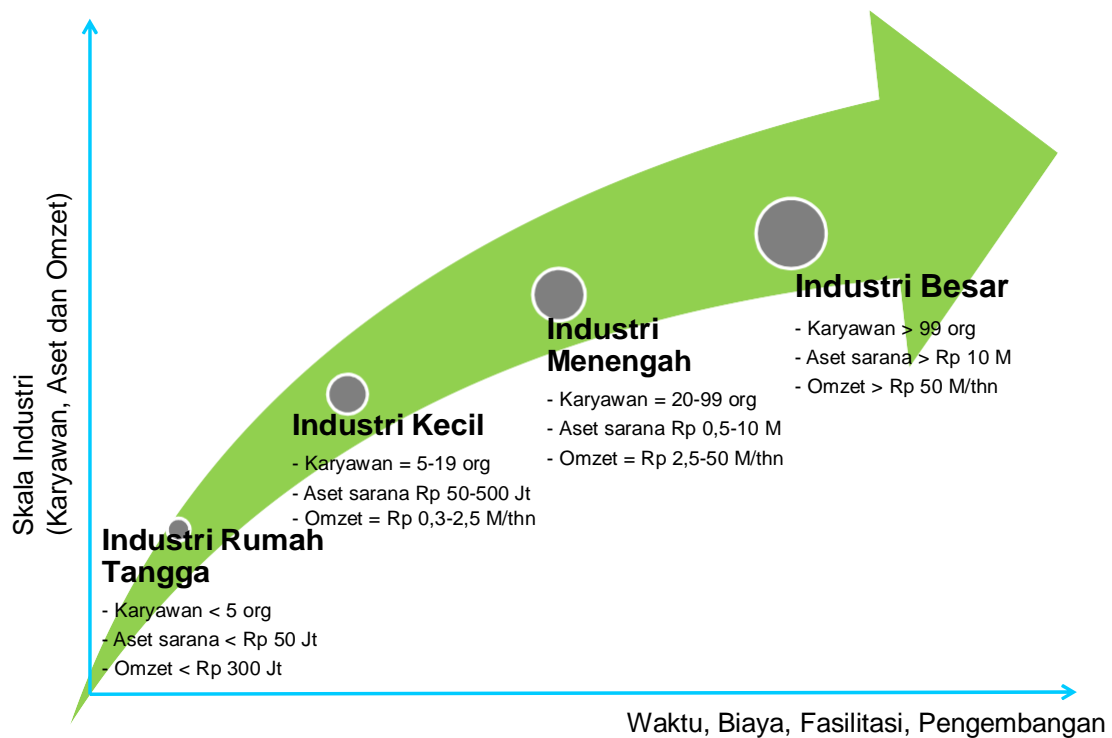
6. Wirausahawan

Wirausahawan adalah seseorang atau kelompok yang mampu memimpin, mengelola, dan melaksanakan usaha yang menguntungkan secara komersial. Usaha menguntungkan disini adalah melaksanakan produksi atau menghasilkan produk yang dapat diterima pasar. Di dalam sistem inovasi, wirausahawan selalu memiliki bisnis dengan produksi dan produk yang inovatif. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB wirausahaan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM adalah perusahaan melaksanakan komersialisasi produk-produk. Di dalam sistem inovasi, UKM melaksanakan nilai tambah dan distribusi produk, bahan baku, dan komponen. UKM yang melaksanakan nilai tambah disebut dengan IKM. UKM ini memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki aset sarana

sampai Rp 10 Milyar dan omzet sampai Rp. 50 Milyar/tahun. Gambar 2.10 memperlihatkan peningkatan skala industri yang diindikasikan oleh meningkatnya jumlah karyawan, aset dan omzet perusahaan. Untuk peningkatan tersebut diperlukan waktu, biaya, dan fasilitasi pengembangan.



Gambar 2.10 Pengembangan UKM/IKM melalui Intervensi Kebijakan dan Regulasi, Kelembagaan dan Program Pengembangan, serta *Capacity Building*

Dengan inovasi, usaha akan memiliki daya saing secara berkelanjutan. IKM akan tetap berdaya saing melalui difusi teknologi dari inovasi yang diterapkan untuk komersial. Di dalam SIDA, UKM/IKM bertindak, baik sebagai aktor maupun sebagai usaha yang dikembangkan oleh SIDA (lihat Gambar 5.3 di Bab V). Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan UKM dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Industri Besar

Industri besar dalam sistem inovasi berperan sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh dan pengguna produk-produk yang dihasilkan dari IKM dan juga sebagai pemberdaya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi

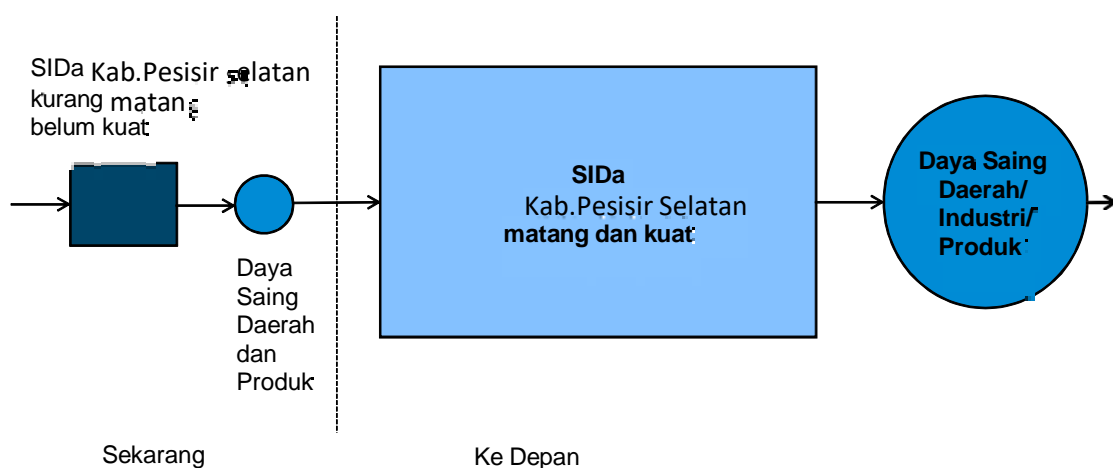
para IKM, serta sebagai pengadopsi produk atau proses inovatif. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan Industri Besar dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI

Untuk menciptakan sebuah daerah yang mampu membangun dan memiliki daya saing, maka harus didukung dengan iklim ilmiah untuk terus menghasilkan produk yang inovatif, dan bersedia saling bersinergi untuk mengembangkan kegiatan riset bersama yang mampu mengakumulasi seluruh potensi menjadi lebih baik dan berdaya saing. Interaksi antar aktor dalam pembangunan merupakan manajemen multi stakeholders yang digambarkan dalam sebuah sistem yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam jangka pendek dan menengah.

Secara umum, kondisi SIDa Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai secara holistik, sistematis dan serentak adalah sistem inovasi yang mampu menaikkan daya saing daerah yang signifikan. Gambar 3.1 memperlihatkan peningkatan daya saing daerah dan sistem inovasi daerah dari kondisi saat ini (2021) ke kondisi ke depan (2025) yang akan dicapai.



Gambar 3.1 Peningkatan daya saing daerah dan sistem inovasi daerah dari kondisi saat ini ke kondisi ke depan yang akan dicapai

3.1 RPJMD Kab.Pesisir Selatan Mengadopsi *Roadmap* Penguatan SIDA

Kondisi SIDA seperti tersebut di atas dapat tercapai apabila pemerintah daerah dan para *stakeholder* telah mengimplementasikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah, RPJMD telah mengadopsi *Roadmap* Penguatan SIDA dan RKPD telah mengadopsi Rencana Aksi SIDA
2. Bagi para *stakeholder*, telah memiliki program, kegiatan dan anggaran yang mendukung Rencana Aksi SIDA. Para *stakeholder* disini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Untuk merealisasikan ini, sebelumnya telah terdapat kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan tema SIDA .

Kondisi SIDA yang akan dicapai di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Sistem Inovasi yang matang atau *Mature*, *SIDA yang Kuat serta Adanya Fokus produk prioritas SIDA* seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3.2. Model Pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Kab.Pesisir Selatan

3.2 Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang kuat dan matang

SIDA yang berjalan efektif dan unggul, pada akhirnya, akan mampu meningkatkan daya saing produk, daya saing bisnis, dan daya saing daerah. Daya saing produk dan bisnis ditandai dengan tingginya nilai tambah dan kapasitas produksi produk-produk inovasinya.

Untuk lebih fokus dan lebih efektif, SIDA harus telah memiliki beberapa komoditas dan/atau produk unggulan sebagai fokus inovasi yang akan diimplementasikan untuk dinaikkan nilai tambah dan produktifitasnya. Jenis-jenis komoditas dan produk daerah yang berpeluang ditingkatkan nilai tambah dan kapasitas produksinya. Untuk mengawali operasional SIDA, ditentukan komoditas dan/atau produk unggulan yang akan dikembangkan dan diinovasikan.

Inovasi merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan selama 5 tahun mengalami peningkatan. Inovasi diarahkan pada 4 pilar yakni sektor pertanian (gambir), sector perikanan (sentra olahan produk perikanan, Pariwisata/pengembangan UMKM serta peternakan.

Strategi efektif untuk peningkatan daya saing ke 4 pilar tersebut adalah melalui kolaborasi antar actor pembangunan. Prospek kolaborasi yang dapat dilakukan guna menunjang penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan melibatkan universitas/ perguruan tinggi, masyarakat, dan industri. Selain itu, keterlibatan pemerintah, lembaga kelitbangan, investor, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/akademisi merupakan hal pendukung yang harus dibangun atau digerakkan oleh pemerintah daerah. Komponen tersebut kemudian melakukan evaluasi kerangka regulasi untuk mendorong kolaborasi bersama dalam pembuatan kebijakan insentif (sistem maupun nominal) serta peningkatan jiwa kewirausahaan. Inovasi tidak dapat berjalan secara parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Penguatan SIDA diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam target eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Proses pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini masih cenderung digerakkan oleh besaran faktor-faktor ekonomi. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan sangat banyak, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan daya saing dan kompetensi pengelolaan potensi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan upaya transformasi secara sistemik. Melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diharapkan dapat menggeser paradigma pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar digerakkan oleh proses yang semakin efisien dengan memanfaatkan Iptek. Pada kondisi tersebut, faktor inovasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dan kualitas proses dan hasil pembangunan. Berpangkal pada argumentasi kebutuhan transformasi dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di atas, maka perlu disusun strategi sekaligus peta rencana atau Roadmap SIDa yang sinergis dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini akan diuraikan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai dengan penguatan SIDa yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam jangka pendek dan menengah. Secara umum, kondisi SIDa Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dicapai secara holistik, sistematis dan serentak adalah sistem inovasi yang mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan yang signifikan

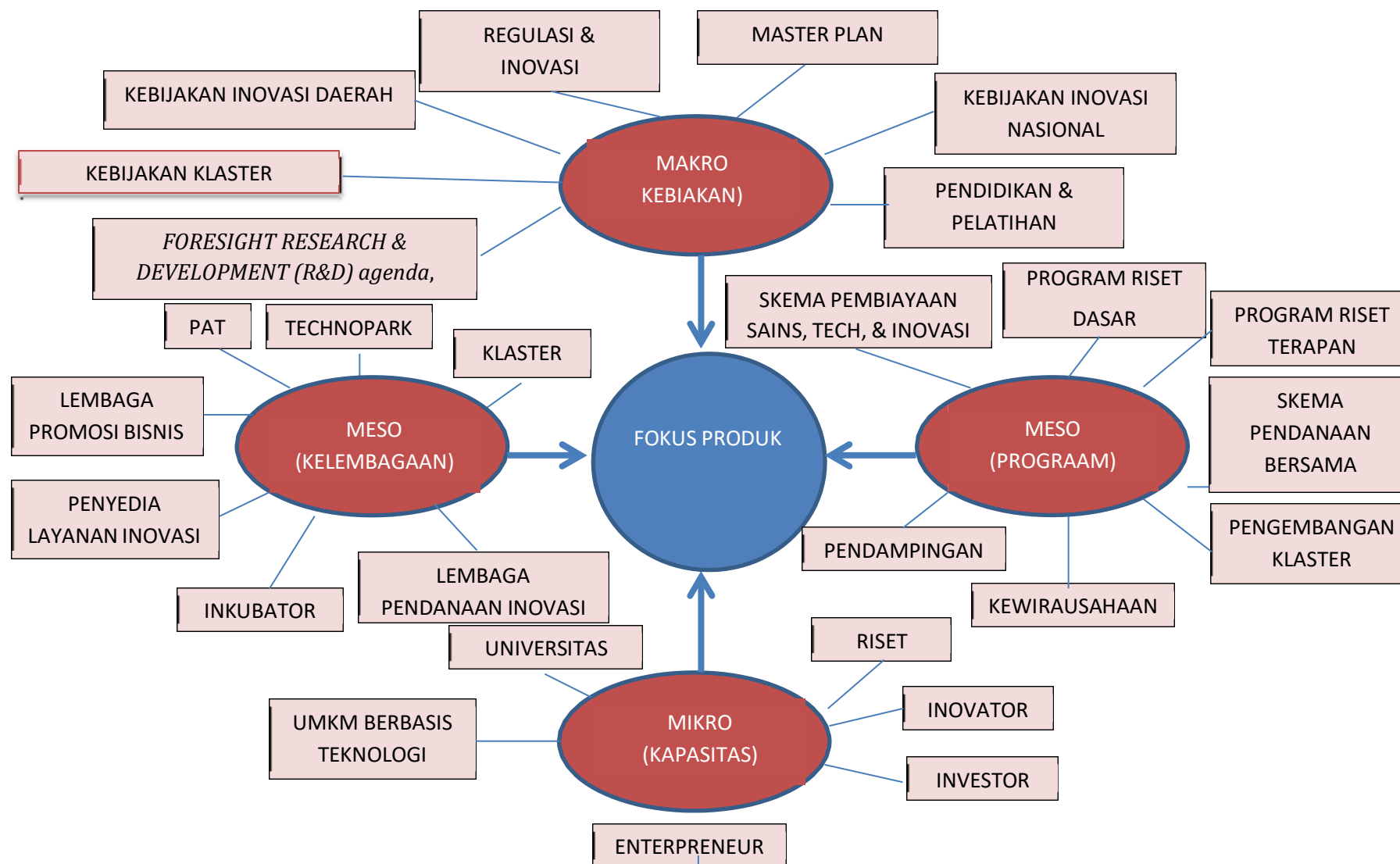
Tabel 3.1 Kondisi Kekuatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Yang Akan Dicapai (2025)

No.	Aspek Kekuatan SIDa	Belum Ada	Ada	Terimplementasi	Efektif	Unggul
1.	Komitmen dan Kebijakan Khusus SIDa di RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan serta Tim Koordinasi Penguatan SIDa		√	√	√	√
2.	Roadmap Penguatan dan Rencana Aksi Daerah SIDa Kabupaten Pesisir Selatan serta fokus produk unggulan		√	√	√	√
3.	MoU kerjasama SIDa dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, Perguruan Tinggi, Balai Riset dan Dunia Usaha		√	√	√	√
4.	RPJMD berdasarkan Roadmap Penguatan SIDa sesuai Peraturan Bersama Mendagri dan		√	√	√	√

No.	Aspek Kekuatan SIDA	Belum Ada	Ada	Terimplementasi	Efektif	Unggul
	Menristek Nomor 03 dan 36 Tahun 2012					
5.	RKPD berdasarkan Rencana Aksi SIDA sesuai Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek Nomor 03 dan 36 Tahun 2012		√	√	√	√
6.	Sisnronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar dan Nasional		√	√	√	√
7.	Penataan unsur-unsur SIDA melalui (a) Kelembagaan (lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya, (b) Jaringan (komunikasi antar lembaga, mobilisasi SDM, dan optimalisasi IPTEK), dan (c) Sumber daya (Kepakaran, kekayaan intelektual, dan informasi, dan sarpras IPTEK)		√	√	√	√
8.	Pelaksanaan SIDA (tim koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan pelaporan)		√	√	√	√
9.	Pengembangan SIDA (tahapan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan pemberlanjutan penguatan SIDA)		√	√	√	√

Kondisi SIDA yang matang

Kondisi SIDA yang akan dicapai untuk jangka panjang di kabupaten Pesisir Selatan dikelompokkan ke dalam tiga level (makro, meso, dan mikro) dan terdiri dari 30 determinan. Gambar 3.3 berikut memperlihatkan determinan tataran makro, meso, dan mikro yang harus dimiliki, berjalan efektif, dan bahkan unggul/optimal pada Sistem Inovasi Daerah di Kab. Pesisir Selatan.



Gambar. 3.3 Model Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Ideal

Level makro SIDA bersifat global dan menopang komitmen dan arah sistem inovasi. Level ini merupakan kebijakan, rencana induk dan regulasi penopang inovasi dan terdiri dari 7 determinan yaitu kebijakan inovasi nasional, kebijakan inovasi daerah, *masterplan*, pelatihan dan pendidikan, *foresight research & development (R&D) agenda*, kebijakan klaster dan regulasi ramah inovasi.

Level meso SIDA berada pada tataran menengah sebagai pendukung sistem dan terdiri dari dua bagian yaitu dukungan kelembagaan inovasi dan dukungan program (dan anggaran) inovasi. Bagian kelembagaan terdiri dari 7 determinan yaitu Pusat Alih Teknologi, *Technopark*, Inkubator-inkubator, Klaster-klaster, Lembaga Promosi Bisnis, Penyedia Layanan Inovasi, dan Lembaga Pendanaan Inovasi. Sementara, bagian program terdiri dari 8 determinan yaitu Skema Pembiayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI), Program Riset Dasar, Program Riset Terapan, Skema Pendanaan Bersama, Upaya Pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI), Dukungan Kewirausahaan, Program Pengembangan Klaster, dan Fasilitasi Internasional.

Level mikro SIDA bersifat teknis dengan berbagai pelaksana langsung sistem inovasi. Level ini merupakan kapasitas inovasi dan terdiri dari 8 determinan yaitu Universitas, Balai Riset Dasar, Balai Riset Swasta, Inovator-inovator, Investor Swasta, Wirausahawan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Industri Besar.

Determinan-determinan SIDA yang berjalan efektif dan unggul, pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing produk, daya saing bisnis/industri, dan daya saing daerah. Berikut uraian ringkas masing-masing determinan untuk setiap levelnya.

Tabel 3.2 Peningkatan Kematangan SIDA, Sasaran dan Kondisi yang Akan Dicapai untuk jangka panjang

No.	Peningkatan Kematangan SIDA	Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai
1.	Level Makro (Kebijakan Inovasi)	1. Produk Kebijakan yang terkait SIDA 2. Tersedianya Master plan penguatan SIDA 3. Pendidikan dan Pelatihan	1. Terimplementasinya produk kebijakan SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Tersusunnya masterplan pengembangan industri pariwisata, industri

No.	Peningkatan Kematangan SIDA	Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai
		4. Kebijakan Klaster 5. Regulasi Inovasi	pengolahan ikan dan pengembangan sapi pesisir 3. Terimplementasinya kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha di Kabupaten Pesisir Selatan 4. Terimplementasinya kebijakan klaster inovasi 5. Tersusunnya regulasi yang pro inovasi
2.	Level Meso (Penguatan Kelembagaan Inovasi)	1. Tersedianya kelembagaan Pusat Alih Teknologi 2. Tersedianya kelembagaan Technopark 3. Tersedianya kelembagaan Inkubator 4. Tersedianya kelembagaan Klaster 5. Tersedianya lembaga Promosi Bisnis 6. Tersedianya lembaga penyelia layanan inovasi 7. Tersedianya lembaga pendanaan inovasi	1. Terbentuknya kelembagaan Pusat Alih Teknologi 2. Terbentuknya kelembagaan Technopark 3. Terbentuknya kelembagaan Inkubator 4. Terbentuknya kelembagaan Klaster 5. Terbentuknya lembaga promosi bisnis 6. Terbentuknya lembaga penyedia layanan inovasi 7. Terbentuknya lembaga pendanaan inovasi
3.	Level Meso (peningkatan Program Inovasi)	1. Tersedianya Skema Pembiayaan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi) 2. Tersedianya Program Riset Dasar 3. Tersedianya Program Riset Terapan 4. Tersedianya Skema Pendanaan Bersama 5. Tersedianya Upaya Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi)	9. Terimplementasinya Skema Pembiayaan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi) 1. 2. Terimplementasinya Program Riset Dasar 3. Terimplementasinya Program Riset Terapan 4. Terimplementasinya Skema Pendanaan Bersama 10. Terimplementasinya Upaya Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi) 5.

No.	Peningkatan Kematangan SIDA	Sasaran	Kondisi yang Akan Dicapai
		6. Tersedianya Dukungan Kewirausahaan 7. Tersedianya Program Pengembangan Klaster 8. Tersedianya Fasilitas Internasional	6. Terimplementasinya Dukungan Kewirausahaan 7. Terimplementasinya Program Pengembangan Klaster 8. Terimplementasinya Fasilitas Internasional
4.	Level Mikro (peningkatan Kapasitas Inovasi)	1. Universitas 2. Institusi Riset Dasar 3. Institusi Riset Terapan 4. Inovator-inovator 5. Investor Swasta 6. Wirausahawan 7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 8. Industri Besar	1. Adanya MoU dengan Universitas 2. Terimplementasi Institusi Riset Dasar dan Terapan 3. Tersedianya Inovator-inovator 4. Tersedianya Investor Swasta 5. Tumbuhnya Wirausahawan 6. Tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 7. Berperannya Industri Besar

Dari kondisi SIDA di daerah ini yang belum ada, hendaknya dapat melengkapi agar system inovasi daerah lebih matang dan berkelanjutan. Untuk itu, berdasarkan hasil diskusi dengan tim ahli dan tim penyusun roadmad SIDA kabupaten Pesisir Selatan, maka disepakati kerangka kerja penguatan system inovasi daerah di Pesisir Selatan meliputi level makro berupa terimplementasinya kebijakan dan regulasi inovasi, level meso berupa terimplementasinya kelembagaan inovasi berupa klaster inovasi, lembaga pendanaan inovasi dan program upaya pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI), program dukungan kewirausahaan serta program pengembangan klaster, level mikro berupa terimplementasinya kerjasama dengan universitas dan lembaga kelitbangan, investor, wirausaha dan industry besar. Kondisi SIDA yang hendak dicapai untuk periode 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2 Kondisi SIDA yang hendak dicapai untuk periode 5 tahun kedepan di Kabupaten Pesisir Selatan

SISTEM INOVASI DAERAH KAB.PESISIR SELATAN			
Tataran (Level)			
Makro	Meso		Mikro
Kebijakan dan Regulasi Inovasi	Kelembagaan Inovasi	Program Pelaksanaan Inovasi	Kapasitas Inovasi
1. Produk kebijakan terkait SIDA 2. <i>Master Plan/Roadmap</i> SIDA 3. Pelatihan dan Pendidikan 4. <i>Foresight R&D Agenda</i> 5. Kebijakan Klaster 6. Regulasi Pro Inovasi	1. Terbentuknya atau terimplementasinya fungsi inkubator bisnis 2. Terimplementasinya Klaster Inovasi produk unggulan dan prioritas daerah sebagai lembaga Pendorong Interaksi Aktor Inovasi (lembaga intermediasi atau konsorsium) 3. Lembaga Lembaga Pendorong Pembiayaan Inovasi (Perbankan, Investor, Pengusaha)	1. Tersedianya program tentang Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi) 2. Dukungan Kewirausahaan 3. Program Pengembangan Klaster	1. Universitas 2. Lembaga kelitbangan pemerintah 3. Investor Swasta 4. Wirausahawan 5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 6. Industri Besar

Kondisi ideal dari kematangan system inovasi daerah yang diharapkan adalah terimplementasinya semua determinan pada masing level (kebijakan, kelembagaan dan program serta kapasitas inovasi) dalam jangka panjang, namun dengan keterbatasan sumber daya di daerah, maka untuk pembentukan kelembagaan pada kurun waktu 5 tahun ini (jangka menengah), telah disepakati bahwa akan direncanakan ***pembentukan klaster inovasi sebagai lembaga pendorong interaksi antar actor inovasi berupa Konsorsium SIDA atau Tim Koordinasi SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan***. Dasar pemilihan klaster didasari pada penilaian nilai indek upaya (effort) dan indek nilai

dampak (impact) oleh team ahli penyusunan roadmap SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan. Memilih program pembentukan klaster inovasi di daerah dihadapkan pada upaya yang kecil tetapi memiliki dampak yang besar. Sedangkan untuk kebijakan dan semua determinan mesti disiapkan.

Klaster inovasi merupakan Lembaga Pendorong Interaksi Aktor Inovasi yang dapat dilakukan dengan Konsorsium atau Adanya Tim Koordinasi SIDA.

Konsorsium adalah sebuah asosiasi dari dua atau lebih individu, organisasi atau pemerintah (atau kombinasi dari entitas tersebut) yang bersepakat dan berkomitmen dalam suatu kegiatan serta secara bersama-sama memberdayakan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama

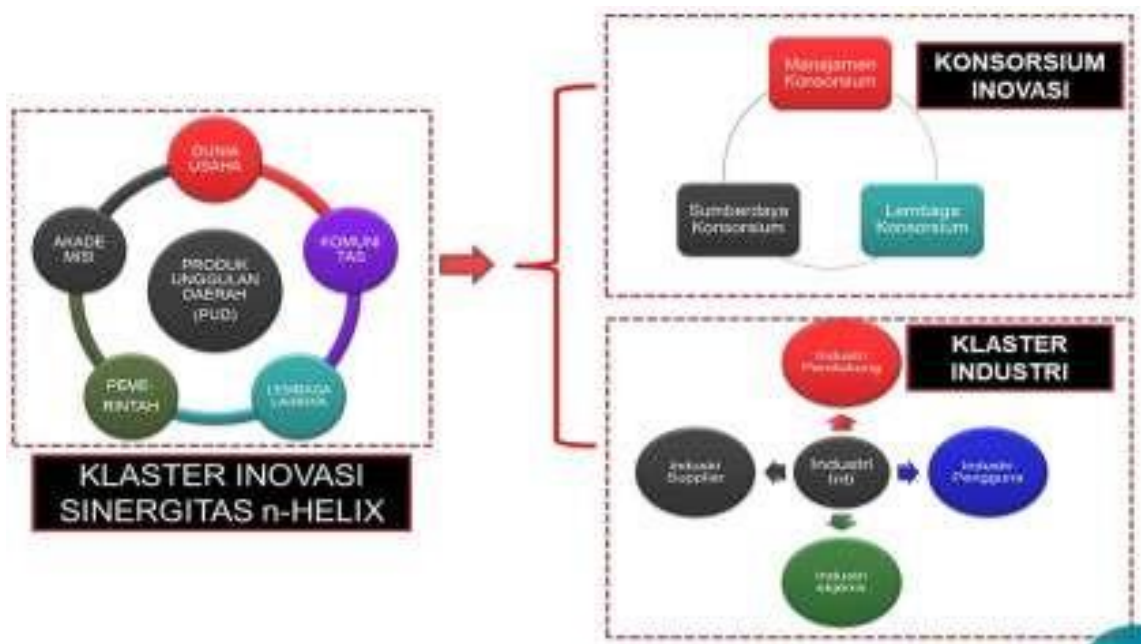
Klaster inovasi merupakan kumpulan yang terdiri dari pemula inovatif (kecil, menengah dan besar), lembaga riset dan institusi lainnya yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu dan beroperasi pada sektor dan regional yang sama dan didisain untuk meningkatkan aktivitas inovasi dengan mendorong interaksi secara intensif, sharing fasilitas dan pertukaran pengetahuan dan berkontribusi secara efektif dalam proses alih teknologi, jejaring dan penyebaran informasi.

Tujuan umum dari pengembangan klaster inovasi adalah:

1. Meningkatkan interaksi dan kerjasama antara kelompok bisnis, institusi pengetahuan dan aktor-aktor pengembangan
2. Meningkatkan kapasitas inovasi melalui kerjasama riset dan pengembangan atau penyedia pengetahuan
3. Meningkatkan akses klaster kepada para ahli/keahlian yang relevan
4. Membangun sebuah lingkungan yang mendorong pengembangan dan penerapan pengetahuan sebagai landasan untuk kewirausahaan, investasi dan inovasi

Pendekatan Klaster Inovasi dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi sebagai salah satu elemen yang mempunyai peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Perguruan tinggi dapat

menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri (dunia usaha) dan masyarakat di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Sehingga harapan masyarakat yang menginginkan perguruan tinggi menjadi agent of region economic development dapat terwujud. Klaster inovasi dengan n Helix dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Klaster Inovasi sinergisitas n Helix dengan Konsorsium Inovasi

3.2 Fokus SIDA Untuk Meningkatkan Jumlah Produk dan Nilai Tambah di Kabupaten Pesisir Selatan

SIDA yang berjalan efektif dan unggul, pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing produk, daya saing bisnis dan daya saing daerah. Daya saing produk dan bisnis ditandai dengan tingginya nilai tambah dan kapasitas produk-produk inovasinya. Untuk lebih fokus dan lebih efektif SIDA Kabupaten Pesisir Selatan harus telah memiliki beberapa komoditas dan/atau produk unggulan sebagai fokus inovasi yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktifitasnya. Jenis-jenis komoditas dan produk Kabupaten Pesisir Selatan yang berpeluang ditingkatkan nilai tambah dan kapasitas produksinya adalah jagung, durian, kopi, integrasi sapi dan sawit,

padi, gambir, karet dan ikan disektor perikanan. Namun yang akan di prioritasi dalam penguatan SIDA ini adalah gambir, olahan perikanan Pariwisata dan peternakan.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan perkembangan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Secara umum salah satu metode yang cukup baik dan sering digunakan adalah analisis Tipologi Klasen yaitu mengelompokkan suatu sektor, sub sektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (nasional) yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya ditingkat yang lebih tinggi (daerah acuan atau nasional).

Analisis Tipologi Klasen dengan pendekatan ekonomi secara sektoral dapat diklasifikasikan atas 4 sektor yaitu:

1. *Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I)*

Sektor pada kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju PDRB (g_i) lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Sektor dalam kuadran ini dapat diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar dari pada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2. *Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II)*

Sektor pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara

nasional (s). Sektor dalam kuadran ini dapat diartikan sebagai sektor yang telah jenuh.

3. *Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat* (Kuadran III)

Sektor pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Sektor dalam kuadran ini dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming, meskipun pangsa pasar daerahnya relatif kecil dibandingkan rata-rata nasional.

4. *Sektor relatif tertinggal* (Kuadran III)

Sektor pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB yang menjadi acuan atau secara nasional (g), dan sekaligus memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Sektor dalam kuadran ini dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming, meskipun pangsa pasar daerahnya relatif kecil dibandingkan rata-rata nasional.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metoda Tipologi Klasen terlihat bahwa sektor ekonomi/lapangan usaha yang tergolong ke dalam

- ***sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Pesisir Selatan:***
 - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - Konstruksi
 - Informasi dan Komunikasi
- ***sektor yang maju tapi tertekan***
 - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
- ***sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat***
 - Industri Pengolahan
 - Pengadaan Listrik dan Gas
 - Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 - Transportasi dan Pergudangan
 - Jasa Perusahaan

- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya
- *sektor yang relatif tertinggal*
 - Pertambangan dan Penggalan
 - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - Jasa Keuangan dan Asuransi
 - Real Estate
 - Jasa Pendidikan

Berdasarkan hasil identifikasi klasen tipologi diatas, maka hasil ini menunjukkan bahwa fokus SIDA di Pesisir Selatan yang sudah disepakati adalah termasuk sector yang maju dan tumbuh pesat serta sector yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Fokus SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Fokus SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan empat fokus produk potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan (Gambir, perikanan, pariwisata dan peternakan), maka perguruan tinggi dapat menjadi *change maker* melalui aktivitas akademik dan penelitian yang bersifat solutif untuk kemajuan masyarakat dan pelaku usaha di Pesisir Selatan. Hal ini merupakan tahapan awal untuk mendukung penguatan SIDA di suatu wilayah. Dengan kata lain, keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah merupakan klausul mutlak yang harus diinternalisasikan melalui manajemen kolaboratif yang tepat

BAB IV

RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pembangunan SIDA terdiri atas beberapa pelaku mulai dari pemerintah daerah sampai pada masyarakat. Keseluruhan pelaku akan terintegrasi dengan elemen utama adalah sumber daya, kelembagaan dan perkembangan jaringan.

Untuk Pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk unggulan/prioritas daerah Kab.Pesisir Selatan, maka tahap awal yang harus di ciptakan sebuah sistem inovasi

Pembangunan sistem inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dilakukan, hanya saja keseluruhan proses **belum tersistem**. Pendekatan yang lazim digunakan untuk mengakomodir proses analisis SIDA adalah ANIS (Analysis of National Innovation System). Pendekatan ANIS merupakan aktualisasi kontekstual terhadap beberapa indikator dan variabel yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam tiga level inovasi, yaitu; level makro (*policy*), level meso (*support*), dan level mikro (*capacity building*).

a. Level Makro

Level makro erat kaitannya dengan tingkat inovasi di ranah kebijakan.

Artinya, kondisi kerangka kerja pemerintahan yang tertuang dalam peraturan dan kebijakan akan mempengaruhi iklim inovasi.

b. Level Meso

Level ini merupakan manifestasi dari kontribusi lembaga atau SKPD di suatu daerah dalam mendukung program inovasi. Dukungan dari lembaga inovasi terhadap program inovasi yang dicanangkan merupakan kalusul penting penguatan SIDA dapat direalisasikan dengan baik.

c. Level Mikro

Meskipun memiliki ruang lingkup kecil, level ini menitikberatkan pada variabel inovasi di tengah-tengah masyarakat, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan (universitas, lembaga penelitian, perusahaan, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan). Dengan demikian, dukungan pada level ini dapat dikatakan sebagai modal utama terciptanya kematangan SIDA.

Pada dokumen Roadmap SIDA Kabupaten Pesisir Selatan (2022) sudah dijelaskan arah penguatan SIDA dan rencana aksi umum untuk komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan SIDA di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini fokus pada pengembangan Pariwisata, produk olahan perikanan, Gambir dan Peternakan.. Walaupun Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2022 – 2026 telah disusun pada tahun 2022, namun perlu identifikasi bagaimana mengoperasionalkan rencana aksi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan rencana aksi detail Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat diimplementasikan oleh para stakeholder pada jadwal yang sistematis mulai tahun 2023 sampai dengan 2027. Untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, maka terlebih dahulu dibangun sistem inovasinya. Oleh sebab itu pada bab ini akan dijelaskan secara rinci rencana aksi detail sistem inovasi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1 RENCANA AKSI (UMUM)PENINGKATAN KEMATANGAN SIDA PADA LEVEL MAKRO

Disini dikemukakan rencana aksi detail SIDA yang bertujuan untuk meningkatkan kematangan (*maturity*) SIDA Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan *Roadmap* dan Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan, disini ditampilkan kembali rencana aksi umum Penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan 2022 – 2026 yang terdiri dari berbagai program, kegiatan, jadwal dan pelaksana kegiatan untuk program Peningkatan kematangan SIDA Pesisir Selatan berdasarkan ANIS (*Analytical of National Innovation System*).

Insitusi pelaksana rencana aksi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD

Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai perguruan tinggi (PT) atau universitas, berbagai lembaga/balai penelitian, dan dunia usaha yang terdiri dari pengusaha, industri, KADIN, bank, lembaga keuangan, dan lainnya.

Rencana Aksi ini berisi program dan beberapa kegiatan umum serta tahun, para mitra pelaksana, *output* dan *outcome*-nya. Tabel 4.1 memperlihatkan keseluruhan matriks Rencana Aksi Umum Peningkatan Kematangan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, tujuan peningkatan kematangan SIDA level makro adalah untuk memfokuskan implementasi kebijakan, *masterplan*, dan regulasi ramah inovasi yang mendukung im. Tabel 4.1 memperlihatkan Rencana Aksi Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro yaitu level kebijakan, masterplan, dan regulasi pro inovasi dengan program-program sebagai berikut:

1. **Implementasi Kebijakan Inovasi Nasional**
2. **Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah**
3. **Implementasi *Master Plan* (rencana induk)**
4. **Implementasi Pelatihan dan Pendidikan**
5. **Implementasi *Foresight R&D Agenda* (agenda libang ke depan)**
6. **Implementasi Kebijakan Klaster**
7. **Implementasi Regulasi Ramah Inovasi**
8. **Pelaporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro**

Tabel 4.1 Matriks Rencana Aksi Umum Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro

A.		Kebijakan: Peningkatan Kematangan Level Makro (Kebijakan, <i>Planning</i> , dan Regulasi Ramah Inovasi)				
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
		1.	Implementasi Kebijakan Inovasi Nasional	a. Kajian dan adopsi kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	SIDA Kabupaten Pesisir Selatan berbasis kebijakan inovasi nasional	Terimple-mentasinya Kebijakan Inovasi Nasional di dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Sosialisasi kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana	
		2.	Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah	a. Penyusunan kebijakan inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen kebijakan inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya Kebijakan Inovasi Daerah di dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Sosialisasi kebijakan inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
				c. Pencantuman Kebijakan Inovasi Daerah dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Tercantum dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	
		3.	Implementasi <i>Master Plan</i> (rencana induk)	a. Penyusunan <i>Master Plan</i> sistem inovasi industri produk unggulan	Dokumen <i>master plan</i> sistem inovasi industri produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya <i>Master Plan</i> sistem inovasi industri produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Sosialisasi master plan sistem inovasi industry	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		4.	Implementasi Pelatihan dan Pendidikan	a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	Dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	Terimple-mentasinya kurikulum Pelatihan dan Pendidikan bermuatan inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Sosialisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	
		5.	Implementasi <i>Foresight R&D</i>	a. Penyusunan Jakstrada Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen Jakstrada Kabupaten Pesisir Selatan	

A. Kebijakan: Peningkatan Kematangan Level Makro (Kebijakan, <i>Planning</i> , dan Regulasi Ramah Inovasi)					
	No.	PROGRAM	KEGIATAN	Output	Outcome
		<i>Agenda</i> (agenda libang ke depan)	b. Sosialisasi Jakstrada Kabupaten Pesisir Selatan	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya <i>Foresight R&D Agenda</i> Kabupaten Pesisir Selatan
	6.	Implementasi Kebijakan Klaster	a. Penyusunan kebijakan klaster industri Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen kebijakan klaster industri Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya Kebijakan Klaster industri Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Sosialisasi kebijakan klaster industri Kabupaten Pesisir Selatan	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
	7.	Implementasi Regulasi Ramah Inovasi	a. Kajian dan revisi regulasi ramah inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen revisi regulasi ramah inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya Regulasi Ramah Inovasi untuk mendukung SIDA dan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Sosialisasi revisi regulasi ramah inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
	8.	Pelaporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro	Penyusunan laporan sosialisasi kebijakan, <i>planning</i> , dan regulasi ramah inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan sosialisasi kebijakan, <i>planning</i> , dan regulasi ramah inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro untuk tahun berikutnya

Berikut akan dijabarkan rencana aksi detail untuk masing-masing program pada level makro (level kebijakan) , level meso (kelembagaan dan program) dan level mikro (Kapasitas Inovasi).

4.2. RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SISTEM INOVASI DAERAH PADA LEVEL MAKRO

Rencana Aksi Detail ini berisi program dan masing-masing kegiatan beserta tahun, para mitra pelaksana, *output* dan *outcome*-nya. Tabel 4.2, dan 4.3 memperlihatkan keseluruhan matriks Rencana Aksi Detail Peningkatan Kematangan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

Tahapan aksi detail pada SIDA level makro umumnya sebagai berikut:

- 1. Pembentukan kelompok kerja (pokja) penyusunan kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 3. Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) kebijakan, masterplan, atau regulasi**
- 4. Pelaporan hasil penyusunan kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 5. Penerbitan Perda atau Perwako tentang kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 6. Sosialisasi stakeholder kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 7. Implementasi kebijakan, masterplan, atau regulasi,**
- 8. Monitoring dan evaluasi implementasi dan hasil kebijakan, masterplan, atau regulasi.**

4.2.1 Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Nasional

Tabel 4.2 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Nasional untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro. Pada tabel rencana aksi detail, tercantum siapa penanggung jawab setiap kegiatan. Kegiatan-kegiatan untuk implementasi kebijakan inovasi nasional ini:

- a. Kajian kebijakan inovasi nasional untuk penguatan (*strengthening*) SIDA Kabupaten Pesisir Selatan yang terdapat di dalam dokumen:
 - RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),
 - Renstra (Rencana Strategis) kementerian/lembaga/ perguruan tinggi, dan
 - *Trend* dunia usaha regional, nasional dan global.

- b. FGD (*Focus Group Discussion*) penajaman perumusan kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Pelaporan kegiatan kajian kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Adopsi kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Sosialisasi kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para *stakeholders*
- f. Monitoring dan evaluasi penggunaan kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.2

Matriks Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Nasional

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang- gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha			
1.	Kebijakan Inovasi Nasional	a. Kajian kebijakan inovasi nasional (RPJMN dan Renstra kementerian/ lembaga, perguruan tinggi dan <i>trend</i> dunia usaha global) untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bappe da	Teridentifikasinya kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Terimplementasinya kebijakan inovasi nasional pada daerah kabupaten Pesisir Selatan
		b. FGD penajaman perumusan kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bappe da	Disepakatinya kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		c. Pelaporan kegiatan kajian kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Implementasi Pesisir Selatan												Bappe da	Laporan kajian kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		d. Adopsi kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bappe da	Dipakainya kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		e. Sosialisasi kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para <i>stakeholders</i> internal dan eksternal												Bappe da	Dipahaminya kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan oleh para <i>stakeholders</i> internal dan eksternal	
		f. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bappe da	Laporan monev implementasi kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	

4.2.2 Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Daerah

Tabel 4.3 menunjukkan Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Daerah untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a. Kajian kebijakan inovasi daerah provinsi Sumbar, provinsi-provinsi tetangga (Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) dan Kabupaten Pesisir Selatan (RPJMD dan Renstra OPD) dan *trend* dunia usaha lokal,
- b. FGD penajaman perumusan kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan,
- c. Laporan akhir kajian kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan,
- d. Adopsi kebijakan inovasi daerah untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan,
- e. Sosialisasi kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para *stakeholders*,
- f. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan inovasi daerah untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.3 Matriks Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Daerah

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang-gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha			
2.	Implementasi Kebijakan Inovasi Daerah	a. Kajian kebijakan inovasi daerah provinsi Sumbar, provinsi-provinsi tetangga dan Kabupaten Pesisir Selatan (melalui RPJMD dan Renstra OPD) dan <i>trend</i> dunia usaha lokal dan regional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda	Teridentifikasinya kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya Kebijakan Inovasi Nasional di dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
		b. FGD perumusan kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda	Disepakatinya kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		c. Laporan akhir kajian kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda	Laporan kajian kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		d. Adopsi kebijakan inovasi daerah untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda	Dipakainya kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
		e. Sosialisasi kebijakan inovasi daerah untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para <i>stakeholders</i>												Bapedda	Kegiatan sosialisasi kebijakan inovasi nasional untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para <i>stakeholders</i>	
		f. Pencantuman Kebijakan Inovasi Daerah dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda	Tercantumnya Kebijakan Inovasi Daerah dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang-gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usah			
		g. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan inovasi daerah untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Bapedda Kabupaten	Laporan monev penggunaan kebijakan inovasi nasional untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	

4.2.3 Rencana Aksi Detail *Master Plan* (Rencana Induk)

Tabel 4.4 menunjukkan Rencana Aksi Detail *Master Plan* (Rencana Induk) untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan utama, sebagai berikut:

- a. RPJPD, RPJMD, RTRW, dan RTDR
- b. Roadmap Penguatan dan Rencana Aksi SIDA
- c. Rencana Pengembangan Klaster Industri Produk unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Grand design sentra IKM Olahan Perikanan
- e. Grand design Pariwisata
- f. Grand design sentra IKM Olahan Gambir
- g. Grand design kawasan peternakan
- h. Masterplan Transportasi Kabupaten Pesisir Selatan
- i. Masterplan infrastruktur listrik dan BBM/BBG
- j. Masterplan infrastruktur Air Bersih
- k. Monitoring dan evaluasi keberadaan dan relevansi berbagai masterplan untuk penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.4
Matriks Rencana Aksi Detail **Master Plan (Rencana Induk)**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Penang- gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit			
3.	Implementasi Penyusunan <i>Master Plan</i> (rencana induk)	a. Penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, RTDR, Renstra OPD											Bappeda dan OPD	Dokumen RPJPD, RPJMD, RTRW, RTDR, Renstra OPD	Tersedianya dan digunakannya berbagai <i>masterplan</i> sistem inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Penyusunan <i>Roadmap</i> Penguatan dan Rencana Aksi SIDA											Bappeda	Dokumen <i>Roadmap</i> Penguatan dan Rencana Aksi SIDA	
		c. Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Pesisir Selatan											Dinas Perindustrian	Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Pesisir Selatan	
		d. Penyusunan <i>Grand design</i> sentra IKM Olahan Perikanan											Dinas pertanian/perikanan	Dokumen <i>Grand design</i> sentra IKM Olahan Perikanan	
		e. Penyusunan <i>Grand design</i> kawasan pariwisata											Dinas Pariwisata	Dokumen <i>Grand design</i> kawasan pariwisata	
		f. Penyusunan <i>Grand design</i> sentra IKM Olahan Gambir											Dinas pertanian	Dokumen <i>Grand design</i> sentra IKM Olahan Gambir	
		g. Penyusunan <i>Grand design</i> kawasan peternakan sapi											Dinas Pertanian	Dokumen <i>Grand design</i> kawasan peternakan sapi	
		h. Penyusunan <i>Masterplan</i> Transportasi Kabupaten Pesisir Selatan											Dishub	Dokumen <i>Masterplan</i> Transportasi Kabupaten Pesisir Selatan	
		i. Penyusunan <i>Masterplan</i> infrastruktur listrik dan BBM/BBG											Dinas ESDM	Dokumen <i>Masterplan</i> infrastruktur listrik dan BBM/BBG	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Penang-gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Pengusaha		
		j. Penyusunan <i>Masterplan</i> infrastruktur Air Bersih											Dinas PU dan PDAM	Dokumen <i>Masterplan</i> infrastruktur Air Bersih	
		k. Penyusunan <i>masterplan</i> penting lainnya											OPD terkait	Dokumen <i>masterplan</i> penting lainnya	
		l. Monitoring dan evaluasi keberadaan dan relevansi berbagai <i>masterplan</i> untuk penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.											Bappeda	Terkelolanya berbagai <i>masterplan</i> untuk penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.	
		m. Sosialisasi berbagai <i>masterplan</i> sistem inovasi											Bappeda	Tersosialisasinya <i>masterplan</i> ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	

4.2.4 Rencana Aksi Detail Pelatihan dan Pendidikan

Tabel 4.5 menunjukkan Rencana Aksi Detail Pendidikan dan Pelatihan untuk kompetensi inovasi produk unggulan/prioritas daerah sebagai upaya peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pembentukan kelompok kerja dan persiapan penyusunan kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal
- b. Penyusunan kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal
- c. Penyusunan Perda/Perbup terkait kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal
- d. Laporan akhir kajian penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan inovasi produk dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan,
- e. Sosialisasi kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk SIDA Kabupaten Pesisir Selatan kepada para *stakeholders*,
- f. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 4.5 Matriks Rencana Aksi Detail Kebijakan **Pelatihan dan Pendidikan**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Penang-gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pusat Pem.	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit			
4.	Implementasi Pelatihan dan Pendidikan (kurikulum & silabus pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal di balai-balai latihan kerja dan sekolah-sekolah menengah kejuruan)	a. Pembentukan kelompok kerja dan persiapan penyusunan kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal											Dinas Pendidikan	Dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	Terimple-mentasinya kurikulum Pelatihan dan Pendidikan bermuatan produk inovasi unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Penyusunan kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal											Dinas Pendidikan	kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	
		c. FGD kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal											Dinas Pendidikan	kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	
		d. Pelaporan hasil penyusunan kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal											Dinas Pendidikan	Dokumen kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi inovasi	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang- gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha			
		e. Harmonisasi kebijakan kurikulum & silabus pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal												Dinas Pendidikan	Kebijakan kurikulum & silabus pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal	
		f. Penyusunan Perda terkait kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal												Dinas Pendidikan	Perda terkait kurikulum & silabus pelatihan/pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal	
		g. Sosialisasi kurikulum & silabus pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal												Dinas Pendidikan		
		h. Persiapan dan implementasi kurikulum & silabus pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal												Dinas Pendidikan		
		i. Monitoring dan evaluasi implementasi dan hasil kurikulum & silabus												Bappeda		

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang- gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usah			
		pelatihan/ pendidikan dengan kompetensi inovasi produk daerah sebagai muatan lokal														

4.2.5 Rencana Aksi Detail kebijakan *Foresight R&D Agenda*

Tabel 4.6 menunjukkan Rencana Aksi Detail Kebijakan *agenda R&D* (*Penelitian dan pengembangan*) untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pembentukan kelompok kerja penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
- b. Penyusunan RIK Kabupaten Pesisir Selatan
- c. FGD RIK Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Laporan akhir RIK Kabupaten Pesisir Selatan,
- e. Sosialisasi
- f. Penyusunan rancangan peraturan daerah
- g. Monitoring dan evaluasi implementasi *Foresight R&D Agenda* untuk perbaharuan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan,

Tabel 4.6 Matriks Rencana Aksi Detail *Foresight R&D Agenda*

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Penang-gung Jawab	Output	Outcome		
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit				Dunia Usah	
1	Implementasi <i>Foresight Research & Development Agenda</i> berupa Jakstrada (kebijakan strategis riset dan teknologi untuk pembangunan daerah) 20 tahun dan 5 tahun pertama Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembentukan kelompok kerja penyusunan Rencana Induk Kelitbang (RIK)												Bidang Litbang Kabupaten	Dokumen RIK Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya <i>Foresight R&D Agenda</i> Kabupaten Pesisir Selatan	
		b. Penyusunan RIK Kabupaten Pesisir Selatan													Bidang Litbang		
		c. FGD Perumusan RIK Kabupaten Pesisir Selatan													Bidang Litbang		
		d. Pelaporan hasil penyusunan Perumusan RIK Kabupaten Pesisir Selatan													Bidang Litbang		
		e. Penyusunan rancangan perda RIK 20 tahun													Bidang Litbang		Perda tentang RIK
		f. Penyusunan rancangan peraturan bupati RIK 5 tahun pertama													Bidang Litbang		
		g. Sosialisasi RIK													Bidang Litbang		Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Penang- gung Jawab	Output	Outcome	
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit				Dunia Usaha
		h. Implementasi RIK												Bidang Litbang		
		i. Monitoring dan evaluasi implementasi dan hasil RIK												Bidang Litbang	Hasil monev	

4.2.6 Rencana Aksi Detail Kebijakan Klaster Industri dan Inovasi

Tabel 4.7 menunjukkan Rencana Aksi Detail Kebijakan Inovasi Daerah untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan klaster industri dan inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penyusunan kebijakan klaster industri dan klaster inovasi
3. FGD kebijakan klaster industri dan inovasi
4. Pelaporan penyusunan kebijakan klaster industri dan klaster inovasi
5. Penerbitan Perbup tentang kebijakan klaster industri dan inovasi
6. Sosialisasi kebijakan klaster industri dan inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
7. Monitoring dan evaluasi implementasi dan hasil kebijakan klaster industri dan inovasi Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 4.7 Matriks Rencana Aksi Detail *Kebijakan Klaster*

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Penang-gung Jawab	Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha			
1.	Implementasi Kebijakan Klaster (Industri dan Inovasi) Kabupaten Pesisir Selatan	1. Pembentukan kelompok kerja penyusunan kebijakan klaster industri dan inovasi Kabupaten Pesisir Selatan												Dinas perdagangan bidang Perindustrian	Dokumen kebijakan klaster inovasi dan industri Kabupaten Pesisir Selatan	Terimplementasinya Kebijakan Klaster inovasi dan industri Kabupaten Pesisir Selatan
		2. Penyusunan kebijakan klaster industri dan klaster inovasi												Dinas perdagangan bidang Perindustrian	Draft rancangan kebijakan	
		3. FGD kebijakan klaster industri dan inovasi												Dinas perdagangan bidang Perindustrian	FGD	
		4. Pelaporan penyusunan kebijakan klaster industri dan klaster inovasi												Dinas perdagangan bidang Perindustrian	laporan	
		5. Penerbitan Perbup tentang kebijakan klaster industri dan inovasi												Dinas perdagangan bidang Perindustrian	Perbup tentang kebijakan	

[illegible]

4.2.7 Rencana Aksi Detail Kebijakan regulasi inovasi

Tabel 4.8 menunjukkan Rencana Aksi Detail **Kebijakan regulasi inovasi** untuk peningkatan kematangan (*maturity*) SIDA level makro dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Kajian dan revisi regulasi inovasi produk unggulan/prioritas dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sosialisasi revisi regulasi inovasi produk unggulan/prioritas dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Penyusunan laporan sosialisasi kebijakan, *planning*, dan regulasi inovasi produk unggulan/prioritas daerah

Tabel 4.8 Matriks Rencana Aksi Detail *regulasi Inovasi*

No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Output	Outcome
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha		
2	Implementasi Regulasi Inovasi	c. Kajian dan revisi regulasi inovasi produk unggulan/prioritas dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan												Dokumen revisi regulasi inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	Terimple-mentasinya Regulasi Inovasi untuk mendukung pengembangan produk unggulan/prioritas dan inovasi jasa sebagai penguatan SIDA dan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		d. Sosialisasi revisi regulasi inovasi produk unggulan/prioritas dan jasa di Kabupaten Pesisir Selatan												Tersosialisasi ke seluruh pelaksana SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	
3	Pelaporan Monev	Penyusunan laporan sosialisasi kebijakan, <i>planning</i> , dan regulasi inovasi produk unggulan/prioritas daerah sebagai penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan												Laporan sosialisasi kebijakan, <i>planning</i> , dan regulasi inovasi produk unggulan/prioritas daerah sebagai penguatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Makro untuk tahun berikutnya

4.3. RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SIDA PADA LEVEL MESO (KELEMBAGAAN)

Tabel 4.9 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Kelembagaan yaitu level kelembagaan pendukung inovasi. Lembaga-lembaga pendukung inovasi produk unggulan daerah, diharapkan semua lembaga ini diimplementasikan, tetapi untuk tahap awal, daerah bisa menggunakan beberapa lembaga inovasi yang disesuaikan dengan kemampuan/ sumber daya yang dimiliki daerah.

Kelembagaan pendukung inovasi itu memiliki program yang terdiri dari:

1. Implementasi Pusat Alih Teknologi (PAT) di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Implementasi *Technopark* (TP)
3. Implementasi Inkubator
4. Implementasi Klaster-klaster industry dan inovasi
5. Implementasi Lembaga Promosi Bisnis
6. Implementasi Penyedia Layanan Inovasi
7. Implementasi Lembaga Pendanaan Inovasi
8. Laporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Kelembagaan

Tabel 4.9 Matriks Rencana Aksi Umum Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso (Kelembagaan Pendukung Inovasi)

B. Kebijakan: Peningkatan Kematangan Level Meso (Kelembagaan Pendukung Inovasi)					
	No.	PROGRAM	KEGIATAN	Output	Outcome
	1.	Implementasi Pusat Alih Teknologi (PAT) di Kabupaten Pesisir Selatan	a. Persiapan PAT	Dokumen perencanaan Pusat Alih Teknologi (PAT)	Terimple-mentasinya Pusat Alih Teknologi (PAT) Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengembangan agribisnis produk unggulan daerah terutama sektor pertanian
			b. Pembangunan PAT	Terbangunnya unit PAT	
			c. Operasional PAT	Beroperasinya PAT	
	2.	Implementasi <i>Technopark</i> (TP) industri produk unggulan daerah	a. Persiapan TP untuk penumbuhan industri olahan produk unggulan daerah	Dokumen perencanaan TP	Terimple-mentasinya <i>Technopark</i> (TP) untuk penumbuhan industri olahan produk unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Pembangunan TP bagi penumbuhan industri produk unggulan/prioritas daerah	Terbangunnya unit TP	
			c. Penyusunan tata kelola Operasional TP	Tersusunnya tatakelola TP	
			d. Perencanaan dan Pengembangan TP di masa depan	Berkembangnya TP di Kab.Pesisir Selatan	
			e. Kerjasama dengan Science Techno Park Unand dalam mengembangkan produk inovasi.	MoU dengan Unand dalam mengembangkan produk hasil riset yang terkait dengan produk unggulan daerah Kab.Pesisir Selatan	

3.	Implementasi Inkubator Kabupaten Pesisir Selatan	a. Persiapan dan prainkubasi	Agenda dan calon perusahaan inkubasi	Terimple-mentasinya Inkubator Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Inkubasi bisnis berbasis teknologi	Terbentuknya IKM mandiri	
		c. Pascainkubasi/pendampingan STI IKM	IKM bertahan dan berkembang	
4.	Implementasi Klaster-klaster Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi dan persiapan	Dokumen perencanaan	Terimple-mentasinya Klaster industri dan inovasi produk unggulan daerah kab.Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Pembentukan klaster industri dan inovasi produk unggulan daerah kab.Pesisir Selatan	Terbentuknya klaster industri dan inovasi	
		c. Pembinaan klaster industri dan inovasi produk unggulan daerah kab.Pesisir Selatan	Berkembangnya klaster industri dan klaster inovasi produk unggulan daerah kab.Pesisir Selatan	
5.	Implementasi Lembaga Promosi Bisnis produk-produk inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi dan persiapan	Dokumen perencanaan	Terimple-mentasinya Lembaga Promosi Bisnis Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Pembentukan dan penyusunan program kerja Lembaga Promosi Bisnis	Terbentuknya unit dan dokumen program Lembaga Promosi Bisnis	
		c. Pembinaan Lembaga Promosi Bisnis	Berkembangnya Lembaga Promosi Bisnis	
6.	Implementasi Penyedia Layanan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi dan persiapan	Dokumen perencanaan	Terimple-mentasinya Penyedia Layanan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Pembentukan dan penyusunan program kerja Penyedia Layanan Inovasi	Terbentuknya unit dan dokumen program kerja Penyedia Layanan Inovasi	
		c. Pembinaan Penyedia Layanan Inovasi	Berkembangnya Penyedia Layanan Inovasi	
7.	Implementasi Lembaga Pendanaan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi dan persiapan	Dokumen perencanaan	Terimple-mentasinya Lembaga Pendanaan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
		b. Pembentukan dan penyusunan program kerja Lembaga Pendanaan Inovasi	Terbentuknya unit dan dokumen program kerja Lembaga Pendanaan Inovasi	

			c. Pembinaan Lembaga Pendanaan Inovasi	Berkembangnya Lembaga Pendanaan Inovasi	
	8.	Laporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Kelembagaan	Penyusunan laporan Persiapan, Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan Inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Persiapan, Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan	Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Kelembagaan untuk tahun berikutnya

RENCANA AKSI DETAIL LEVEL MESO (KELEMBAGAAN):**1. PUSAT ALIH TEKNOLOGI PESISIR SELATAN**

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 definisi alih teknologi dikemukakan sebagai berikut ;“Definisi Alih Teknologi yaitu pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dilingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.”

Pusat alih teknologi adalah lembaga yang melaksanakan proses alih keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas dari pihak yang berkompetensi kepada yang membutuhkan yang akan menjadikan produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.

Alih teknologi (*transfer of technology, TOT*) adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara pemerintah atau universitas dan lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan IPTEK dapat diakses dengan lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ke dalam produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa [Wikipedia].

Pusat alih teknologi mengkhususkan diri dalam acara-acara perjodohan usaha, pelatihan, seminar, konferensi, inkubasi untuk start-up, kolaborasi proyek nyata dan lain-lain; lebih lanjut menyediakan penempatan bisnis, serta membantu fasilitasi akses pasar yang mudah dan solusi bermitra dengan para entitas.

Pusat alih teknologi adalah lembaga yang melaksanakan proses alih keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas dari pihak yang berkompetensi kepada yang membutuhkan yang akan menjadikan produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa. Keberadaan PAT ini di Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk pengembangan disisi hulu pada budi daya produk-produk inovasi sector pertanian.

Pusat alih teknologi mengkhususkan diri dalam acara-acara perjodohan usaha, pelatihan, seminar, konferensi, inkubasi untuk *start-up*, kolaborasi proyek nyata dan lain-lain; lebih lanjut menyediakan penempatan bisnis, serta membantu fasilitasi akses pasar yang mudah dan solusi bermitra dengan para entitas.

Tahapan pengembangan Pusat Alih Teknologi Pesisir Selatan secara umum, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan pembangunan Pusat Alih Teknologi Pesisir Selatan;
2. Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan Pusat Alih Teknologi ;
3. Seleksi komoditi
4. Pembangunan infrastruktur Pusat Alih Teknologi ;
5. Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan fasilitas Pusat Alih Teknologi ;
6. Pengadaan dan pengembangan SDM berupa pelatihan;
7. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku dan penjualan produk;
8. fasilitasi akses pasar produk
9. Melakukan evaluasi
10. Tindak lanjut kedepan

Tabel 4.10 RENCANA AKSI DETAIL IMPLEMENTASI LEMBAGA PUSAT ALIH TEKHNOLOGI

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	PEMBANGUNAN															
1.	Perencanaan dan persiapan pembangunan Pusat Alih Teknologi Pesisir Selatan	1. Pembentukan kelompok kerja														Dinas Pertanian
		2. Penyediaan lahan lokasi														Dinas pertanian
		3. Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan														Dinas pertanian
		4. Peluncuran <i>soft launching</i> dan penandatanganan SK bupati tentang Tim Pengelola Pusat Alih Teknologi														Dinas pertanian
		5. Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)														Dinas pertanian
		6. Penandatanganan MoU dengan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan PAT											•	•	•	Dinas pertanian
2.	Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan Pusat Alih Teknologi	1. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola Pusat Alih Teknologi											•			Dinas Pertanian
		2. Pembentukan koperasi											•			Dinas Koperasi
		3. Penyusunan tatakelola kelembagaan											•	•	•	Dinas koperasi
3.	Pra-inkubasi dan seleksi <i>tenant</i> IKM	1. Sosialisasi (calon <i>tenant</i>)														Dinas pertanian dan prindustrian
		2. Seleksi <i>tenant</i>														Dinas perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		3. Pembekalan dan uji coba operasi														Dinas pertanian,
4.	Pembangunan infrastruktur Pusat Alih Teknologi	1. Pembangunan prasarana/infrastruktur														Dinas Pertanian
		2. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola														Dinas Pertanian
		3. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi														Dinas Pertanian
		4. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan														Dinas Pertanian
5.	Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan fasilitas Pusat Alih Teknologi	1. Pengadaan sistem produksi														Dinas Pertanian
		2. Penyediaan database Teknologi untuk sistem produksi														Dinas Pertanian
		3. Pengadaan peralatan perkantoran														Dinas Pertanian
		4. Pengadaan fasilitas Pusat Alih Teknologi														Dinas Pertanian
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	1. Penyediaan database Teknologi														Dinas Pertanian
		2. Tersedianya tim expert														Dinas Pertanian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		3. Menyelenggarakan workshop, exhibition dan seminar untuk meningkatkan sektor UKM														Dinas Pertanian
		4. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD														Dinas pertanian
		5. Pengembangan SDM Koperasi														Dinas Koperasi
		6. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•					•	•	•	•	•			Dinas Pertanian
B.	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN															
1.	Operasional produksi IKM & pengelolaan Pusat Alih Teknologi	1. Operasional produksi IKM	•	•	•	•	•			•	•	•	•			Dinas Pertanian
		2. Pengelolaan Pusat Alih Teknologi			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Pertanian
2.	Inkubasi inovasi produk dan teknologi produksi IKM	1. Inkubasi bisnis IKM			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Inkubasi teknologi IKM			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
3.	Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku dan penjualan produk	1. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Pertanian
		2. Pengembangan logistik penjualan produk			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
4.	Pengembangan Teknologi Produksi dan Produk	1. Pengembangan teknologi produksi				•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengembangan produk				•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
5.	Pengembangan pasar	1. Perluasan pasar			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Peningkatan segmen pasar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perindustrian
6.	Peningkatan akses permodalan	1. Peningkatan akses perbankan			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi dan UKM

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		2. Mencari mekanisme pembiayaan lain yang inovatif		•	•	•	•							•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Peningkatan akses non-bank			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		4. Meningkatkan jumlah dan ragam pembiayaan <i>Venture Capital</i> dan memfasilitasi akses ke skema <i>Venture Capital</i>	•	•						•				•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

2. Technopark

Science and Technology Park (STP) adalah lembaga yang mampu memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif. Di banyak negara maju, lembaga tersebut terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. Gambar 5.1 memperlihatkan program science-technopark nasional yang secara organisasi berada di bawah Presiden. Program STP ini membina seluruh science park yang berada di tingkat provinsi dan technopark di tingkat kabupaten/Kabupaten. Arah kebijakan dan strategi pengembangan Taman Sains dan Teknologi sebagai berikut:

- a. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National Science and Technology Park) yang diarahkan berfungsi sebagai : Pusat pengembangan sains dan teknologi maju; Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
- b. Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai: Penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; dan Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
- c. Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kabupaten diarahkan berfungsi sebagai: Pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, perikanan, perikanan dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, Perguruan Tinggi un 5-32 diterapkan dalam skala ekonomi; dan Tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. *Technopark* adalah suatu kawasan terpadu yang dikelola untuk mempromosikan inovasi. Secara fisik, kawasan itu memiliki berbagai fasilitas IT (*information technology*), litbang (penelitian dan pengembangan), diklat (pendidikan dan pelatihan), produksi, inkubator teknologi dan bisnis, konsultasi dan mediasi bisnis, kluster industri, perkantoran, konvensi, pusat ekspo dan perdagangan. Berbagai UKM yang menjadi *tenant* dapat menggunakan seluruh fasilitas tersebut dan dibina melalui program inkubasi dan pendampingan agar mampu tumbuh kembang secara mandiri.

Secara kelembagaan, unit tersebut merupakan kawasan bersama terpadu, yang menyediakan informasi dan teknologi untuk bisnis hasil inovasi, yang di dalamnya berbagai entitas bekerjasama seperti industri, perguruan tinggi, lembaga litbang dan diklat, inovator, wirausahawan, UKM/IKM, perusahaan besar, jasa keuangan, Pemerintah Pusat, dan Pemda.

Technopark berbeda dengan inkubator yang idedikasikan untuk *start-up* dan tahap awal perusahaan. *Technopark* cenderung merupakan proyek skala besar yang menaungi segala hal dari perusahaan, pemerintah atau laboratorium universitas sampai perusahaan kecil. Kebanyakan *technopark* tidak menawarkan jasa bantuan usaha, yang merupakan inti dari program inkubasi bisnis. Namun, banyak *technopark* memiliki program inkubasi.

Peningkatan daya saing daerah berkaitan erat dengan kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki. Peningkatan nilai tambah produk maupun jasa berkaitan erat dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di daerah. Pemanfaatan Iptek bukan hanya bersifat hi-tech saja, melainkan juga bersifat low-tech, dalam proses produksi baik barang maupun jasa sehingga menimbulkan nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini sering diistilahkan sebagai inovasi. Wujud inovasi dapat berupa lahirnya produk baru, perbaikan mutu produk yang telah ada, efisiensi proses dan sebagainya.

Pada prakteknya, inovasi melibatkan banyak sekali mekanisme umpan balik yang rumit dan interaktif antara ilmu pengetahuan, teknologi, pembelajaran, kebijakan, produksi dan permintaan. Inovasi tak akan terjadi dalam keterasingan. Inovasi muncul akibat interaksi dari berbagai aktor seperti universitas, lembaga litbang, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, termasuk sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya secara luas. Inovasi menjadi lebih bernilai jika dilingkupi sebuah sistem yang sering disebut dengan Sistem Inovasi Nasional (SINas) atau Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Jika kembali menilik masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025, upaya peningkatan daya saing daerah akan ditempuh dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di setiap pulau dan mengembangkan klaster industri berbasis sumber daya unggulan. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut harus didukung aktor-aktor inovasi baik industri, universitas, lembaga litbang maupun pemerintah daerah sebagai regulator,

disamping lembaga-lembaga penunjang terkait. Dengan kata lain SIDA di wilayah harus berjalan dengan baik.

Salah satu model penguatan SIDA yang terbukti berhasil dikembangkan di beberapa Negara adalah Science & Technopark(STP). Pada dasarnya STP atau banyak istilah sejenis lainnya merupakan sebuah kawasan khusus yang diorganisasikan secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas disekitar kawasan tersebut, melalui pendayagunaan iptek dan budaya inovasi yang berintegrasi dengan kegiatan bisnis dan pendidikan.

STP digunakan sebagai sarana untuk menginisiasi dan mengalirkan pengetahuan serta teknologi diantara lembaga litbang, universitas dan industri. STP memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri-industri berbasis inovasi melalui inkubasi dan proses spin-off, disamping menyediakan jasa-jasa bernilai ekonomi tinggi dalam suatu kawasan yang dilengkapi fasilitas yang berkualitas tinggi. Pembangunan STP bisa menjadi pemicu dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing wilayah. Salah satu poin Nawa Cita Presiden Reuplik Indonesia adalah Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, karena begitu beratnya tantangan kedepan dengan terwujudnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Di bawah ini diuraikan tahapan pengembangan *Technopark* secara umum, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan pembangunan *Technopark*;
2. Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan *technopark*;
3. Seleksi IKM calon perusahaan *tenants*;
4. Pembangunan infrastruktur *technopark*;
5. Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan fasilitas *technopark*;
6. Pengadaan dan pengembangan SDM;
7. Operasional produksi IKM dan pengelolaan *technopark*
8. Pengembangan teknologi produksi dan produk;
9. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku dan penjualan produk;
10. Pengembangan promosi dan pasar;
11. Perluasan dan peningkatan akses permodalan.

RENCANA AKSI DETAIL IMPLEMENTASI *TECHNOPARK PESISIR SELATAN*

Tabel 4.10 Matriks Rencana Aksi Umum Detail Implementasi Technopark

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	PEMBANGUNAN															
1.	Perencanaan dan persiapan pembangunan <i>Technopark</i>	1. Pembentukan kelompok kerja	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		2. Penyediaan lahan lokasi	•							•						Pemkab
		3. Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•					•		•						Bappeda
		4. Peluncuran <i>soft launching</i> dan penandatanganan SK bupati tentang Tim Pengelola <i>technopark</i>	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		5. Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•				•		•						Bappeda
		6. Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Pemkab
2.	Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan <i>technopark</i>	1. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola <i>technopark</i>		•						•	•		•			Bappeda
		2. Pembentukan koperasi		•						•			•			Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Pembentukan klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
3.	Pra-inkubasi dan seleksi <i>tenant</i> IKM	1. Sosialisasi (calon <i>tenant</i>)		•						•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Seleksi <i>tenant</i>		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Pembekalan dan uji coba operasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
4.	Pembangunan infrastruktur <i>technopark</i>	1. Pembangunan prasarana/infrastruktur		•				•		•						Dinas PU/PDAM/PLN
		2. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perindustrian
		3. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•		•						Kelitbangan di Bappeda
		4. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•		•						Kelitbangan di Bappeda
5.	Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan	1. Pengadaan sistem produksi		•				•		•						Kelitbangan di Bappeda
		2. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•		•						Kelitbangan di Bappeda

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	fasilitas <i>technopark</i>	3. Pengadaan fasilitas <i>technopark</i>		•				•		•						Kelitbangan di Bappeda
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	1. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengembangan SDM Koperasi	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
B.	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN															
1.	Operasional produksi IKM & pengelolaan <i>technopark</i>	1. Operasional produksi IKM			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengelolaan <i>technopark</i>			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	UPTD
2.	Inkubasi inovasi produk dan teknologi produksi IKM	1. Inkubasi bisnis IKM			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Inkubasi teknologi IKM			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																Perdagangan Dan Perindustrian
3.	Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku dan penjualan produk	1. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengembangan logistik penjualan produk			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
4.	Pengembangan Teknologi Produksi dan Produk	1. Pengembangan teknologi produksi				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengembangan produk 3. Perluasan penerapan SNI				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
5.	Pengembangan pasar	1. Perluasan pasar produk 2.			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Peningkatan segmen pasar			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
6.	Peningkatan akses permodalan	1. Peningkatan akses perbankan			•	•	•			•	•			•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Peningkatan akses non-bank			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

3. INKUBATOR

Inkubator adalah lembaga yang melaksanakan inkubasi yaitu model penumbuh kembangkan UKM dimana pengusaha dididik untuk menguasai semua aspek bisnis, dibekali dengan sarana dan modal kerja, serta didampingi secara intensif. Program inkubasi secara umum bertujuan untuk menghasilkan UKM atau IKM dan pengusaha yang mandiri dan mampu bersaing dalam memproduksi dan berbisnis produk industri.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 :

1. Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.
2. Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Menurut UU no. 20 Thn 2008 tentang UMKM

(1) Kriteria Usaha Mikro:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil:

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah:

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Persyaratan Minimum Pengelolaan & Pendirian Inkubator di Kabupaten Pesisir Selatan

Fasilitas yang dibutuhkan dlm tahap awal perkembangan adalah:

1. Gedung dan fasilitas operasional kegiatan,
2. Dana awal dan pemodalan usaha tenant,
3. Pembinaan dan pelatihan,
4. Jejaring Inkubator Bisnis (Mitra).

Prinsip kerja INBIS meliputi :

1. In Wall dan Out Wall; INBIS membina tenant baik di lokasi Inbis (In Wall) maupun di luar lokasi Inbis (Out Wall).
2. Langsung; Calon tenant memperoleh layanan langsung berupa pembinaan dan bimbingan melalui dukungan manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi, serta akses jaringan agar calon tenant dapat mengembangkan bisnisnya secara mandiri.
3. Fleksibel; Calon tenant dapat memilih jenis bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan INBIS.
4. Berkelanjutan; Pelayanan diberikan sampai tenant mampu mandiri.
5. Profesional; Pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan berpengalaman.
6. Imbal jasa; Memungut biaya atas jasa yang diberikan.

Bentuk Inkubator & Operasionalisasi

1. Bentuk inkubator sebagai wadah pembinaan pelaku usaha dibedakan berdasarkan kelompok usaha yang dibina, baik berdasarkan jenis maupun skala usaha Inkubator Bisnis (Mikro) : Pelaku usaha yang menjalankan sekurang-kurangnya satu bentuk usaha, namun tidak memenuhi kriteria UMKM sesuai UU no. 20 tahun 2008
2. Inkubator Bisnis UMKM
3. Pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM sesuai UU no. 20 tahun 2008, dan memiliki badan hukum

Setiap Inkubator akan didampingi oleh sekurang-kurangnya lembaga keuangan yang dibentuk swadaya untuk pengelolaan dana bergulir

Adapun ukuran keberhasilan;

1. Secara manajerial tenant telah mampu menjalankan usahanya tanpa dampingan dari Inkubator Bisnis,
2. Sehat secara finansial (tanpa dukungan subsidi),
3. Mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar secara kontinu,
4. Skala usaha semakin meningkat,
5. Unit bisnis semakin berkembang,
6. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru,
7. Tenant mampu memberikan kontribusi pendanaan bagi Inkubator Bisnis.
8. Pada tahap Roll Out tenant; a. Mencapai Break Even Point (BEP) dan dapat bersaing; b. Tumbuh sesuai dengan Business Plan; c. Siap mandiri secara komersial; d. Mencapai peningkatan volume usaha, nilai tambah dan produktivitas usaha; e. Mampu mengembangkan networking;

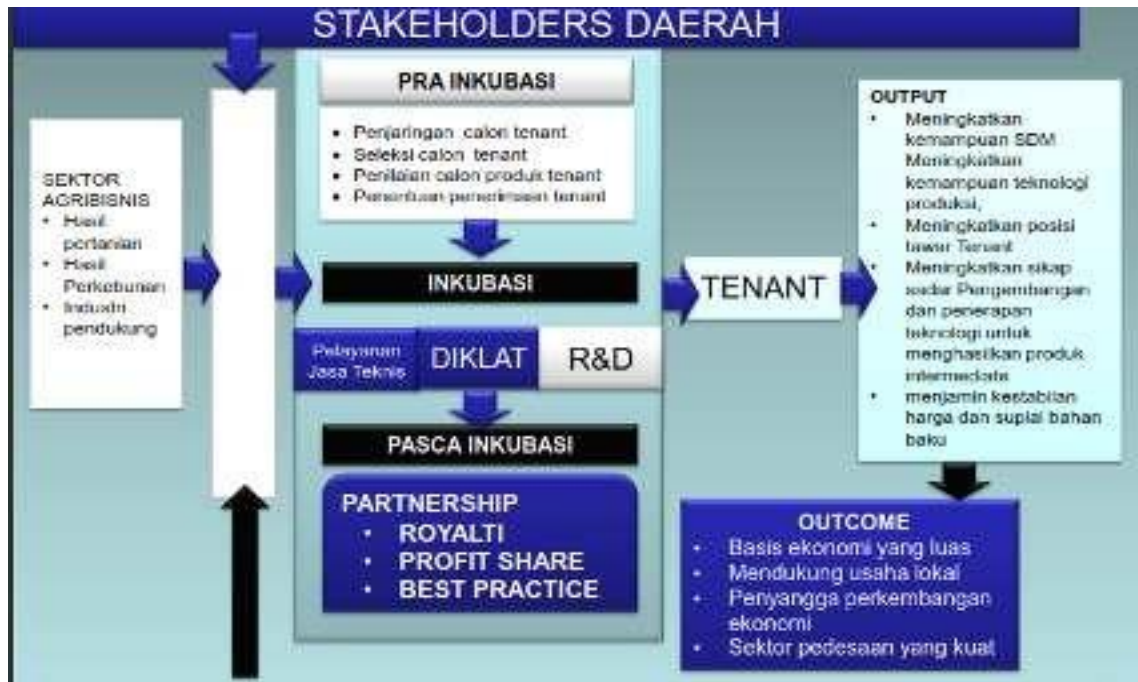
Sumberdaya Keuangan & Pemasaran

Sumberdaya keuangan Inkubator Bisnis pada tahap awal perlu dukungan dana dari pemerintah dan lembaga yang bersangkutan. Namun dalam jangka panjang sumber dana dapat diperoleh melalui pembiayaan dari pihak luar maupun keuntungan pengelolaan Inkubator Bisnis yang berasal dari :

- a. balas jasa dari fasilitas,
- b. management fee,
- c. bagi hasil dari investasi,
- d. balas jasa sebagai penjamin hutang, dan
- e. pelatihan dan pendampingan.



Gambar 2. Tahapan Pengembangan Inkubasi Bisnis



Gambar 3. Model Pengembangan Inkubasi Bisnis

RENCANA AKSI DETAIL IMPLEMENTASI LEMBAGA INKUBATOR

Tabel 4.11 Matriks Rencana Aksi Detail Implementasi Lembaga Inkubator

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
A.	PEMBANGUNAN															
1.	Perencanaan dan persiapan pembangunan <i>inkubator</i>	1. Pembentukan kelompok kerja	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan bidang industri
		2. Penyediaan lahan lokasi	•							•						Dinas Perdagangan bidang industri
		3. Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•					•		•						Dinas Perdagangan bidang industri
		4. Peluncuran soft launching dan penandatanganan SK kepala daerah tentang Tim Pengelola Lembaga Inkubasi Bisnis	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan bidang industri
		5. Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•				•		•						Dinas Perdagangan bidang industri
		6. Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> klaster inovasi (jejaring inkubasi bisnis)		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan bidang industri
2.	Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan <i>inkubator</i>	1. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola <i>inkubator</i>		•						•	•		•			Dinas Perdagangan bidang industri
		2. Pembentukan koperasi		•						•			•			Dinas Koperasi, Umkm,

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupat en	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
		3. Pembentukan klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi Umkm,
3.	Pra-inkubasi dan seleksi <i>tenant</i> IKM	1. Sosialisasi (calon <i>tenant</i>)		•						•	•		•			Dinas Koperasi Umkm,
		2. Seleksi <i>tenant</i>		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi Umkm,
		3. Pembekalan dan uji coba operasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi Umkm,
		4. Pembinaan Tenant								•	•	•				Dinas Koperasi Umkm,
4.	Pembangunan infrastruktur <i>inkubator</i>	1. Pembangunan prasarana/infrastruktur		•				•								Dinas Koperasi Umkm,
		2. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi Umkm,
		3. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•		•						Dinas Koperasi Umkm,
		4. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•		•						Dinas Koperasi Umkm,
5.	Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan fasilitas <i>inkubator</i>	1. Penyediaan database Teknologi		•				•								Dinas Koperasi Umkm,
		2. Pengadaan sistem produksi	•					•		•	•	•				Dinas Koperasi Umkm,
		3. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•		•						Dinas Koperasi Umkm,
		4. Pengadaan fasilitas <i>inkubasi</i>		•				•		•						Dinas Koperasi Umkm,

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	1. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Tersedianya tim expert dan konsultan untuk mengasistensi pengembangan UKM								•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Mengadakan workshop, exhibition dan seminar untuk meningkatkan pemahaman UKM akan teknologi baru	•	•	•					•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		4. Melakukan penelitian berkala mengenai perkembangan UKM									•					Dinas Koperasi, Umkm,
		5. Pengembangan SDM Koperasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		6. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
B.	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN															
1.	Operasional produksi IKM & pengelolaan <i>inkubator</i>	1. Operasional produksi IKM			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Meningkatkan interaksi UKM dengan lembaga litbang dan institusi akademik	•							•		•				Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Pengelolaan <i>inkubator</i>			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
2.	Inkubasi inovasi produk dan teknologi produksi IKM	1. Inkubasi bisnis IKM			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
		2. Inkubasi teknologi IKM			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
3.	Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku dan penjualan produk	1. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Pengembangan logistik penjualan produk			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
4.	Pengembangan Teknologi Produksi dan Produk	1. Pengembangan teknologi produksi				•	•		•	•	•	•	•	•	•	
		2. Pengembangan produk				•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
5.	Pengembangan pasar	1. Perluasan pasar prduk			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
		2. Peningkatan segmen pasar			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan
6.	Peningkatan akses permodalan	1. a. Peningkatan akses perbankan			•	•	•						•	•	•	Dinas Koperasi
		2. Meningkatkan jumlah dan ragam pembiayaan <i>Venture Capital</i> dan memfasilitasi akses ke skema <i>Venture Capital</i>	•	•						•	•	•				Dinas Koperasi
		3. b. Peningkatan akses non-bank			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi,

4. KLASTER-KLASTER

Klaster-klaster yang diharapkan ada pada suatu daerah dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah berupa klaster inovasi dan klaster industri. Berikut uraian keduanya.

a. Klaster Inovasi

Klaster inovasi adalah kelompok kegiatan bisnis inovasi yang saling terkait yang terdiri dari bisnis inovasi itu sendiri, industri pemasok, lembaga pasokan teknologi, industri/pasar/masyarakat sebagai pengguna output bisnis inovasi, regulasi dan finansial. Gambar 4 memperlihatkan sebuah klaster inovasi. Output klaster ini dapat berupa SDM kompeten, produk, metode, aplikasi atau proses inovatif.

b. Klaster Industri

Klaster industri adalah kelompok kegiatan terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, pemasok bahan baku, industri terkait, lembaga pendukung sistem klaster dan pembeli, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, dimana kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah jaringan. Industri inti tentunya adalah industri produk olahan. Juga terdapat pemasok bahan baku dan komponen. Industri pendukung terdiri dari PLN, bank dan lembaga keuangan, jasa transportasi, telekomunikasi dan pengemasan. Industri terkait terdiri dari pemasok energi, pemasok mesin, dan pemasok suku cadang. Lembaga pendukung sistem klaster di antaranya instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dan KADIN. Di pihak pengguna terdapat distributor, industri pengolahan lainnya, perusahaan, pemerintah, konsumen, dan sebagainya. Dengan termasuk dalam suatu klaster, dunia usaha atau industri akan memiliki efisiensi dan daya saing yang tinggi. Pihak-pihak di dalam suatu klaster dipadukan melalui sebuah piagam kesepahaman bersama dengan MoU. Klaster ditetapkan oleh kepala daerah dengan sebuah surat keputusan. Klaster dijalankan dengan kontribusi, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

RENCANA AKSI DETAIL KLASSTER

Tabel 4.12 Matriks Rencana Aksi Detail kelembagaan pendukung inovasi (Klaster industry dan inovasi)

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI DAN PERSIAPAN															
1.	Perencanaan dan persiapan Klaster	Pembentukan kelompok kerja	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan bidang Perindustrian
		Penyediaan lahan lokasi	•							•						Perdagangan bidang Perindustrian
		Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•					•		•						Perdagangan bidang Perindustrian
		Peluncuran <i>soft launching</i> dan penandatanganan SK kepala daerah tentang Tim Pengelola Lembaga Kalster Bisnis	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan bidang Perindustrian
		Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•				•		•						Perdagangan bidang Perindustrian
		Pembangunan infrastruktur		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan bidang Perindustrian
		Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> klaster inovasi		•						•	•		•			Dinas Perdagangan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																bidang Perindustrian
		Seleksi IKM calon perusahaan di klaster		•						•			•			Dinas Koperasi dan UMKM serta bidang Perindustrian
2.	Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan <i>klaster</i>	a. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola <i>klaster</i>		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan bidang Perindustrian
		b. Pembentukan koperasi		•						•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm,
		c. Pembentukan klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan bidang Perindustrian
4.	Pembangunan infrastruktur <i>klaster</i>	a. Pembangunan prasarana/infrastruktur								•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		b. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola		•				•								Dinas Koperasi, Umkm,
		c. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		d. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
5.	Pengadaan sistem produksi,	a. Pengadaan sistem produksi		•				•		•						Perdagangan bidang Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	perkantoran, dan fasilitas <i>klaster</i>	b. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•								Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Pengadaan fasilitas <i>klaster</i>	•					•		•	•	•				Perdagangan Dan Perindustrian
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	a. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
		b. Pengembangan SDM Koperasi		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
		c. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
B.	PEMBINAAN KLASER INDUSTRI OLAHAN PERTANIAN										•	•	•			
1.	Operasional produksi IKM & pengelolaan <i>klaster</i>	a. Operasional produksi IKM	•	•	•					•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		b. Pengelolaan <i>klaster</i>									•					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.	Pengembangan jaringan/networking kegiatan produksi IKM	a. Kerja sama dengan industri penunjang, pemasok bahan baku, industri terkait, lembaga pendukung sistem klaster dan pembeli, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
3.	Penyediaan dan pengembangan logistik bahan	a. Penyediaan dan pengembangan logistik bahan baku														Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	baku dan penjualan produk	b. Pengembangan logistik penjualan produk			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Menjalin kerja sama dengan industri pemasok produk	•							•		•				Perdagangan Dan Perindustrian
4.	Pengembangan Teknologi Produksi dan Produk	a. Pengembangan teknologi produksi			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Pengembangan produk			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
5.	Pengembangan pasar	a. Perluasan pasar			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Peningkatan segmen pasar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Perdagangan Dan Perindustrian
6.	Peningkatan akses permodalan	a. Peningkatan akses perbankan			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		b. Peningkatan akses non-bank				•	•		•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,

5. LEMBAGA PROMOSI BISNIS

Lembaga promosi bisnis bertanggung jawab untuk memperoleh dan menyediakan jasa konsultasi profesional untuk perusahaan yang ingin mendirikan anak perusahaan atau menjalankan bisnis. Lembaga promosi bisnis adalah lembaga yang mengkhususkan diri sebagai representatif dan penyedia informasi layanan dukungan analisis bagi klien di bidang kegiatan ekonomi dan investasi yang merupakan faktor kunci keberhasilan untuk pengembangan bisnis modern. Tujuan lembaga promosi bisnis adalah:

- Merealisasikan kepentingan ekonomi klien dengan cara yang paling efisien
- Menyusun hubungan saling menguntungkan dan jangka panjang dengan mitra
- Bekerja sama dengan orang-orang yang dapat diandalkan, bertanggung jawab dan profesional.

Lembaga promosi bisnis menjalankan misi untuk mencapai keberhasilan bisnis klien dengan prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

- Manajemen proyek
- Sistem dan pendekatan yang kompleks untuk mencapai tujuan
- Pendekatan sesuai kepentingan klien
- Kualitas tinggi dan kecepatan pelaksanaan tugas
- Berlokasi di pusat bisnis maju dan modern.

Lembaga Promosi Bisnis menyediakan program bantuan komprehensif untuk membantu pengusaha atau calon pengusaha usaha untuk peningkatan kapabilitas dan memperoleh peluang-peluang penumbuhkembangan usaha. Bersama dengan asosiasi dan mitra industri, dapat dikembangkan klaster industri yang kompetitif dan ekosistem inovatif perusahaan-perusahaan yang tangguh.

Di bawah ini diuraikan tahapan pengembangan Lembaga Promosi Bisnis Pesisir Selatan secara umum, sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan pembangunan Lembaga Promosi Bisnis;
2. Pendirian dan pembentukan kelembagaan pengelolaan Lembaga Promosi Bisnis;
3. Pembangunan infrastruktur lembaga promosi bisnis

4. Pengadaan sistem produksi, perkantoran, dan fasilitas Lembaga Promosi Bisnis;
5. Pengadaan dan pengembangan SDM;
6. Penyusunan Program dan menjalin kerja sama dengan pengusaha terkait
7. Pengembangan promosi dan pasar;
8. Perluasan dan peningkatan akses permodalan.
9. Pengembangan industri kecil dan menengah

RENCANA AKSI DETAIL IMPLEMENTASI LEMBAGA PROMOSI BISNIS

Tabel 4.12 Matriks Rencana Aksi Detail Implementasi Lembaga Promosi Bisnis

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	IDENTIFIKASI DAN PERSIAPAN															
1.	Perencanaan dan persiapan lembaga promosi bisnis	1. Pembentukan kelompok kerja	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm
		2. Penyediaan lahan lokasi	•							•						Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•					•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
		4. Peluncuran <i>soft launching</i> dan penandatanganan SK kepala daerah tentang Tim Pengelola Lembaga Promosi Bisnis	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		5. Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm
		6. Pembangunan infrastruktur		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm
		7. Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> klaster inovasi		•						•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm
		8. Seleksi IKM calon perusahaan di klaster		•						•		•			Dinas Koperasi, Umkm	
2.	Pendirian dan pembentukan lembaga promosi bisnis	1. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola <i>inkubator</i>		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm
		2. Pembentukan koperasi		•						•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm,

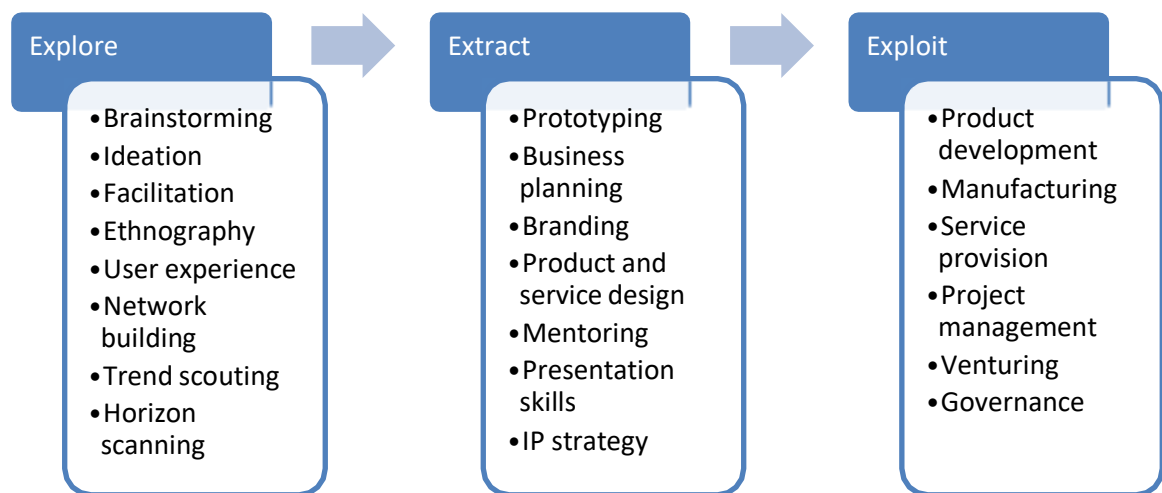
NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		3. Pembentukan klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.	Pembangunan infrastruktur lembaga promosi bisnis	1. Pembangunan prasarana/infrastruktur														Pemkab, Dinas PU, PDAM, PLN
		2. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola								•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•								Pemkab
		4. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•	•	•	•	•	•	•		Pemkab
4.	Pengadaan system pemasaran perkantoran, dan fasilitas lembaga promosi bisnis	1. Pengadaan sistem pemasaran		•				•		•						Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Pengadaan fasilitas <i>inkubasi</i>		•				•								Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
5.	Pengadaan dan pengembangan SDM	1. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD	•					•		•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Pengembangan SDM Koperasi		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
		3. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•		•						Dinas Koperasi, Umkm,
B.	PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LEMBAGA PROMOSI BISNIS				•				•	•	•	•	•	•	•	•

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
6.	Penyusunan Program dan menjalin kerja sama dengan pengusaha terkait	1. Menyusun strategi promosi lembaga yang berkelanjutan									•	•	•			Dinas Perdagangan & Infokom
		2. penyusunan kebijakan promosi produk	•	•	•					•	•	•				Dinas Perdagangan
		3. MoU dengan pengusaha yang terkait dalam klaster									•					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		4. penyusunan rancang bangun/master plan pemasaran		•				•			•	•	•			Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		5. penyelenggaraan promosi (Bazar) dalam rangka promosi Produk Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan	•	•	•					•			•		•	Dinas Koperasi, Umkm dan dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		6. Menyusun dan melakukan jejaring ekonomi dengan para pelaku ekonomi (pengusaha) dengan prinsip saling menguntungkan (mutualisme simbiosis)	•	•						•	•	•				Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
7.	Pengembangan pasar dan fasilitas pasar	1. Perluasan pasar			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Peningkatan segmen pasar	•							•		•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
		3. Pembenahan dan perbaikan fisik dan penataan tempat usaha PKL			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		4. Penataan Kawasan Pasar			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
8.	Peningkatan akses permodalan	1. Peningkatan akses perbankan			•	•	•			•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Peningkatan akses non-bank			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
C	PEMBINAAN LEMBAGA PROMOSI BISNIS															
9	Pengembangan industri kecil dan menengah	1. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian dan promosi produk unggulan Kabupaten		•	•	•		•	•	•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm,
		2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri														
		3. Membantu pengembangan promosi dan pemasaran produk sentra binaan (leaflet, media massa, brosur, media sosial dll).	•	•	•	•		•	•	•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm,
		4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta		•	•					•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
		5. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	•	•	•					•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,

6. PENYEDIA LAYANAN INOVASI

Lembaga penyedia layanan inovasi bagi pengembangan produk unggulan daerah di kab.Pesisir Selatan dapat menggunakan layanan inovasi yang ada berasal dari perguruan tinggi, balai riset, konsultan teknologi, perusahaan, ventura, kantor hukum, konsultan pasar, dan sebagainya. Penyedia Layanan Inovasi membantu pengusaha atau calon pengusaha dalam mengeksplor ide-ide, menyusun rencana dan desain, dan merealisasikan keduanya (lihat Gambar 6)



Gambar5.6: Tahapan layanan inovasi

Penyedia layanan inovasi dapat berupa konsultansi untuk mendukung inovasi, yaitu:

- Pengembangan teknologi berupa studi kelayakan teknik sebelum bisnis dimulai dan dukungan teknologi ketika memulai bisnis, yang masing-masing terdiri dari:
 - a. Studi kelayakan:
 - Asesmen teknologi baru
 - Riset awal dan *prototyping*
 - Adopsi dan pengembangan produk-produk baru, teknologi proses, aplikasi, praktek, atau operasinya
 - Peningkatan produk-prduk yang telah ada, teknologi proses, aplikasi, praktek, atau operasinya.
 - b. Dukungan teknologi:
 - Desain dan pengembangan produk
 - Desain, pengembangan dan optimisasi produk
 - Pengetesan, evaluasi dan validasi temuan
 - Pendiagnostikan bisnis dan aspek legal proyek inovasi

RENCANA AKSI DETAIL IMPLEMENTASI PENYEDIA LAYANAN INOVASI

Tabel 4.11 Matriks Rencana Aksi Detail Implementasi Penyedia Layanan Inovasi

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI DAN PERSIAPAN															
1.	Perencanaan dan persiapan lembaga layanan inovasi	1. Pembentukan kelompok kerja	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda
		2. Penyediaan lahan lokasi	•							•						Bidang Kelitbangan di Bappeda
		3. Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•					•		•						Bidang Kelitbangan di Bappeda
		4. Peluncuran <i>soft launching</i>	•					•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda
		5. Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•				•		•						Bidang Kelitbangan di Bappeda
		6. Pembangunan infrastruktur		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda
		7. Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> (perguruan tinggi, balai riset, konsultan teknologi, perusahaan, ventura, kantor hukum, dsb)		•							•	•		•		

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
2.	Pendirian dan pembentukan lembaga Lembaga Layanan Inovasi	1. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola Lembaga Layanan Inovasi		•						•	•		•			Bidang Kelitbangan di Bappeda
		2. Pembentukan koperasi		•						•			•			Dinas Koperasi & UMKM
		3. Pembentukan klaster inovasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas perdagangan bidang Perindustrian
4.	Pembangunan infrastruktur Lembaga Layanan Inovasi	1. Pembangunan prasarana/infrastruktur		•				•								Pemkab, Dinas PU, PDAM, PLN
		2. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, UMKM dan TK
		3. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•		•						Bidang Kelitbangan di Bappeda
		4. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•		•	•					Bidang Kelitbangan di Bappeda
5.	Pengadaan sistem layanan Inovasi perkantoran, dan fasilitas lembaga	1. Pengadaan sistem layanan Inovasi		•				•			•	•				Dinas Infokom
		2. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•		•						Bidang Kelitbangan di Bappeda

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	Lembaga Layanan Inovasi	3. Pengadaan fasilitas Lembaga Layanan Inovasi		•				•		•						Bidang Kelitbangan di Bappeda
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	1. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda
		2. Pengembangan SDM Koperasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi
		3. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi,UMKM dan TK
B.	PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LEMBAGA LAYANAN INOVASI															
1.	Penyediaan Layanan Inovasi	1. Adopsi dan pengembangan produk-produk baru, teknologi proses, aplikasi, praktek, atau operasinya	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			Bidang Kelitbangan di Bappeda & Perguruan Tinggi
		2. Difusi Iptek untuk komoditi unggulan	•	•	•					•	•	•				Bidang Kelitbangan di Bappeda & Perguruan Tinggi
		3. Temu Bisnis			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda & Perguruan Tinggi
		4. Intermediasi	•	•							•	•				Bidang Kelitbangan di

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																Bappeda & Perguruan Tinggi
6	Pengembangan Produk	1. Desain dan pengembangan produk	•	•						•	•	•				Dinas Perindustrian & Perguruan Tinggi
		2. Desain, pengembangan dan optimisasi produk	•	•						•	•					Dinas Perindustrian & Perguruan Tinggi
		3. Pengetesan, evaluasi dan validasi temuan	•	•	•	•	•			•						Perguruan Tinggi
7	Operasional produksi IKM & pengelolaan Lembaga Layanan Inovasi	1. Pengelolaan Lembaga Layanan Inovasi		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		2. Operasional Layanan Inovasi		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan
C	PEMBINAAN LEMBAGA LAYANAN INOVASI															
		1. Menjalin kerja sama dengan Perguruan tinggi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			Bidang Kelitbangan di Bappeda
		2. Mengembangkan inovasi, diversifikasi dan modifikasi produk	•	•	•	•	•			•	•	•	•			Bidang Kelitbangan dan PT

7. LEMBAGA PENDANAAN INOVASI

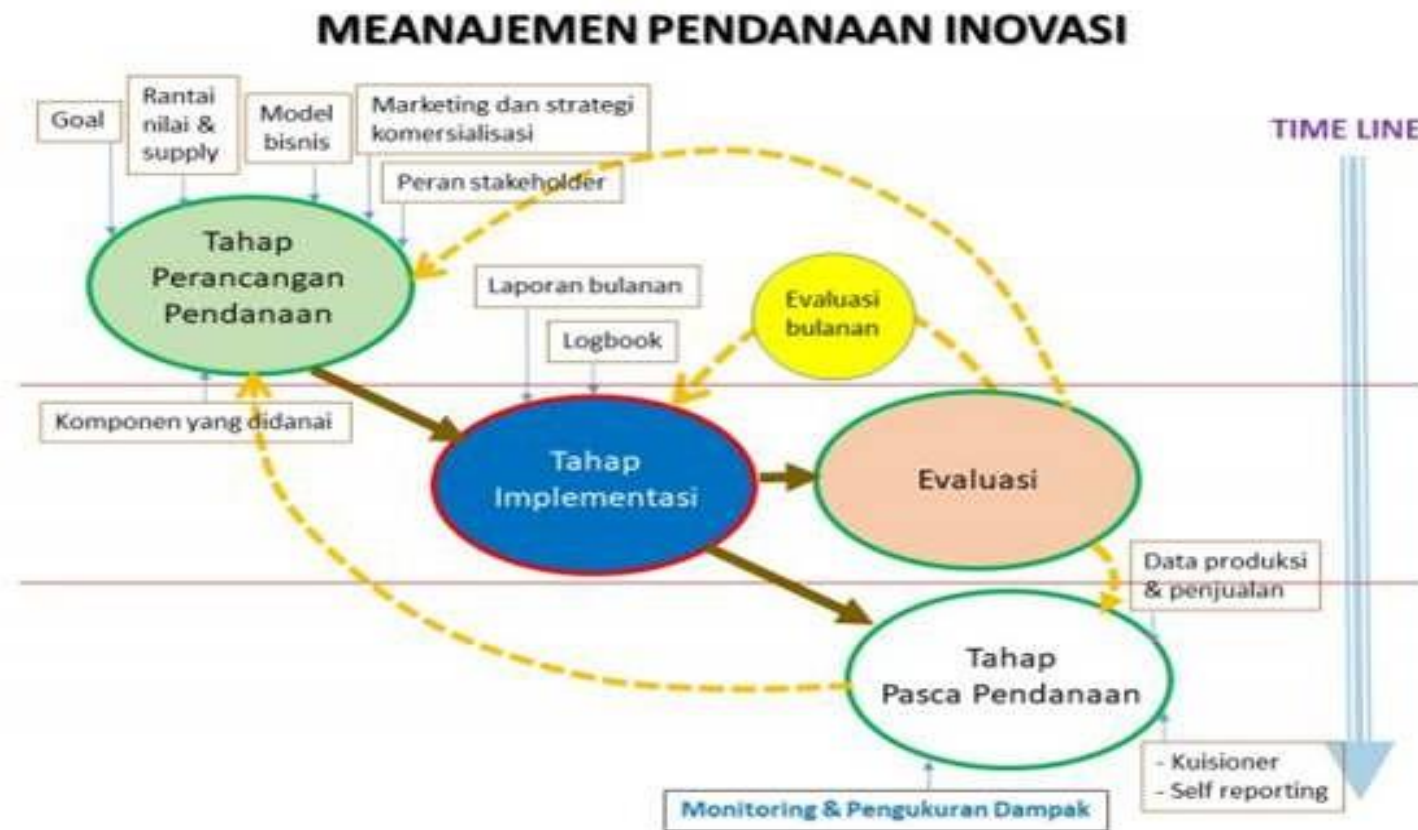
Lembaga Pendanaan Inovasi adalah lembaga yang memberikan fasilitas pendanaan untuk melaksanakan bisnis inovasi. Pengguna lembaga ini adalah grup/klaster riset sektor public dan/atau perusahaan. Fasilitas ini dapat berupa:

- a. *Voucher* paket peningkatan kapasitas,
- b. Hibah (*grant*),
- c. Bantuan subsidi,
- d. Dana bergulir, dan
- e. Pinjaman.

Voucher peningkatan kapasitas dapat berupa serangkaian paket kegiatan komprehensif dan terintegrasi (seperti pelatihan dan konsultasi yang biasanya perlu biaya) yang disediakan secara gratis bagi pengusaha atau calon pengusaha agar dapat memulai menjalankan bisnis inovasi. Hibah dapat diberikan untuk proses produksi dan distribusi berupa pembelian peralatan, bahan baku, atau biaya promosi. Bantuan subsidi diberikan untuk sebagian biaya pembelian mesin produksi dan sebagainya atau membayar biaya bunga pinjaman. Dana bergulir diberikan kepada pengusaha yang mesti dikembalikan untuk jangka waktu tertentu untuk pinjaman pengusaha lainnya dengan tanpa bunga atau bunga yang disubsidi. Pinjaman merupakan bantuan karena menerapkan bunga rendah namun masih menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.

Inovasi tidak hanya suatu pengembangan produk riset dan penciptaan kreatifitas, namun inovasi merupakan suatu produk atau proses yang dapat memberikan manfaat atau kebaruan atau pengembangannya tidak hanya berhenti pada tahap prototype saja, inovasi dituntut menghasilkan sebuah produk atau proses yang mampu bersaing dan punya nilai secara komersial (*commercialization process*), sehingga dampak yang dihasilkan mampu mendorong atau menjadi penggerak perekonomian. Pendanaan inovasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan inovasi teknologi di Indonesia. Dengan pemberian pendanaan yang tepat dapat diputuskan strategi untuk mengakselerasi proses hilirisasi hasil penemuan dan memecah penghambat-penghambat yang menjadi penyebab gagalnya proses inovasi. Secara umum langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi didalam menjalankan manajemen pendanaan inovasi mengacu pada tiga tahap yakni: 1) Tahap

Perancangan Pendanaan; 2) Tahap Implementasi; dan 3) Tahap Pasca Pendanaan; sebagaimana digambarkan dalam bagan 2 di bawah ini.



Gambar 3. Tahapan Manajemen Pendanaan Inovasi

TAHAPAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI LEMBAGA PENDANAAN INOVASI

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	IDENTIFIKASI DAN PERSIAPAN															
1.	Perencanaan dan persiapan lembaga Pendanaan Inovasi	Pembentukan kelompok kerja	•						•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyediaan lahan lokasi	•							•					•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan master plan, rencana bisnis, studi kelayakan	•						•		•				•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peluncuran <i>soft launching</i>	•						•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penyusunan <i>detail engineering design</i> (DED)		•					•		•					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Pembangunan infrastruktur		•					•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
																ngan dan Aset Daerah
		Penandatanganan MoU <i>stakeholders</i> (Lembaga keuangan, CSR, Pusat, Provinsi)		•						•	•		•			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Pendirian dan pembentukan lembaga Pendanaan Inovasi	d. Pengembangan kelembagaan UPTD pengelola lembaga Pendanaan Inovasi		•						•			•			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		e. Pembentukan koperasi		•				•	•	•	•	•	•	•		Dinas Koperasi & UMKM
4.	Pembangunan infrastruktur lembaga Pendanaan Inovasi	e. Pembangunan prasarana/infrastruktur		•				•								Pemkab, Dinas PU, PDAM, PLN
		f. Penempatan dan pelatihan SDM pengelola		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas TK & Perindustrian
		g. Penyediaan sarana kantor, produksi, QA, dan promosi		•				•		•						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		h. Penyediaan fasilitas diklat, laboratorium R&D, inovasi, dan pendanaan		•				•		•						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Pengadaan system,	d. Pengadaan sistem pendanaan Inovasi		•				•		•						Badan Pengelolaan Keua

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
	perkantoran, dan fasilitas lembaga Pendanaan Inovasi															ngan dan Aset Daerah
		e. Pengadaan peralatan perkantoran		•				•		•						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		f. Pengadaan fasilitas lembaga Pendanaan Inovasi		•				•		•						Pemkab
6.	Pengadaan dan pengembangan SDM	d. Pengadaan dan Pengembangan SDM UPTD		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas TK &Perindustrian
		e. Pengembangan SDM Koperasi		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi
		f. Pengembangan SDM Manajemen dan Produksi IKM		•				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas TK &Perindustrian
B.	PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LEMBAGA PENDANAAN INOVASI															
7.	Penyusunan program peningkatan permodalan	1. Membuat proposal bisnis			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. Peningkatan akses perbankan			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Peningkatan akses non-bank		•	•			•	•	•				•	•	Badan Pengelolaan Keua

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
																ngan dan Aset Daerah
8.	Penyusunan Program dan menjalin kerja sama dengan pengusaha terkait	1. Menyusun strategi Pendanaan Inovasi yang berkelanjutan			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		2. penyusunan kebijakan pendanaan inovasi produk	•	•						•	•	•				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3. penyusunan rancang bangun/master plan pendanaan Inovasi produk dan kelembagaan	•	•						•	•					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
C.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN															
7	Pengembangan Inovasi Produk	7. Pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian pendanaan inovasi produk unggulan daerah		•	•	•	•	•	•	•	•		•			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		8. Pembinaan Pendanaan inovasi produk dengan lembaga keuangan		•	•	•	•	•	•	•	•		•			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		9. Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan besar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		10. Membangun kerjasama investasi	•	•	•	•	•	•	•		•				•	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4.4 RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SIDA LEVEL MESO PROGRAM

Pada level meso, ada beberapa implementasi program pendukung inovasi yang dapat di implementasikan di daerah. Hanya saja pada saat implementasinya dapat dilakukan pada program OPD atau menggunakan dan terintegrasi dengan program dari lembaga lain (Perguruan Tinggi dan lembaga kelitbangan). Tabel 4.13 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Program yaitu level program pendukung inovasi yang terdiri dari program-program, sebagai berikut:

1. Implementasi Skema Pembiayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Sains, Teknologi dan Inovasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Implementasi Program Riset Dasar terkait dengan produk unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Implementasi Program Riset Terapan terkait dengan produk unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
4. Implementasi Skema Pendanaan Bersama terkait dengan produk unggulan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Implementasi Upaya Pendampingan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Sains, Teknologi dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
6. Implementasi Dukungan Kewirausahaan Sains, Teknologi dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
7. Implementasi Program Pengembangan Klaster Sains, Teknologi dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
8. Implementasi Fasilitas Internasional Sains, Teknologi dan Inovasi Kabupaten Pesisir Selatan
9. Pelaporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Program pendukung Inovasi

Rencana Aksi Umum Level Meso (Program Pendukung Inovasi)

Tabel 13. Rencana Aksi Umum Level Meso (Program Pendukung Inovasi)

	C.	Kebijakan: Peningkatan Kematangan Level Meso (Program Pendukung Inovasi)				
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	Output	Outcome
		1.	Implementasi Skema Pembiayaan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Terimple-mentasinya Skema Pembiayaan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Proker dan RAB penerapan dan pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB penerapan dan pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	
		2.	Implementasi Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	Terimple-mentasinya Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Proker dan RAB Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	
		3.	Implementasi Program Riset Terapan Produk unggulan/prioritas	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah	Terimple-mentasinya Program Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan

			s daerah Kabupaten Pesisir Selatan	b. Penyusunan Proker dan RAB Program Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB Program Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah	
		4.	Implementasi Skema Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah	Terimplementasinya Skema Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Proker dan RAB Skema Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB Skema Pendanaan Bersama Produk unggulan/prioritas daerah	
		5.	Implementasi Upaya Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Terimplementasinya Upaya Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Proker dan RAB Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	
		6.	Implementasi Dukungan Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	Terimplementasinya Dukungan Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Proker dan RAB Program Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	Dokumen Proker dan RAB Program Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	

			Kabupaten Pesisir Selatan			
		7.	Implementasi Program Pengembangan Klaster Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pengembangan Klaster Industri Pertanian b. Penyusunan Proker dan RAB Program Pengembangan Klaster Industri Pertanian	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Pengembangan Klaster Industri Pertanian Dokumen Proker dan RAB Program Pengembangan Klaster Industri Pertanian	Terimple-mentasinya Program Pengembangan Klaster Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan 5-74
		8.	Implementasi Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan	a. Identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah b. Penyusunan Proker dan RAB Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	Hasil identifikasi kondisi aktual dan ideal pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah Dokumen Proker dan RAB Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	Terimple-mentasinya Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		9.	Pelaporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Program Inovasi	Penyusunan laporan Program Pelaksanaan Inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen laporan Program Pelaksanaan Inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Meso Program Inovasi untuk tahun berikutnya

Rencana Aksi Detail Level Meso (Program Pendukung Inovasi);**1. Implementasi pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)**

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	1. Menyusun JUKLAK dan JUKNIS serta SOP	•					•	•	•	•	•	•	•	•	OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		2. Pengumpulan data dan informasi kondisi inovasi produk Kabupaten Pesisir Selatan	•	•						•		•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		3. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•		•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		b. Studi komparatif / brainstorming	•	•							•					

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	a. Penyusunan analisis gap	•	•						•		•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		b. Penyusunan <i>grand design</i> (fokus program) pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan		•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		c. Penyusunan proposal pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•					OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
B.	PENYUSUNAN PROKER DAN RAB			•	•											
1.	Penyusunan Proker penerapan dan pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	a. Persiapan dan Pengorganisasian pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)	•	•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)	•	•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		c. Penyusunan Rancangan Renja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)	•	•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)	•							•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		e. Rapat Kerja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)	•							•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)			•	•					•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)	
g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi)		•	•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)	
2.	Penyusunan RAB penerapan dan pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	b. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi		•						•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		c. Penyusunan RAB penerapan dan pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)
		d. Penyusunan proposal penerapan dan pengembangan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				OPD Terkait (Dinas Pertanian dan Pariwisata)

2. Implementasi Program Riset Dasar terkait Produk Unggulan/prioritas Daerah

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan Riset Dasar produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data base dan informasi kondisi aktual pengembangan riset dasar tentang produk-produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•		•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi pengembangan riset dasar tentang produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan Riset Dasar produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal riset dasar	•	•						•		•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Studi komparatif / brainstorming	•	•						•						Bidang Kelitbangan Bappeda)
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Dasar produk unggulan/prioritas daerah	a. Penyusunan analisis gap	•	•						•		•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan <i>grand design</i> (fokus program) pengembangan riset dasar Produk unggulan/prioritas daerah		•						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		c. Penyusunan proposal pengembangan riset dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•					Bidang Kelitbangan Bappeda
B.	PENYUSUNAN PROKER DAN RAB			•	•						•	•	•			
1.	Penyusunan Proker Program Riset Dasar produk unggulan/prioritas daerah	a. Persiapan dan Pengorganisasian Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		c. Penyusunan Rancangan Renja Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah		•	•					•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		e. Rapat Kerja Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah		•						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab		
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD	
		g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda	
2.	Penyusunan RAB Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda	
		b. Penyusunan RAB Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•	•							•		•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		c. Penyusunan proposal Program Riset Dasar Produk unggulan/prioritas daerah	•	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda

3. Implementasi Program Riset Terapan Produk unggulan/prioritas daerah Pesisir Selatan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi aktual pengembangan riset terapan Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi pengembangan riset terapan Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•					Bidang Kelitbangan Bappeda
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal riset terapan Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•	•	•		Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Studi komparatif / brainstorming		o						•						Bidang Kelitbangan Bappeda
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan Riset Terapan	a. Penyusunan analisis gap		o						•						Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan <i>grand design</i> (fokus program) pengembangan riset terapan produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		c. Penyusunan proposal pengembangan riset terapan produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
B.	PENYUSUNAN PROKER DAN RAB															

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
1.	Penyusunan Proker Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	a. Persiapan dan Pengorganisasian Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•	•			Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•	•			Bidang Kelitbangan Bappeda
		c. Penyusunan Rancangan Renja Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•	•			Bidang Kelitbangan Bappeda
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•	•			Bidang Kelitbangan Bappeda
		e. Rapat Kerja Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	•	•	•	•				•	•					Bidang Kelitbangan Bappeda
		f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah		•	•					•	•	•	•			Bidang Kelitbangan Bappeda
		g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah		•							•					Bidang Kelitbangan Bappeda
2.	Penyusunan RAB Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda
		b. Penyusunan RAB Program Riset Terapan produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang Kelitbangan Bappeda

5. Implementasi Upaya Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk Unggulan/prioritas Daerah Pesisir Selatan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi aktual pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		b. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		b. Studi komparatif / Brainstorming		•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	a. Penyusunan analisis gap		•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		b. Penyusunan grand design (fokus program) pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) produk unggulan/prioritas daerah		•						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		c. Penyusunan proposal pengembangan Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		d. Penguatan kerjasama dengan lembaga terkait Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•	•	•	•	Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
B.	PENYUSUNAN PROKER DAN RAB															
1.	Penyusunan Proker Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan	a. Persiapan dan Pengorganisasian Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan,	•							•	•	•				Bidang kelitbangan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah														dan Perguruan Tinggi
		c. Penyusunan Rancangan Renja Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	0						•	•	•				Bidang kelitbangan dan Perguruan Tinggi
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi
		e. Rapat Kerja Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•						•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi
		f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah		•						•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi
		g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah		•						•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi
2.	Penyusunan RAB Program Pendampingan	a. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi	•	•						•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	b. Penyusunan RAB Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•							•	•	•				Dinas Pertanian &Perguruan Tinggi
		c. Penyusunan proposal Program Pendampingan IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan, teknologi dan inovasi) Produk unggulan/prioritas daerah	•	•							•	•				Dinas Pertanian &P. Tinggi

6. Implementasi Dukungan Kewirausahaan Pengembangan Bisnis Produk unggulan/prioritas daerah Pesisir Selatan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan Kewirausahaan untuk pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi aktual pengembangan Kewirausahaan pengembangan bisnis produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Identifikasi wirausaha yang sukses	o	o	o						•	•		•		

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																Dan Perindustrian
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Studi komparatif / Brainstorming		o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Kuliah umum kewirausahaan	o	o	o				•	•	•		•			Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	a. Penyusunan analisis gap		o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Penyusunan grand design (fokus program) pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Penyusunan proposal pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•				Dinas Koperasi,

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		d. Penguatan kerjasama dengan lembaga terkait pengembangan Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm,
B. PENYUSUNAN PROKER DAN RAB																
1.	Penyusunan Proker Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	a. Persiapan dan Pengorganisasian Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Penyusunan Rancangan Renja Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		e. Rapat Kerja Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.	Penyusunan RAB Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi	o	o						•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		b. Penyusunan RAB Program Kewirausahaan Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•	•				Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		c. Penyusunan proposal Program Kewirausahaan Pengembangan bisnis Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•					Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

8. Implementasi Fasilitas Internasional Produk Unggulan/prioritas Daerah Kab.Pesisir Selatan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	IDENTIFIKASI KONDISI															
1.	Identifikasi kondisi aktual pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi aktual pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o				•	•	•	•	•	•	•	•	OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah (Dinas pertanian dan pariwisata)
		b. Penyusunan dokumen pemetaan kondisi pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
2.	Identifikasi kondisi ideal pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengumpulan data dan informasi kondisi ideal pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o					•	•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		b. Studi komparatif / Brainstorming		o						•						OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
3.	Analisis gap kondisi aktual dan ideal pengembangan Fasilitas Internasional Produk	a. Penyusunan analisis gap		o						•						OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		b. Penyusunan grand design (fokus program) pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	unggulan/prioritas daerah	c. Penyusunan proposal pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		d. Penguatan kerjasama dengan lembaga terkait pengembangan Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
B.	PENYUSUNAN PROKER DAN RAB															
1.	Penyusunan Proker Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	a. Persiapan dan Pengorganisasian Program Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		b. Penyusunan Rancangan Awal Program Kerja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o							•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		c. Penyusunan Rancangan Renja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		d. Penyusunan Rancangan Program Kerja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		e. Rapat Kerja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o	o						•	•	•	•	•	•	OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								Penanggung Jawab
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
		f. Penyusunan Rancangan Akhir Program Kerja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah		o						•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		g. Penyiapan dan Penetapan Peraturan Program Kerja Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o							•						OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
2.	Penyusunan RAB Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	a. Pengintegrasian Program Kerja ke dalam Proses Penganggaran Organisasi		o				•	•	•	•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		b. Penyusunan RAB Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o							•						OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah
		c. Penyusunan proposal Fasilitas Internasional Produk unggulan/prioritas daerah	o								•					OPD yang terkait dengan produk unggulan daerah

4.4 RENCANA AKSI DETAIL PENINGKATAN KEMATANGAN SIDA LEVEL MIKRO

Tabel 4.14 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Peningkatan Kematangan SIDA Level Mikro yaitu level program kapasitas Inovasi yang terdiri dari program-program, sebagai berikut:

1. Peningkatan peran universitas/PT dalam Peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan/prioritas daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Peningkatan peran Institusi Riset Dasar
3. Peningkatan peran Institusi Riset Terapan Peningkatan peran Inovator-inovator dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peningkatan peran Investor Swasta
5. Peningkatan peran Wirausahawan
6. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) Peningkatan peran Industri Besar
7. Pelaporan Monev Program

Rencana Aksi Umum Level Mikro

D. Kebijakan: Peningkatan Kematangan Level Mikro (Kapasitas Inovasi)					
	No.	PROGRAM	KEGIATAN	Output	Outcome
	1.	Peningkatan peran universitas/PT dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan Mou dan MoA dengan PT	Tersedianya MoU dan MoA dengan PT	Meningkatnya peran universitas dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Peningkatan kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Meningkatnya kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	
			c. Peningkatan kerjasama diklat SDM dan teknologi produksi	Meningkatnya kerjasama diklat SDM dan teknologi produksi	
			d. Kerjasama <i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i>	Meningkatnya kerjasama <i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i>	
	2.	Peningkatan peran Institusi Riset Dasar dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan Mou dan MoA dengan lemlit-lemlit dasar	Tersedianya MoU dan MoA dengan lemlit-lemlit dasar	Meningkatnya peran Institusi Riset Dasar dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Peningkatan kerjasama Penelitian dan Inovasi	Meningkatnya kerjasama Penelitian dan Inovasi	
	3.	Peningkatan peran Institusi Riset Terapan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan Mou dan MoA dengan lembaga litbang terapan dan/atau swasta	Tersedianya MoU dan MoA dengan lembaga litbang terapan dan/atau swasta	Meningkatnya peran Institusi Riset Terapan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Peningkatan kerjasama Pengembangan dan Inovasi	Meningkatnya kerjasama Pengembangan dan Inovasi	
	4.	Peningkatan peran Inovator-inovator dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Kelompok Inovator	Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan Kelompok Inovator	Meningkatnya peran Inovator-inovator dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
			b. Peningkatan kerjasama Pengembangan dan Inovasi	Meningkatnya kerjasama Pengembangan dan Inovasi	
	5.		a. Penerbitan MoU dan MoA dengan asosiasi investor	Tersedianya MoU dan MoA dengan asosiasi investor	

			Peningkatan peran Investor Swasta dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	b. Peningkatan kerjasama investasi	Meningkatnya kerjasama investasi	Meningkatnya peran Investor Swasta dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
		6.	Peningkatan peran Wirausahawan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan MoU dan MoA dengan asosiasi pengusaha	Tersedianya MoU dan MoA dengan asosiasi pengusaha	Meningkatnya peran Wirausahawan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Peningkatan kerjasama pengembangan usaha dan kompetensi pengusaha	Meningkatnya kerjasama pengembangan usaha dan kompetensi pengusaha	
		7.	Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan MoU dan MoA dengan UKM/IKM	Tersedianya MoU dan MoA dengan UKM/IKM	Meningkatnya peran Wirausahawan dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Pengembangan usaha (bahan baku, akses permodalan, SDM, manajemen, teknologi, produksi, dan pemasaran) UKM/IKM	Berkembangnya usaha (bahan baku, akses permodalan, SDM, manajemen, teknologi, produksi, dan pemasaran) UKM/IKM	
		8.	Peningkatan peran Industri Besar dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan MoU dan MoA dengan industri-industri besar	Tersedianya MoU dan MoA dengan industri-industri besar	Meningkatnya peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dalam SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Peningkatan CSR pembinaan UKM/IKM	Meningkatnya CSR pembinaan UKM/IKM	
				c. Peningkatan pasokan bahan baku dari atau pemasaran ke industri besar	Meningkatnya pasokan bahan baku dari atau pemasaran ke industri besar	
		9.	Pelaporan Monev Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Mikro	Penyusunan laporan Program Peningkatan Kapasitas Inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan Program Peningkatan Kapasitas Inovasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	Program Peningkatan Kematangan SIDA Level Mikro untuk tahun berikutnya

RENCANA AKSI DETAIL SIDA PADA LEVEL MIKRO

Determinan-determinan (faktor penentu) Level Mikro terdiri dari delapan aktor pelaksana inovasi. Kedelapan aktor inovasi ini dikerahkan untuk melaksanakan inovasi dan bisnisnya melalui suatu kerjasama yang dinaungi oleh kesepakatan bersama dalam bentuk MoU. Aktor-aktor pelaksana ini memberikan kontribusi dengan memiliki program, dan tugas pokok dan fungsi di dalam Sistem Inovasi Daerah Pesisir Selatan. Kedelapan aktor inovasi tersebut adalah:

1. Universitas

Universitas adalah perguruan tinggi yang melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tiga dharma ini universitas dengan kapasitasnya sanggup untuk menghasilkan lulusan (vokasi, akademik S1, S2 dan S3, serta profesi) sebagai sumber daya manusia yang berkompetensi dan diperlukan masyarakat dan dunia kerja, inovasi dan inovasi. Di dalam sistem inovasi, universitas berperan menghasilkan SDM dan produk, teknologi, dan proses inovatif. Keterlibatannya : pelatihan, Penelitian, pengabdian, inovasi, sdm dan teknologi serta jaringan yang dimiliki Perguruan tinggi.

RENCANA AKSI DETAIL LEVEL MIKRO

1. PERAN UNIVERSITAS

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
A.	Peningkatan peran universitas/PT dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan Mou dan MoA dengan PT	Sosialisasi peranan universitas bagi Kabupaten Pesisir Selatan	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Sekda dan Bappeda
		FGD tentang Topik-topik peranan universitas pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o	o					•	•						Sekda dan Bappeda
		Penandatanganan MoU dan MoA dengan Perguruan tinggi	o						•	•						Sekda dan Bappeda
		Pelaksanaan kerja sama : Universitas Industri	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		Monev kerja sama		o				•								Bappeda
2.	Peningkatan kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	membangun kerjasama hasil litbang dengan pihak industri/UKM (stakeholder)		o						•	•		•			Bappeda
		sosialisasi inovasi dari hasil penelitian perguruan tinggi yang terkait dengan produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan		o						•			•			Bappeda Perguruan tinggi
		membangun kerjasama hasil penelitian universitas		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda Perguruan tinggi
3.	Peningkatan kerjasama diklat	Membangun kerjasama pendidikan dan pelatihan SDM		o				•								Badan Kepegawaian Dan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							Penanggung Jawab	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
	SDM dan teknologi produksi															Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Membangun kerjasama diklat teknologi		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Kerjasama quality assurance dan quality control	Kerjasama quality assurance : perencanaan mutu sertifikasi ISO audit sistem manajemen		o	o			•		•	•	•				Dinas TK Dan Perindustrian
		Kerjasama quality control : <i>inspection</i> pada process <i>manufacturing</i> <i>Penyusunan</i> laporannya		o	o			•		•	•	•				Dinas TK Dan Perindustrian
5.	Pengadaan dan pengembangan SDM	Seleksi Pegawai di lingkungan Pemkab dan seleksi peserta program pemberdayaan masyarakat		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Institusi Riset Dasar

Institusi Riset Dasar adalah satuan atau unit yang melaksanakan berbagai riset dasar terutama untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan-pertanyaan fenomena dasar alam dan sosial. Penelitiannya umumnya bersifat berskala laboratorium dan outputnya berupa penemuan (*discovery*) atau teori. *Discovery* dapat digunakan untuk menghasilkan invensi produk atau proses terapan tertentu yang baru atau yang lebih baik. Biasanya, pemerintah melaksanakan riset-riset dasar ini. Di dalam sistem inovasi, Institusi Riset Dasar melaksanakan penelitian dasar. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan institusi riset dasar dalam SIDA Pesisir Selatan.

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
A.	Peningkatan peran Institusi Riset Dasar dalam Peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan/prioritas daerah di Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan Mou dan MoA dengan lemlit-lemlit dasar	1. Sosialisasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	o	o				•	•	•	•	•	•	•	•	Pemkab
		2. FGD tentang Topik-topik peranan institusi riset dasar pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o	o						•						Bappeda
		3. Penandatanganan MoU dan MoA dengan lemlit-lemlit dasar	o	o					•	•	•	•				Pemkab
		4. Pelaksanaan kerja sama : a. Lembaga penelitian b. Industri	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		5. Monev kerja sama		o				•	•	•	•					Bappeda
2.	Peningkatan kerjasama Penelitian dan Inovasi	4. Pengumpulan Data Hasil Litbang		o						•	•		•			Bappeda
		5. Kegiatan Diseminasi dan Promosi		o						•			•			Disperindag
		6. Penyusunan Laporan		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		7. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.														Disperindag & Pertanian

3. Institusi Riset Terapan

Institusi Riset Terapan adalah satuan atau unit yang melaksanakan berbagai riset terapan berdasarkan temuan *discovery* atau invensi sebelumnya, terutama untuk memberikan solusi dari berbagai persoalan teknologi dan pemanfaatannya. Penelitiannya umumnya bersifat berskala satu banding satu (prototipe) dan bahkan skala produksi dan outputnya adalah invensi dan bahkan inovasi. Hasil riset terapan dapat dikembangkan menjadi skala difusi dan komersialisasi. Di dalam sistem inovasi, Institusi Riset Terapan melaksanakan penelitian terapan. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan institusi riset terapan dalam SIDA Pesisir Selatan.

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
A.	Peningkatan peran Institusi Riset Terapan dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan Mou dan MoA dengan lembaga litbang terapan dan/atau swasta	1. Sosialisasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		2. FGD tentang Topik-topik peranan lembaga kelitbangan untuk peningkatan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	o							•						Bappeda
		3. Penandatanganan MoU dan MoA dengan Perguruan tinggi	o					•								Bappeda
		4. Pelaksanaan kerja sama : a. Perguruan Tinggi b. Industri	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		5. Monev kerja sama		o				•		•						Bappeda
2.	Peningkatan kerjasama Pengembangan dan Inovasi	1. Pengumpulan jumlah basis data inovasi Hasil Litbang		o						•	•		•			Bidang Kelitbangan di Bappeda
		2. Kegiatan Diseminasi dan Promosi		o						•			•			Bidang Kelitbangan di Bappeda
		3. Penyusunan Laporan		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda
		4. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Bidang Kelitbangan di Bappeda

4. Inovator-inovator

Inovator adalah seseorang atau kelompok yang pertama kali memperkenalkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya atau baru sama sekali. Para innovator menerapkan penemuan dasar (*discovery* atau invensi) untuk menghasilkan produk atau proses terapan tertentu. Inovasi produk adalah pengembangan produk atau jasa baru atau yang lebih baik, sedangkan inovasi proses mengacu pada metode atau distribusi yang baru atau yang lebih baik. Dengan inovasi, suatu produk atau proses yang baru atau yang lebih baik akan menghasilkan keuntungan dan manfaat yang lebih baik. Dibandingkan dengan penemu *discovery* dan/atau inventor, para inovator harus mampu membuat produknya masuk ke dalam pasar komersial. Di dalam sistem inovasi, para inovator menghasilkan inovasi produk dan proses. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB inovator dalam SIDA Pesisir Selatan.

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
A.	Peningkatan peran Inovator-inovator dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Kelompok Inovator	1. Sosialisasi Peranan DRD bagi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		2. FGD tentang Topik-topik peranan DRD pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o							•						Bappeda
		3. Penandatanganan MoU dan MoA dengan DRD	o					•								Bappeda
		4. Pelaksanaan kerja sama : a. DRD b. Pemkab	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda
		5. Monev kerja sama		o				•		•						Bappeda
2.	Peningkatan kerjasama Pengembangan dan Inovasi	1. Pengumpulan Data Hasil Litbang		o						•	•		•			Bappeda & Disperindag
		2. Kegiatan Diseminasi dan Promosi		o						•			•			Bappeda & Disperindag
		3. Penyusunan Laporan		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Bappeda & Disperindag
		4. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.														Bappeda & Disperindag

5. Investor Swasta

Investor swasta adalah seseorang atau kelompok yang mampu mengerahkan sumberdaya untuk melaksanakan usaha yang potensial atau sudah terbukti menguntungkan secara komersial. Usaha atau bisnis ini dapat terkait bagaimana mengubah penemuan, invensi, difusi, dan produk kepada keuntungan. Di dalam sistem inovasi, investor berperan membantu investasi dan melaksanakan usaha. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB investor swasta dalam SIDA Pesisir Selatan.

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	Peningkatan peran Investor Swasta dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan MoU dan MoA dengan asosiasi investor	Sosialisasi peranan investor di Kabupaten Pesisir Selatan	o						•	•	•	•	•	•	•	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		FGD tentang Topik-topik peranan investor pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o							•						BKD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Penandatanganan MoU dan MoA dengan investor	o						•							Dinas Penanaman Modal

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Pelaksanaan kerja sama : a. Investor b. IKM	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Monev kerja sama		o				•								Bappeda
2.	Peningkatan kerjasama investasi	1. Pengumpulan Data Investasi		o						•	•		•			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		2. Kegiatan sosialisasi peluang investasi di Kabupaten Pesisir Selatan		o						•			•			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
		3. Menjalinkan kerjasama dengan investor		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		4. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

6. Wirausahawan

Wirausahawan adalah seseorang atau kelompok yang mampu memimpin, mengelola, dan melaksanakan usaha yang menguntungkan secara komersial. Usaha menguntungkan disini adalah melaksanakan produksi atau menghasilkan produk yang dapat diterima pasar. Di dalam sistem inovasi, wirausahawan selalu memiliki bisnis dengan produksi dan produk yang inovatif. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB wirausahaan dalam SIDA Pesisir Selatan.

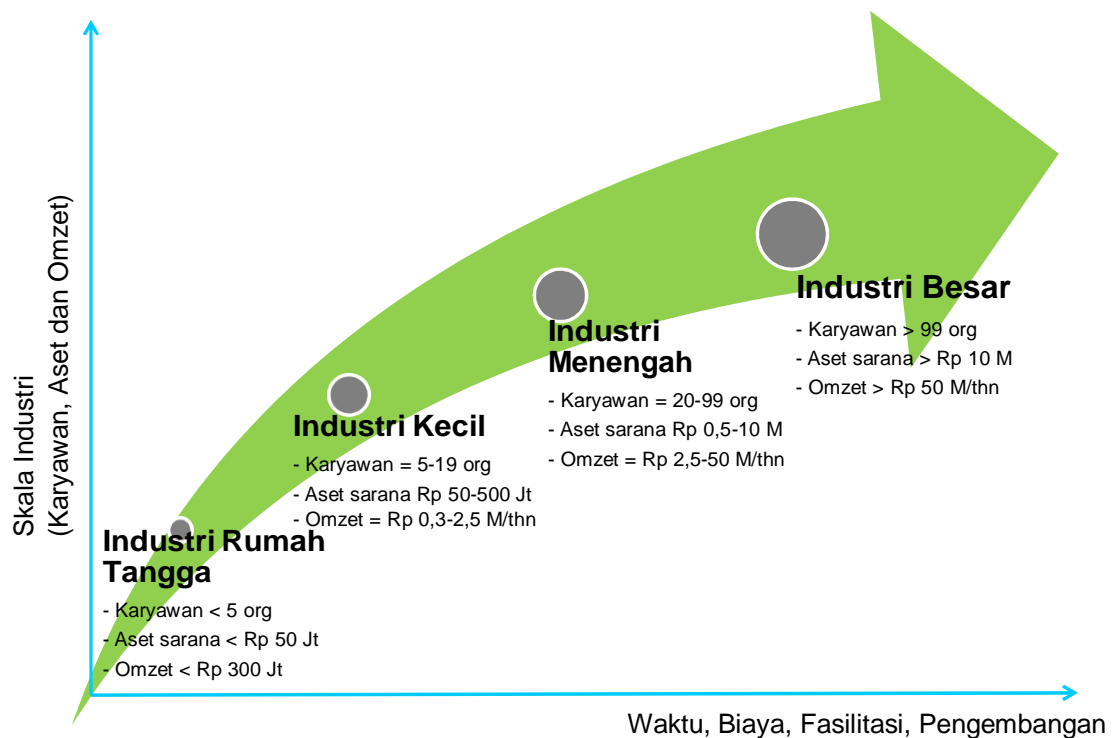
NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	Peningkatan peran Wirausahawan dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan MoU dan MoA dengan asosiasi pengusaha	Sosialisasi peranan pengusaha bagi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		FGD tentang permasalahan dunia usaha di Kabupaten Pesisir Selatan	o							•						Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		Penandatanganan MoU dan MoA dengan asosiasi pengusaha	o					•								Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
																Dan Perindustrian
		Pelaksanaan kerja sama : a. Pengusaha b. Pemkab c. Universitas	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		Monev kerja sama		o				•								Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
2.	Peningkatan kerjasama pengembangan usaha dan kompetensi pengusaha	1. Penambahan jejaring kerjasama dengan perusahaan besar		o						•	•		•			Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		2. Pelatihan dan pendidikan teknis usaha pengembangan produk		o						•			•			Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		3. Pelatihan Kewirausahaan		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi,

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								
	TAHAPAN	KEGIATAN	2023	2024	2025	2026	2027	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	OPD
																Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian
		4. Pelatihan dan pendidikan IPTEK														Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian

7. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM adalah perusahaan melaksanakan komersialisasi produk-produk. Di dalam sistem inovasi, UKM melaksanakan nilai tambah dan distribusi produk, bahan baku, dan komponen. UKM yang melaksanakan nilai tambah disebut dengan IKM. UKM ini memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, memiliki aset sarana sampai Rp 10 Miliar dan omzet sampai Rp. 50 Miliar/tahun. Dengan inovasi, usaha akan memiliki daya saing secara berkelanjutan. IKM akan tetap berdaya saing melalui difusi teknologi dari inovasi yang diterapkan untuk komersial. Di dalam SIDA, UKM/IKM bertindak, baik sebagai aktor maupun sebagai usaha yang dikembangkan oleh SIDA (lihat Gambar 5.6). Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan UKM dalam SIDA Pesisir Selatan.



Gambar L2.8 Pengembangan UKM/IKM Melalui Intervensi Kebijakan dan Regulasi, Kelembagaan dan Program Pengembangan, Serta *Capacity Building*

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2032	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan MoU dan MoA dengan UKM/IKM	Sosialisasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi dan UMKM
		FGD tentang Topik-topik peranan UKM/IKM pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o							•						Dinas Koperasi dan UMKM
		Penandatanganan MoU dan MoA dengan UKM/IKM	o					•								Dinas Koperasi dan UMKM
		Pelaksanaan kerja sama : a. Kerjasama dengan Dinas Kop UKM, Disperindag, Dinas Pertanian dan Sentra IKM b.	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi dan UMKM
		Monev kerja sama		o				•								Dinas Koperasi dan UMKM
2.	Pengembangan usaha (bahan baku, akses permodalan, SDM, manajemen, teknologi, produksi, dan pemasaran) UKM/IKM	1. Pelaksanaan program Inkubasi bagi UKM terpilih		o						•	•		•			Dinas Koperasi dan UMKM
		2. Penyiapan bahan baku		o						•			•			Dinas Koperasi dan UMKM
		3. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Dinas Koperasi dan UMKM

8. Industri Besar

Industri besar dalam sistem inovasi berperan sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh dan pengguna produk-produk yang dihasilkan dari IKM dan juga sebagai pemberdaya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bagi para IKM, serta sebagai pengadopsi produk atau proses inovatif. Untuk keterlibatan yang terarah perlu disusun rencana aksi khusus dan RAB peranan Industri Besar dalam SIDA Pesisir Selatan.

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA							OPD	
	TAHAPAN	KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2032	Pusat	Prov	Kabupate n	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.		CSR
A.	Peningkatan peran Industri Besar dalam SIDA Pesisir Selatan															
1.	Penerbitan MoU dan MoA dengan industri-industri besar	1. Pembentukan kelompok Kerja CSR	o						•	•	•	•	•	•	•	Disperindang
		2. Penetapan SK	o							•						Disperindang
		3. Penyusunan perencanaan kerjasama	o							•	•	•				Disperindang
		4. Sosialisasi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan	o							•	•					Disperindang
		5. FGD tentang Topik-topik peranan industri besar pada peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan.	o	o						•						Disperindang
		6. Penandatanganan MoU dan MoA dengan industri besar	o							•			•		•	Disperindang
		7. Pelaksanaan kerja sama	o	o	o	o	o	•	•	•	•	•	•	•	•	Disperindang
		8. Monev kerja sama		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Disperindang
2.	Peningkatan CSR pembinaan	1. Penyusunan proposal	o	o						•	•	•	•			Disperindang
		2. Pengajuan proposal dan audiensi	o	o							•	•	•	•		Disprindang

NO	RENCANA AKSI		TAHUN					PELAKSANA								OPD
	TAHAPAN	KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2023	Pusat	Prov	Kabupaten	PT	Lemlit	IKM	Lemb. Keu.	CSR	
3.	UKM/IKM UKM/IKM	3. Pelaksanaan kegiatan sesuai prop yg dinanai		o					•	•	•		•			Disperindang
		4. Monev		o				•	•	•	•	•	•	•	•	Disperindang
		5. Pelaporan bantuan CSR	o							•		•				Disperindang
	Peningkatan pasokan bahan baku dari atau pemasaran ke industri besar	1. Penyusunan proposal tentang pasokan bahan baku	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Disperindang
		2. Penyusunan proposal tentang pemasaran bahan baku	o					•	•	•	•	•	•	•	•	Disperindang

BAB V

RENCANA DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA

Kondisi SIDA yang kuat (*strengthened*) sesuai dengan kriteria Peraturan Bersama Menristek Nomor 3 dan Mendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah apabila secara pengelolaan, faktor-faktor dan aktor-aktor SIDA telah eksis dan terimplementasikan secara terarah, terintegrasi, komprehensif, berpenjaminan mutu, dan berkelanjutan. Secara teknis pelaksanaannya, SIDA yang kuat menurut peraturan bersama menteri itu apabila telah memiliki dan menjalankan kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA, pengembangan SIDA, tim koordinasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan.

Untuk mendirikan dan/atau memperkuat SIDA diperlukan konsep dasar yang jelas dan dapat diimplementasikan. Pada bagian ini dijelaskan konsep dasar Sistem Inovasi Daerah berdasarkan peraturan bersama menteri tersebut.

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama tersebut diatas adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmupengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmupengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah diperlukan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengelolaan inovasi dalam rangka akselerasi peningkatan ekonomi daerah. Ruang lingkup penguatan Sistem Inovasi Daerah meliputi:

- A. Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah,
- B. Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah,
- C. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.

Tabel 5.1

Kondisi Sistem Inovasi Daerah KabupatenPesisir Selatan yang Kuat (Ideal)

No	Aspek Kekuatan SIDA	Belum ada	Ada	Terimple-mentasi	Efektif	Unggul
1.	Komitmen dan kebijakan khusus SIDA di RPJPD, RPJMD, dan RKPD KabupatenPesisir Selatan serta Tim Koordinasi Penguatan SIDA		√	√	√	√
2.	Roadmap Penguatan dan Rencana Aksi Daerah SIDA Kabupaten Pesisir Selatan serta fokus produk unggulan daerah		√	√	√	√
3.	MoU kerjasama SIDA dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha		√	√	√	√
4.	RPJMD berdasarkan Roadmap Penguatan SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek Nomor 03 & 35 tahun 2012		√	√	√	√
5.	RKPD berdasarkan Rencana Aksi SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek Nomor 03 dan 35 tahun 2012.		√	√	√	√
6.	Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar dan Nasional		√	√	√	√
7.	Penataan unsur-unsur SIDA melalui (a). Kelembagaan (lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya), (b). Jaringan (komunikasi antarlembaga, mobilisasi SDM, dan optimalisasi IPTEK), dan (c). Sumber daya (kepakaran, kekayaan intelektual, dan informasi, dan sarpras IPTEK).		√	√	√	√
8.	Pelaksanaan SIDA (tim koordinasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan)		√	√	√	√

No	Aspek Kekuatan SIDA	Belum ada	Ada	Terimplementasi	Efektif	Unggul
9.	Pengembangan SIDA (tahapan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan pemberlanjutan penguatan SIDA)		√	√	√	√

Berikut diuraikan rencana aksi detail SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk melakukan penguatan (strengthening) SIDA. Berdasarkan laporan Roadmap dan Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, disini ditampilkan kembali rencana aksi umum Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan 2022 – 2027 yang terdiri dari berbagai program, kegiatan, jadwal dan pelaksana kegiatan untuk program peningkatan kekuatan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bersama Menristek No.3 dan Mendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Insitusi pelaksana rencana aksi SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai perguruan tinggi (PT) atau universitas, berbagai lembaga penelitian, dan dunia usaha yang terdiri dari (pengusaha, industri, KADIN, bank, lembaga keuangan, dan lainnya).

Rencana Detail SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan berisi program-program dan masing-masing kegiatan-kegiatan beserta tahun, para mitra pelaksana, output dan outcome-nya. Tabel 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 memperlihatkan keseluruhan matriks Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

5.1 RENCANA DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA PADA PEMBENTUKAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel 5.1 memperlihatkan Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Level Komitmen dan Tim Koordinasi dengan program-program sebagai berikut:

1. Pembangunan komitmen SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pembentukan tim koordinasi dan pendukung SIDA Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 5.1

Matriks Aksi Detail Peningkatan Kekuatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

	A.	Kebijakan: Pembentukan Komitmen dan Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan														
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome
					2023	2024	2025	2052	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit		
		1.	Pembangunan komitmen SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan komitmen pimpinan daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Terbangunnya komitmen pimpinan daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	Terbangunnya komitmen SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya
				b. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Terbangunnya komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	
		2.	Pembentukan tim koordinasi dan pendukung SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDA dengan SK Wali Kabupaten											TerbentuknyaTim Koordinasi Penguatan SIDA dengan SK Wali Kabupaten	Terbentuknyati m koordinasi dan pendukung serta DRD
				b. Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dengan SK Wali Kabupaten											TerbentuknyaDewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dengan SK Wali Kabupaten	

5.2 RENCANA DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA PADA PEMBENTUKAN PERENCANAAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel 5.2 memperlihatkan Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Level Perencanaan dengan program-program sebagai berikut:

1. Pemetaan SIDA Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
3. Perluasan Kerjasama Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 5.2
Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Level Perencanaan

	B.	Kebijakan: Perencanaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan														
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome
					2023	2020	2021	2022	2023	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit		
		1.	Pemetaan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pemetaan potensi dan analisis SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Terpetakan potensi dan analisis SIDA	Terpetakan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Laporan pemetaan potensi dan analisis SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Dokumen laporan pemetaan potensi dan analisis SIDA	
		2.	Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penyusunan <i>Road Map</i> Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Dokumen Road Map Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	Terbentuknya Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
				b. Penyusunan Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Dokumen Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	
				c. Penyusunan RPJMD berdasarkan <i>Road Map</i> Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Dokumen RPJMD berdasarkan Road Map Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	
				d. Penyusunan RKPD berdasarkan Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Dokumen RKPD berdasarkan Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	
				e. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi											Terbentuknya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi	

				kebijakan penguatan SIDA											kebijakan penguatan SIDA	
				- Identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;											Hasil identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA;	
				- Analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA											Hasil analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDA	
				- Memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemda dengan pem. pusat untuk penguatan SIDA.											Hasil pemaduan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemda dengan pem. pusat untuk penguatan SIDA.	
		3.	Perluasan Kerjasama Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penerbitan MoU kerjasama SIDA dengan dengan <i>stakeholder</i> (Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha)											Tersedianya MoU kerjasama SIDA dengan dengan stakeholder (Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha)	Semakin luasnya Kerjasama Penguatan SIDA
				b. Penerbitan MoU dengan provinsi dan kabupaten/Kabupaten lain											Tersedianya MoU dengan provinsi dan kabupaten/Kabupaten lain	

5.3 RENCANA DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA PADA PELAKSANAAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel 5.3 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Tahap Pelaksanaan dengan program-program sebagai berikut:

1. Penataan Unsur SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
2. Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
3. Pembinaan dan Pengawasan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pendanaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pelaporan Monev Program Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 5.3
Rencana Detail Penguatan SIDA Pada Level Pelaksanaan

	C.	Kebijakan: Pelaksanaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan															
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome	
					2023	2020	2021	2022	2023	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit			Dunia Usaha
		1.	Penataan Unsur SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, dengan meningkatkan kapasitas dan sinergitas inovasi lembaga:											Tertatanya Kelembagaan SIDA, dengan meningkatkan kapasitas dan sinergitas inovasi lembaga:	Terimple-mentasinya Penataan Unsur SIDA	
				- Membentuk, memperkuat dan mensinergikan kelembagaan SIDA													Terbentuknya, kuat dan sinergisnya kelembagaan SIDA
				- Membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA.													Dokumen peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA.
				- Mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.													Berkembangnya profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.
				b. Penataan Jaringan SIDA, dengan meningkatkan komunikasi, dan mobilisasi dan optimalisasi sumber daya untuk sinergi antar													Tertatanya jaringan SIDA, dengan meningkatkan komunikasi, dan mobilisasi dan optimalisasi sumber daya untuk sinergi antar

				lembaga												lembaga	
				c. Penataan Sumber daya SIDA, dengan meningkatkan daya guna dan nilai gunanya												Tertatanya Sumber daya SIDA, dengan meningkatkan daya guna dan nilai gunanya	
		2.	Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinasi Penguatan SIDA dengan memadukan SIDA dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi Sumbar dan tingkat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Terkoordinasinya Penguatan SIDA dengan memadukan SIDA dengan sistem inovasi nasional di tingkat pusat, tingkat provinsi Sumbar dan tingkat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	Terimplementasinya Koordinasi Penguatan SIDA
		3.	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembinaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Terlaksananya pembinaan Penguatan SIDA	Terimplementasinya Pembinaan dan Pengawasan Penguatan SIDA
				b. Pengawasan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Terlaksananya Pengawasan Penguatan SIDA	
		4.	Pendanaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Terlaksananya Pendanaan Penguatan SIDA	Terimplementasinya Pendanaan Penguatan SIDA
		5.	Pelaporan Monev Program Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Monev Program Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Terlaksananya Monev Program Penguatan SIDA	Dokumen Program Penguatan SIDA untuk tahun berikutnya
				b. Pelaporan Program Penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan												Laporan Program Penguatan SIDA	

5.4 RENCANA DETAIL PENINGKATAN KEKUATAN SIDA PADA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tabel 5.4 memperlihatkan Rencana Aksi Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Tahap Pengembangan dengan program-program sebagai berikut:

1. PengembanganSIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 5.4
Rencana Detail Peningkatan Kekuatan SIDA pada Tahap Pengembangan

D.		Kebijakan: Pengembangan SIDA Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan														
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome
					2023	2020	2021	2022	2023	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit		
		1.	PengembanganSIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Terbangunnya komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa	Terimplementasinya Pengembangan SIDa
				b. Pemetaan potensi, analisis dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan											Terpetakan potensi, analisis dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa	
		2.	Pemberlanjutan penguatan SIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan	a. Pemberlanjutan penguatan SIDa, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa, untuk acuan penyusunan RKPD tahun berikutnya.											Berlanjutnya penguatan SIDa, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa, untuk acuan penyusunan RKPD tahun berikutnya.	Keberlanjutan penguatan SIDa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan

BAB VI

Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Gambir Di Kabupaten Pesisir Selatan

6.1 Pendahuluan

Produk Gambir merupakan salah satu produk andalan di Indonesia, dimana menempati posisi yang sangat penting sebagai produsen gambir terbesar di dunia dengan memasok 80% kebutuhan gambir dunia (Sa'id et al. 2009; Adi 2011; BAPPENAS dan GIZ 2013). Sumatera Barat merupakan sentra gambir terbesar di Indonesia dan mampu memasok 80% hingga 90% dari total produksi gambir nasional (Ermiati 2004; Sa'id et al. 2009; Sa'id 2010). Dengan posisi sebagai negara penghasil terbesar gambir dunia, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani gambir karena keunggulan yang relatif lebih tinggi dari negara lain dalam hal produksi gambir.

Di sisi lain, meskipun Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor gambir terbesar dunia, namun dalam perdagangan internasional India lah yang tercatat sebagai negara pengekspor gambir ke berbagai negara. Hal ini terjadi karena Indonesia hanya mengekspor gambir mentah berupa getah gambir kering ke India. Dengan sedikit pemrosesan atau bahkan tanpa pemrosesan, gambir masyarakat yang mutunya sangat beragam langsung diekspor oleh para eksportir ke India. Selanjutnya India melakukan pemrosesan ulang dan mengekspor.

Permasalahan umum yang terjadi pada saat ini adalah bahwa produk gambir yang dijual petani masih dalam bentuk gambir mentah karena belum memiliki standar kualitas yang jelas, baik standar menurut pasar atau pun standar menurut orientasi kegunaan dan pemakaiannya. Belum ada investor yang mencoba mengelola potensi usaha perkebunan gambir maupun pengolahan pascapanennya. Oleh karena itu, meskipun gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan rakyat yang menjadi produk andalan, namun industri gambir masih tergolong dalam industri rumah tangga

yang dikelola secara tradisional. Produksi gambir yang dilakukan petani produsen dengan menggunakan teknologi dan peralatan sederhana ini menyebabkan produktivitas, mutu serta pendapatan petani masih rendah. Hal ini sesuai dengan Nazir (2000) mengemukakan bahwa sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan gambir salah satunya adalah upaya peningkatan nilai tambah gambir di Indonesia

Adapun kegunaan gambir dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok (Bakhtiar, 2011) :

1. Bahan baku obat seperti untuk obat diare dan obat kumur
2. Bahan kosmetik seperti anti aging, anti acne dan anti ketombe
3. Bahan pada industri makanan dan minuman seperti pengawet, minuman kesehatan, teh dan permen gambir
4. Bahan industri kimia seperti pengawet kayu, lem, anti korosi, tinta, filter AC, bahan tambahan pada pengeboran minyak bumi, zat warna dan zat samak.

Potensi dan Manfaat Tanaman Gambir ini merupakan tanaman serba guna, dan penggunaannya semakin berkembang seiring dengan diketahuinya khasiat tanaman gambir untuk obat alami dan pemanfaatan produk turunannya untuk berbagai industri. Berikut pemanfaatan gambir baik secara tradisional maupun industri (Gumbira, 2009) : a. Bersama pinang dan gambir untuk menginang (tradisi masyarakat Sumatera); b. Bahan baku obat alami dalam pengobatan China seperti ramuan obat diare, disentri, luka bakar, mengobati perdarahan, obat bisul, sariawan, hipertensi, epilepsi, alergi, suara parau, anti bakteri dan anti jamur; c. Obat tukak lambung; d. Baku obat penyakit hati dengan paten “catergen”; e. Bahan baku permen yang melegakan kerongkongan bagi perokok di Jepang karena gambir mampu menetralkan nikotin; f. Bahan dalam industri kosmetik: anti keriput/penuaan dan perawatan rambut rusak; g. Bahan baku untuk menghasilkan astrigen dan lotion yang mampu melembutkan kulit dan menambah kelenturan serta dayaegang kulit; h. Bahan aktif pada pasta gigi dan bio pestisida, bahan baku permen, penjernih air dan juga digunakan pada industri bir; i. Pewarna alami yang tahan terhadap cahaya matahari untuk industri tekstil (mendapatkan warna maroon), industri cat, pewarna kulit samak, pewarna rambut, tinta, dan industri pewarna lainnya; j. Bahan baku

utama perekat kayu lapis dan papan partikel; k. Bahan dalam pembuatan permen khusus pagi perokok yang dapat menetralkan nikotin; l. Peluruh karat; m. Pestisida nabati untuk mengendalikan penyakit layu tanaman cabai dan tomat.

Sebagai Provinsi penghasil utama gambir adalah Sumatera Barat disamping Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Bengkulu. Di negara India gambir digunakan untuk penyegar mulut, campuran pada betel bite (seperti ramuan pada sirih kunyahan di Indonesia) dan bahan pewarna alami pada tekstil. Peningkatan kebutuhan gambir Indonesia oleh India bermula sejak pembatasan penebangan pohon katha di India pada tahun 1992. Pohon katha penghasil katekin sebagaimana yang juga terkandung dalam gambir. Gambir Indonesia sesampai di India diolah kembali untuk tujuan utama peningkatan kandungan katekin.

Usulan untuk perbaikan pengolahan gambir telah banyak disampaikan oleh kalangan akademisi maupun oleh konsultan asing yang pernah bekerja di Sumatera Barat namun tetap belum menampakkan hasil yang maksimal. Sejalan dengan perbaikan cara pengolahan diharapkan sekalian dapat dihasilkan produk gambir kering yang lebih bermutu dan dalam bentuk yang beragam.

Persoalan utama komoditi gambir adalah berfluktuasi harga jual petani. Penyebab dari hal itu adalah ketergantungan pasar ekspor. Sebenarnya gambir dapat dipasarkan dalam negeri sebagai bahan baku industri. Sesuatu yang ironis adalah pemanfaatan tannin mimosa sebagai penyamak kulit pada industri penyamakan kulit yang dikombinasikan dengan bahan penyamak khrom. Padahal mimosa, yang merupakan komoditi impor, dapat digantikan oleh gambir. Disamping itu pemanfaatan gambir dalam negeri sebagai bahan baku industri selain untuk penyamakan kulit dapat dilakukan.

Dengan adanya beberapa permasalahan gambir saat ini, diduga akibat lemahnya sistem inovasi produk gambir, baik dari inovasi di aspek budidaya sampai pada inovasi pemasaran gambir serta kurangnya peran kelembagaan (dalam hal ini organisasi gambir) dalam bidang pemasaran gambir, sehingga diduga sistem inovasi gambir belum efisien. Dengan adanya Sistem Inovasi Daerah maka pada masa datang akan lebih mempercepat pengembangan industri yang berbahan baku gambir

disamping tetap melakukan perbaikan cara pengolahan gambir di tingkat petani gambir.

6.2 Kondisi Agribisnis Gambir Sebagai Produk Prioritas di Kabupaten Pesisir Selatan

luas lahan gambir di kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan mencapai 14.313 hektare dengan total produksi tahun 2017 sebanyak 6.798,6 ton. Rata-rata capaian produksi gambir di Kab.Pesisir selatan adalah sebesar 75,68%. Tidak tercapainya target produksi gambir di Kabupaten Pesisir Selatan karena turunnya harga gambir 3 (tiga) tahun terakhir ini sampai harga terendah Rp. 18.000/kg, sehingga menurunkan minat petani untuk melakukan pemanenan getah gambir. Turunnya minat petani dalam melakukan pemanenan akan menurunkan jumlah produksi getah gambir.

Rata-rata capaian produktivitas gambir adalah sebesar 69,77%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 0,80 ton/ha terealisasi sebesar 0,39 ton/ha. Tidak tercapainya target produktivitas untuk pengembangan industri gambir di Kabupaten Pesisir Selatan, maka ada beberapa hal yang menjadi persoalan di daerah ini seperti rendahnya peningkatan nilai tambah produk; dan kurangnya penerapan teknologi pertanian yang berpengaruh pada tingkat pendapatan petani, Sinergitas antar SKPD belum terjalin dengan optimal; Rendahnya pendidikan petani dan kelompok sasaran serta terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. Untuk pemasaran gambir, dapat dilihat pada 2 (dua) tahun terakhir, harga gambir cenderung turun, sehingga petani banyak yang tidak melakukan panen; dan Ketika petani tidak melakukan panen, maka tanaman gambir juga tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan anjuran, sehingga menurunkan produktivitas gambir.

6.2.1. Agribisnis Gambir di Kabupaten Pesisir Selatan

A. Sub Sistem Hulu

Tanaman gambir sampai saat ini umumnya diperbanyak melalui perbanyakan generatif, yaitu melalui biji yang disemaikan lebih dulu dengan prosedur tertentu untuk memperoleh bahan tanaman yang memiliki daya tumbuh lebih baik. Tanaman gambir yang ditumbuhkan dari biji baru dapat dipanen setelah berusia 1,5 tahun - 2

tahun, namun getah daun yang dihasilkan lebih banyak daripada tanaman hasil yang pengembangbiakan vegetatif yang dapat dipanen setelah satu tahun. Biji gambir yang digunakan untuk pengembangbiakan diperoleh dari buah gambir yang sudah matang pada tanaman gambir di hutan atau pohon gambir budidaya yang belum pernah dipanen.

Pada Sub Sistem hulu, kegiatan budidaya input produksi gambir terus dikembangkan, juga diupayakan peningkatan jumlah produksi. Dukungan penyediaan sarana produksi dan alat-alat pertanian, infrastruktur, penyuluhan dan pendampingan serta sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Adapun permasalahan pada sistem hulu ini adalah:

1. Pada aspek Bibit, Sistem penyediaan bibit masih tradisional secara turun temurun.
2. Pengetahuan petani tentang jenis/kultivar gambir masih rendah
3. Bibit dari jenis/ kultivar unggul belum teridentifikasi

B. Sub Sistem On Farm

Subsistem Budidaya (On-Farm) Budidaya yang benar adalah bagaimana cara-cara bercocok tanam yang tepat sejak dari penyiapan lahan sampai proses berproduksi, diantaranya yang perlu di perhatikan adalah syarat tumbuh, persiapan lahan, penanaman, penyiangan dan penyulaman, pemupukan dan panen.

Jarak tanam gambir bervariasi antara 1,5 m x 1,5 m sampai dengan 3,5 m x 3,5 m tergantung pada kemiringan lahan yang digunakan untuk penanaman. Jarak tanam yang terlalu rapat mengakibatkan terjadinya persaingan antara tanaman relatif tinggi, sehingga pertumbuhan dan produksi tidak optimal. Demikian pula bila terjadi sebaliknya. Budidaya tanaman gambir pada umumnya dilakukan di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-200 m diatas permukaan laut. Walaupun demikian, tanaman gambir dapat dibudidayakan pada lahan dengan ketinggian 200-800 m diatas permukaan laut, mulai dari topografi agak datar sampai di lereng bukit. Gambir ditanam sebagai tanaman perkebunan di pekarangan atau kebun dipinggir hutan. di daerah sentra tanaman gambir, kebun-kebun gambir rakyat dapat ditemukan di daerah-daerah lereng perbukitan dengan kemiringan beragam, mulai dari

kemiringan yang rendah hingga sangat curam. Budidaya gambir masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara sederhana atau semi intensif. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma empat hingga enam kali setahun hingga panen daun pertama (pada saat umur tanaman sekitar 1,5-2 tahun). Penyiangan gulma selanjutnya dilakukan hanya dua kali setahun setelah panen gambir. Petani biasanya tidak menggunakan pupuk dalam pemeliharaan tanaman kecuali pada awal penanaman bibit di lahan. Selain karena keterbatasan modal petani untuk membeli pupuk. Petani tidak melakukan penanganan khusus dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman gambir karena relatif tidak menyulitkan dan merugikan. Rangkaian produksi gambir yang biasa dilakukan oleh petani gambir dimulai dari pemanenan daun dan ranting gambir, pengangkutan daun dan ranting gambir ke rumah kempa, serta proses produksi gambir di rumah kempa. Dari kebun seluas satu hektar, biasanya daun yang akan dipanen dapat mencukupi untuk bahan baku produksi gambir selama sekitar dua minggu. Akan tetapi, hal ini sangat tergantung kepada kesuburan kebun gambir. Petani yang mengangkut daun dan ranting gambir ke rumah kempa yang berlokasi di pemukiman dan jauh dari kebun gambir mengangkut daun gambir yang dimasukkan ke dalam karung menggunakan sepeda atau motor.

Adapun permasalahan di sub sistem on farm gambir di Kabupaten Pesisir selatan ini adalah:

1. Umumnya di tanam di lereng sehingga rawan erosi tinggi dan tanah tidak subur
2. Pola tanam campuran yang tidak teratur
3. Umumnya gambir petani tidak dipupuk dan gulma tidak disiangi secara teratur
4. Pengendalian hama belum dikendalikan

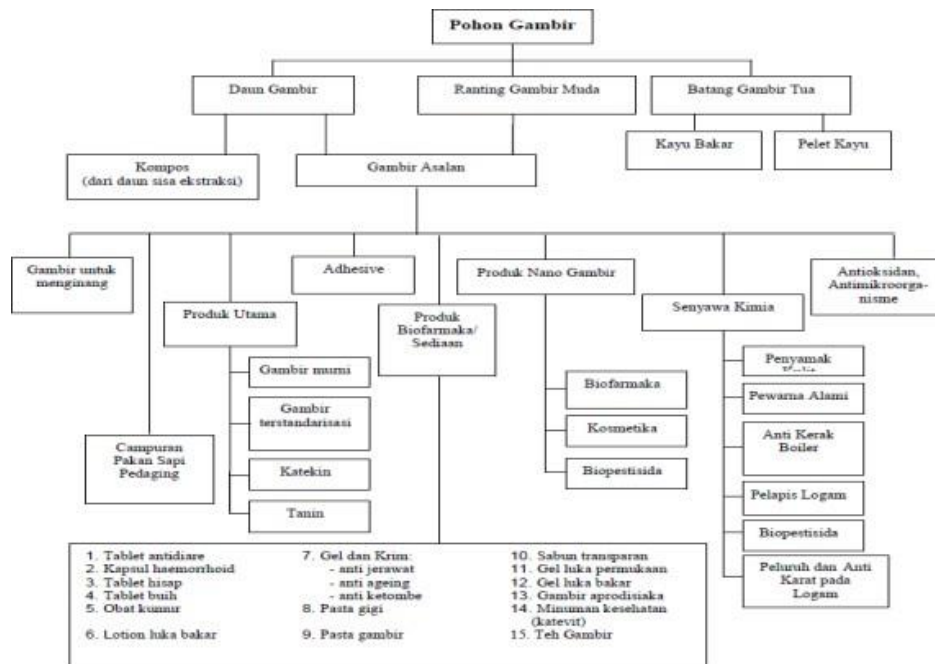
C. Sub Sistem Hilir

Pada sub sistem hilir dapat kita lihat dari aspek *pasca panen, produk Olahan dan produk Turunan Olahan produk gambir.*

Umumnya petani melakukan panen 2 kali setahun tergantung keadaan pertumbuhan tanaman dan ketuaan daun, bila pertumbuhan baik dan ketuaan daun memenuhi syarat, maka dapat dilakukan 3 kali setahun. Proses pengolahan daun dan ranting

gambir menjadi gambir dilakukan agroindustri gambir skala mikro dan kecil, tetapi lebih dikenal sebagai rumah kempa. Pada umumnya rumah kempa terletak di areal perkebunan gambir, rumah kempa tradisional berukuran 4 m x 4 m dibuat dari kayu dengan dinding berupa papan serta atap berupa seng atau daun rumbia. Terdapat pula rumah kempa permanen dengan dinding bata dan semen, namun jumlahnya lebih sedikit daripada rumah kempa tradisional. Rancangan tata letak pada rumah kempa tradisional merupakan kearifan lokal yang telah digunakan petani gambir secara turun temurun. Pengempaan adalah pengolahan gambir yang menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu dan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pengolahan gambir, karena menentukan kualitas dan kuantitas getah yang keluar dari daun dan ranting, di samping oleh jenis alat yang digunakan dan kemampuan tenaga manusia dalam pengempaan. Jenis alat kempa yang berkembang antara lain alat kempa kayu dan alat kempa dongkrak. Rangkaian proses produksi gambir utama yang dilakukan di pengolahan gambir di rumah kempa, terdiri dari beberapa tahap yaitu perebusan daun, ekstraksi getah gambir, pengendapan dan penirisan air, pencetakan, serta pengeringan.

Berbagai produk olahan dari gambir asalan yang terdiri dari (i) Produk utama yaitu gambir murni, gambir terstandarisasi, katekin dan alkaloid; (ii) Adhesive; (iii) Produk biofarmaka/sediaan; (iv) Berbagai produk dari nano gambir; (v) Berbagai senyawa kimia serta (vi) Antioksidan dan antimikroorganisme. Industri produk turunan gambir yang dihasilkan dari tanaman-tanaman di atas dapat dilihat pada pohon industri berikut.



Gambar 5.1

Pohon Industri Produk turunan produk gambir (Gumbira-Said, *et al.* (2009)

Permasalahan yang ditemui pada sub sistem hilir di kabupaten Pesisir Selatan adalah:

Aspek Pengolahan:

1. Proses pengolahan umum nya masih tradisional (semi mekanik)
2. Alat pengolahan beragam dan belum digunakan optimal.
3. Rendemen dan mutu yang dihasil bervariasi.
4. Komponen hasil yang memiliki nilai ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal
5. Tenaga pengolah masih langka karena pendapatan rendah
6. Pengawasan mutu gambir di tingkat pengolah masih kurang
7. Belum ada sangsi terhadap pelaksanaan ketentuan standarisasi mutu

Aspek Pemasaran:

1. Fluktuasi harga masih tinggi.
2. Pasar gambir bersifat monopsoni
3. Petani terpaksa menjual gambir karena terjerat hutang oleh pedagang
4. Tertutupnya Informasi harga ditingkat eksportir/ importir

Aspek Permodalan:

1. Petani masih mengandalkan modal sendiri dan bersifat partial.
2. Sebagian besar petani belum membentuk kelompok yang melembaga, bersifat komersial dan kompak
3. Lembaga permodalan / perkreditan belum bisa menjamin petani gambir

6.3 Sistem Rantai Pasok (*Supply Chain System*) Produk Gambir di Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk menjamin agribisnis gambir dapat berjalan dengan yang baik yang diukur dari kesinambungan/keberlanjutan (*sustainability*) agribisnis gambir dan keterlibatan pelaku-pelaku industri yang ada dalam proses bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka suatu sistem rantai pasok (*supply chain system*) dari proses bisnis produk minyak atsiri dan turunannya perlu dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Keterlibatan pelaku-pelaku industri ini diharapkan sebagian besarnya adalah masyarakat sendiri sehingga manfaat dari agribisnis gambir dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat disamping pelaku industri yang berasal dari luar masyarakat seperti industri dan pengusaha. Perancangan sistem rantai pasok gambir ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pelaku industri dalam proses bisnis produk gambir dapat memberikan kontribusi yang tepat bagi sistem dan memperoleh manfaat yang seharusnya dalam kegiatan bisnis tersebut. Pelaku-pelaku industri gambir yang terlibat dalam sistem rantai pasok (*supply chain system*) tersebut dari awal proses bisnis dimulai sudah mengetahui dengan baik apa peran dan manfaat yang akan diperoleh oleh masing-masing pelaku industri yang terlibat tersebut. Dengan demikian, setiap pelaku industri dalam rantai pasok gambir akan berkontribusi sesuai dengan peran yang diberikan dan melaksanakan perannya tersebut dengan maksimal tanpa merasa dirugikan atau memperoleh manfaat yang tidak seimbang.

Untuk merancang sistem rantai pasok gambir perlu diketahui terlebih aktivitas-aktivitas bisnis apa saja yang terlibat dalam agribisnis gambir ini. Secara umum aktivitas-aktivitas tersebut dibagi menjadi dua yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Berikut ini pembagian aktivitas-aktivitas tersebut.

A. Aktivitas-aktivitas utama sistem rantai pasok gambir

1. Produksi bahan baku gambir
2. Distribusi bahan baku gambir
3. Produksi produk gambir dan turunannya
4. Distribusi produk gambir dan turunannya
5. Pemasaran dan penjualan
6. Jasa pelayanan

B. Aktivitas-aktivitas pendukung sistem rantai pasok gambir

1. Pembelian bahan baku dan produk gambir
2. Pengembangan teknologi produksi
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas perusahaan

Berdasarkan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung dari sistem rantai pasok gambir tersebut maka sistem rantai pasok dapat dirumuskan sebagai berikut.

Berdasarkan rancangan sistem rantai pasok proses bisnis gambir, maka hal-hal yang perlu disepakati oleh setiap semua pelaku dalam jaringan rantai pasok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi masing-masing pelaku dalam bisnis tersebut terhadap produk gambir sehingga bisa ditentukan seberapa besar manfaat yang akan didapatkan atau diperoleh oleh setiap pelaku tersebut nanti sehingga setiap pelaku dalam sistem rantai pasok ini mendapatkan manfaat yang “fair”.
2. Pengaturan dan koordinasi antara produksi, pasokan, distribusi dan pemasaran dari produk gambir dan turunannya sehingga aliran bahan baku dan produk bisa disinkronkan dari hulu sampai hilir nantinya sehingga keberlanjutan/kesinambungan (*sustainability*) proses bisnis dan sistem rantai pasok dapat dijaga.
3. Pengaturan kapasitas produksi, kapasitas agen pengumpul, dan kapasitas distributor yang akan direncanakan nantinya sehingga bisa disinkronkan dengan jadwal dan pengaturan penanaman dari bibit pohon gambir, produksi gambir dan distribusi produknya sehingga total biaya operasional sistem dapat diminimalkan.

4. Proses pengelolaan permintaan dan penyaluran/distribusi produk sehingga permintaan produk dapat dipenuhi pada waktu, jumlah permintaan dan jenis produk yang tepat.
5. Penyiapan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk berjalannya proses bisnis gambir ini dan pembentukan unit-unit pengelola baik pada level agen pengumpul, pabrik penyulingan dan distributornya.
6. Penyiapan teknologi informasi dan digitalisasi dari proses bisnis dan sistem rantai pasok minyak atsiri sehingga aliran informasi, aliran uang dan aliran pesanan (order) dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Industri Andalan dan Potensial untuk komoditi gambir seperti yang tertera pada Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesisir yaitu: Berkembangnya IKM gambir mentah yang berstandar internasional, Berdirinya IKM gambir murni yang berstandar internasional dan bermerek dagang, Berdirinya industri katekin berstandar internasional dan bermerek dagang, Berkembangnya industri penyamak kulit berstandar internasional dan bermerek dagang dan Berdirinya industri biofarmaka berstandar internasional dan bermerek dagang, maka **untuk mengatasi semua permasalahan pada industry gambir di daerah ini, maka diperlukan Penguatan dan Peningkatan Kematangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Gambir:**

A. Penguatan SIDA Gambir :

- I. Kebijakan penguatan SIDA Gambir
- II. Penataan unsur SIDA Gambir
- III. Pengembangan SIDA Gambir

B. Peningkatan Kematangan SIDA Gambir (Metode ANIS):

- I. Level Makro yang terkait dengan kebijakan inovasi gambir
- II. Level Messo yang terkait dengan kelembagaan dan program pengembangan gambir
- III. Level Mikro yang terkait dengan *capacity building* pelaku pengembangan, produksi dan pemasaran gambir

C. Strategi: Peningkatan Daya Saing industry Gambir di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu sentra penghasil gambir di Sumatera Barat, maka pengembangan produk ini di daerah ini disarankan untuk melakukan pengembangan industry gambir berbasis sistem inovasi daerah. Dalam bab ini akan dijelaskan kerangka makro dalam pengembangan industri gambir sebagai upaya peningkatan daya saing daerah berbasis sistem. Pentingnya dilakukan pendekatan berbasis sistem ini karena :

1. Terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan;
2. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi;
3. Karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat;
4. Pengelolaan SDM kolaboratif;
5. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.

Tujuan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

1. Visi pembangunan ekonomi lokal berbasis IPTEKMAS.
2. Mendayagunakan segenap potensi pembangunannya secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.
3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi
4. Proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring.
5. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
7. Menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor.
8. Menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

Mengingat pentingnya Sistem Inovasi Daerah diterapkan di daerah, maka untuk Meningkatkan daya saing daerah dengan komoditi gambir sebagai salah satu komoditi unggulan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kematangan dan kekuatan dari Sistem inovasi tersebut. Kematangan sistem yang harus ditingkatkan terdiri dari 4 level yaitu :

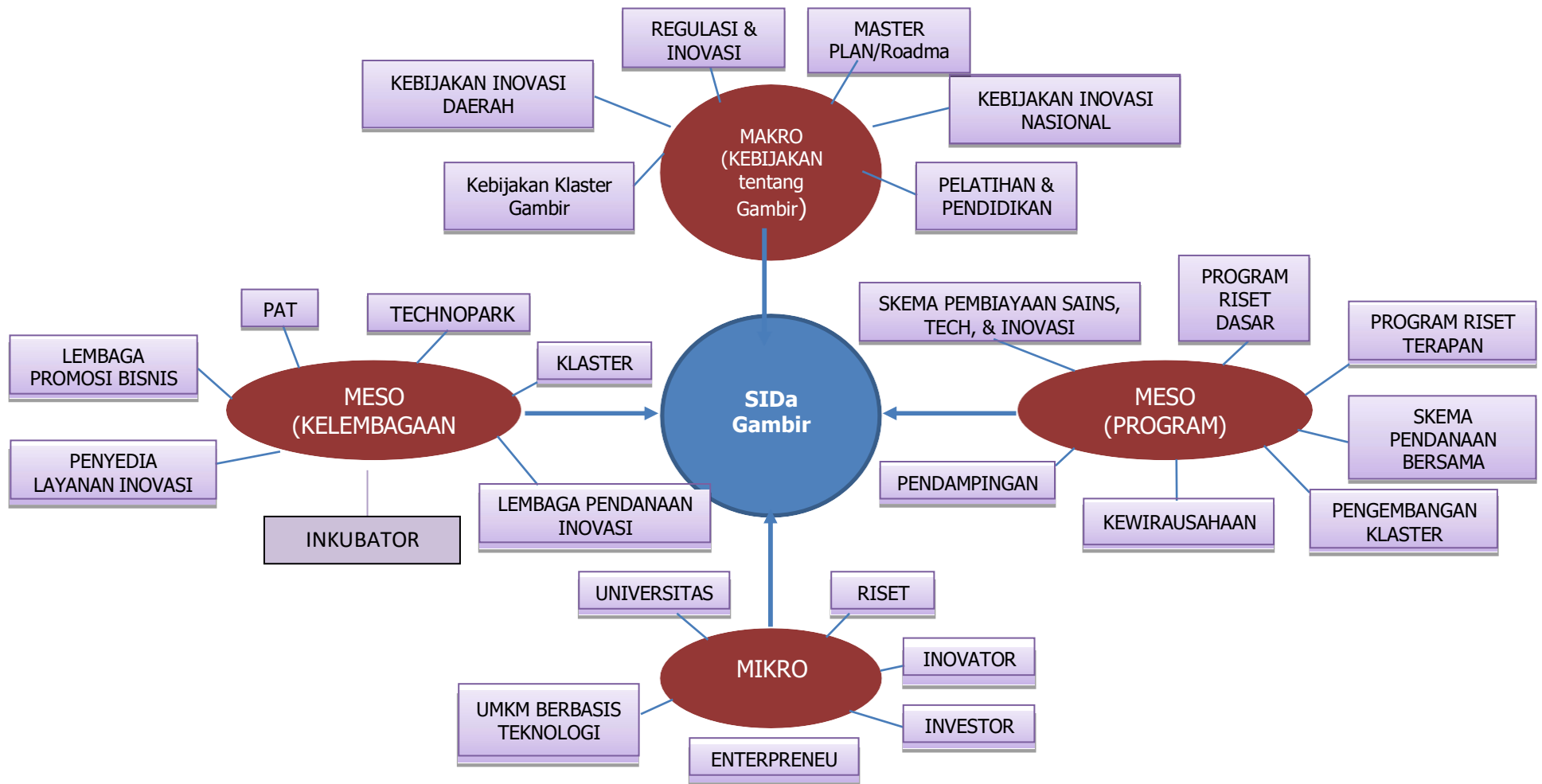
1. level makro yaitu berupa kebijakan inovasi tentang Produk gambir,
2. level meso berupa kelembagaan inovasi gambir
3. level meso program inovasi gambir
4. level mikro berupa peran dari kapasitas/pelaku inovasi gambir

Sedangkan kekuatan SIDA gambir yang harus ada adalah :

1. Komitmen dan kebijakan khusus SIDA gambir di RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan serta adanya Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Penguatan SIDA Gambir
2. Roadmap Penguatan dan Rencana Aksi Daerah SIDA Gambir
3. MoU kerjasama SIDA Gambir dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha
4. RPJMD berdasarkan Roadmap Penguatan SIDA Gambir sesuai dengan PB Mendagri dan Menristek No. 03 dan 36 tahun 2012
5. RKPD berdasarkan Rencana Aksi SIDA Gambir sesuai dengan PB Mendagri dan Menristek No. 03 dan 36 tahun 2012
6. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA Gambir antar kabupaten/kota di Provinsi Sumbar dan Nasional
7. Penataan unsur-unsur SIDA Gambir melalui (a). Kelembagaan (lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya), (b). Jaringan (komunikasi antarlembaga, mobilisasi SDM, dan optimalisasi IPTEK), dan (c). Sumber daya (kepakaran, kekayaan intelektual, dan informasi, dan sarpras IPTEK).
8. Pelaksanaan SIDA Gambir (tim koordinasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan)

Berikut akan di gambarkan secara ilustrasi model pengembangan industri Gambir berbasis sistem inovasi daerah. Penguatan sistem inovasi (sebagai satu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan yang saling terhubung dalam proses interaksi

produktif) perlu menjadi prioritas pembangunan, baik pada tataran nasional maupun daerah. Upaya penguatan sistem inovasi akan menentukan kemampuan inovasi dan difusi teknologi termasuk proses pembelajaran teknologinya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi proses peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan penguatan sistem inovasi dengan focus industry gambir ini, salah satu tema inisiatif strategisnya dengan kelembagaan pendukung inovasi adalah pengembangan klaster industri dan sentra IKM Gambir.



Gambar 6.1 Model Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Dengan Produk Unggulan

Tabel 6.5

Matriks Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Industri Gambir

STRATEGI: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAN INDUSTRI UNGGULAN Kabupaten Pesisir Selatan															
A. Kebijakan: Peningkatan Jenis, Nilai Tambah, Produksi dan Pemasaran Produk Olahan Gambir															
	No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA				Output	Outcome	
				2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD			PT, Lemlit
	1.	Program pengembangan kelembagaan dan kapasitas petani Gambir	a. Peningkatan kelembagaan petani gambir (Pembentukan/pengembangan dan pembinaan koperasi gabungan kelompok petani gambir) b. Pelatihan petani dalam penyediaan bahan baku gambir											Meningkatnya kelembagaan petani	Berkembangnya kelembagaan dan kapasitas petani gambir
			c. Persiapan Pendirian Sentra gambir											Terbentuknya sentra gambir	
			d. Persiapan pendirian Pembentukan dan pengembangan agroteknopark gambir											Terbentuknya aghroteknopark gambir	

			e. Penyusunan proposal sentra dan agroteknopark gambir														Proposal	
			f. Penyusunan rencana bisnis, study kelayakan															
			g. persiapan Implementasi program pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) gambir														program pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) gambir	
			h. Persiapan Implementasi Program Riset Dasar dan terapan tentang gambir														Program Riset Dasar dan terapan tentang gambir	
			i. Persiapan program Implementasi Skema Pendanaan Bersama dari Pemkab (Pusat, Prov, PT, CSR dan Non Bank) terkait pengembangan gambir														Skema Pendanaan Bersama (Pusat, Prov, PT, CSR dan Non Bank)	
			j. sosialisasi kegiatan untuk menumbuh kembangkan kegiatan usaha industri gambir														kegiatan untukmenumbuhke mbangkan kegiatan usaha industri gambir	
			k. studi komparasi, memfasilitasi proses belajar dan berkerja yang lebih praktis														Jumlah peserta dan daerah tujuan	

			1. Pelatihan pada petani gambir													Terlatihnya petani dalam penyediaan bahan baku gambir	
	2.	Pembentukan kelembagaan pendukung inovasi pengembangan produk dan inkubasi IKM olahan gambir	a. Pendirian sentra dan klaster inovasi gambir sebagai pilotasi kegiatan transfer teknologi ke pelaku usaha													Terbentuknya sentra dan klaster produk olahan gambir	Terbentuknya kelembagaan pengembangan produk dan meningkatnya jumlah IKM olahan olahan gambir
			b. Sosialisasi tentang program pembentukan sentra dan klaster industry dan inovasi gambir													Terbentuknya sentra dan klaster inovasi gambir	
			c. Penyusunan proposal pendirian sentra dan klaster inovasi gambir														
			d. Audiensi														
			e. Pembentukan dan pengembangan klaster produk olahan gambir													Terbentuknya klaster gambir	
			f. Pengembangan pusat promosi produk olahan gambir													Berkembangnya pusat promosi produk olahan gambir	
			g. Pendampingan dan inkubasi kelompok petani dan pengusaha produk olahan gambir													Bertambahnya IKM produk olahan gambir	
	3.	Pembentukan	a. Pembentukan unit pengadaan													Terbentuknya unit	Terbentuknya

			gambir															produksi produk olahan gambir	
	6.	Pengembangan produk olahan gambir yang murah dan berkualitas melalui inovasi	a. Pengembangan produk olahan gambir yang murah dan berkualitas melalui inovasi b. - Penerapan teknologi pemupukan & pemeliharaan tanaman serta pemanfaatan limbah daun gambir untuk pupuk organik (kompos)															Berkembangnya produk yang murah dan berkualitas melalui inovasi	Berkembangnya produk olahan gambir yang murah dan berkualitas
	7.	Diversifikasi jenis produk olahan gambir melalui inovasi	a. Litbang produk olahan gambir inovatif															Berbagai produk olahan gambir inovatif	Beragamnya jenis produk olahan gambir bernilai komersial
			b. Produksi produk olahan gambir inovatif															Produksi produk olahan gambir inovatif	
	8.	Pengembangan SDM IKM produk olahan gambir	a. Pelatihan SDM															Terlatihnya SDM	Berkembangnya SDM IKM produk olahan gambir
			b. Rekrutmen enginer dan sarjana															Bertambahnya SDM enginer dan sarjana	
	9.	Penerapan sertifikasi halal dan SNI produk olahan gambir	a. Sertifikasi halal produk olahan gambir															Tersertifikasinya halal produk olahan gambir	Tersertifikasinya halal dan SNI produk olahan gambir
			b. Sertifikasi SNI produk olahan gambir															Tersertifikasinya SNI produk olahan gambir	
	10	Pengembangan pemasaran, penyuluhan konsumen, dan	a. Pengembangan pemasaran															Berkembangnya pemasaran	Berkembangnya pemasaran, penyuluhan
			b. Pengembangan packaging olahan gambir															Semakin	
			c. Promosi/expose gambir dan																

		purna jual	produk turunannya di pasar domestik / luar negeri dengan melibatkan petani/ koperasi dan eksportir/pedaga ng besar													banyaknya konsumen yang kenal produk	konsumen, dan purna jual produk olahan gambir
			d. Pengembangan purna jual e. Pembentukan jaringan dan informasi harga pemasaran gambir tingkat domestik dan internasional													Berkembangnya purna jual	
	11	Pelaporan Monev Program Peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan gambir Program Inovasi	Penyusunan laporan penyiapan program pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan gambir													Dokumen laporan penyiapan Program Pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan gambir	Program peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan gambir untuk tahun berikutnya

BAB VII

Rencana Aksi Fokus SIDA Olahan Produk Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan

7.1 Rencana Aksi Detail Fokus SIDA Industri Olahan Produk Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”**, maka salah satu misi untuk mencapai visi tersebut adalah **Misi ketiga yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**. Adapun tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan dengan sasaran adalah meningkatnya PDRB sektor unggulan.

Salah satu potensi yang akan dikembangkan dan dipercepat peningkatannya adalah sub sector perikanan. Pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran yang cukup penting dan strategis untuk meningkatkan PDRB, membuka kesempatan kerja, serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki julukan 'Negeri Sejuta Pesona' itu memiliki anugerah potensi kekayaan bahari yang melimpah, dengan didukung panjang garis pantai yang mencapai 246 Kilometer, membujur dari Utara ke Selatan.

Selama ini sebagian besar dari kekayaan alam laut Pesisir Selatan dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga ekonomi nelayan cenderung tidak bergerak. Industri pengolahan merupakan salah satu langkah menuju kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, karna dinilai mampu memberi kesejahteraan pada masyarakat khususnya keluarga nelayan.

Karena itu, Pemerintah Pesisir Selatan dalam RPJMD memadukan besarnya potensi disisi hulu dengan percepatan pertumbuhan industri pengolahan.

Namun pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari beberapa permasalahan, yakni

1. Penurunan potensi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), penangkapan yang berlebihan (overfishing), penggunaan alat tangkap terlarang (mini trawl), penggunaan bahan peledak dan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
2. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi perikanan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengolahan hasil perikanan.
3. Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
4. Alih fungsi lahan budidaya perikanan menjadi pemukiman penduduk.
5. Terbatasnya ketersediaan benih unggul, induk unggul dan pakan ikan yang mengakibatkan terkendalanya aktifitas budidaya masyarakat.
6. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang belum dipahami oleh para pelaku usaha.
7. Belum terjaminnya keamanan mutu olahan hasil perikanan ikan.

Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan alat penangkapan ikan terlarang/tidak ramah lingkungan.
2. Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan yang antara lain disebabkan armada yang digunakan didominasi oleh kapal berukuran kecil (tradisional), cara pengolahan yang masih bersifat tradisional, kemudian masih digunakannya bahan-bahan berbahaya seperti borax dan formalin ketika mengolah hasil perikanan.
3. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan belum adanya sistim jaminan mutu produk perikanan.
5. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan serangan hama penyakit ikan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk pembangunan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan “ , dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai tujuan diatas, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan telah didirikan sentra IKM bidang perikanan sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah kabupaten dalam hilirisasi potensi unggulan daerah. Pesisir Selatan kini resmi memiliki sentra IKM khusus untuk pengolahan hasil perikanan dan produk dari yang berada di kawasan Carocok Kecamatan Koto XI Tarusan. Keberadaannya tidak saja sebagai sentra pengolahan, namun juga sebagai pusat kegiatan pelatihan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha yang berskala IKM. Namun keberadaan sentra saat ini masih perlu ditingkatkan perkembangannya dengan meningkatkan perencanaan pengembangan secara komprehensif dan kolaboratif. Pembangunan sentra mesti melibatkan tiga pihak terkait/ stakeholders; (1) masyarakat, (2) swasta dan (3) pengambil kebijakan/ pemerintah. Meski intinya meminta dua hal; (a) aspek teknis dan (b) dukungan kelembagaan.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan diatas, maka untuk mempercepat pengembangan dan mencapai sasaran, maka diperlukan suatu sistem inovasi daerah sebagai satu kesatuan dari semua stakeholder di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menumbuhkembangkan inovasi produk perikanan. Pembangunan Sistem Inovasi Daerah di Kab.Pesisir Selatan sudah dilakukan, hanya saja keseluruhan proses belum tersistem. Sistem inovasi daerah seperti yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Bersama Kemenristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012, SIDA memiliki pengertian sebagai,

“keseluruhan proses dalam satu sistem untukmenumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah” (pasal 1 ayat 2)”.

Ada pihak-pihak tertentu yang akan berperan dalam peningkatan SIDA ini, yaitu:

1. Institusi Pemerintah (dalam hal ini mencakup pemerintah daerah dan semua institusinya).
2. Lembaga Kelitbangan (dalam hal ini mencakup Lembaga Kelitbangan adalah instirusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perkayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
3. teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses peroduksi).
4. Lembaga Pendidikan
5. Lembaga Penunjang Inovasi
6. Dunia Usaha
7. Masyarakat

Untuk mengembangkan sistem inovasi daerah, maka perlu dikembangkan focus produk yang akan ditingkatkan nilai tambahnya, agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Sistem Inovasi Daerah dengan focus olahan produk perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan ini meliputi:

A. Penguatan SIDA Olahan produk Perikanan :

- I. Kebijakan penguatan SIDA produk olahan produk perikanan
- II. Penataan unsur SIDA produk olahan produk perikanan
- III. Pengembangan SIDA produk olahan produk perikanan r

B. Peningkatan Kematangan SIDA SIDA produk olahan produk perikanan (Metode ANIS):

- I. Level Makro yang terkait dengan kebijakan inovasi SIDA produk olahan produk perikanan
- II. Level Messo yang terkait dengan kelembagaan dan program pengembangan SIDA produk olahan produk perikanan
- III. Level Mikro yang terkait dengan *capacity building* pelaku pengembangan, produksi dan pemasaran SIDA produk olahan produk perikanan

C. Peningkatan Daya saing Produk Olahan produk perikanan

Berikut akan di jelaskan pengembangan industry olahan produk perikanan di Kab.Pesisir Selatan yang berbasis sistem inovasi daerah, maka ada 4 level yang harus di implementasikan yaitu:

7.2. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK OLAHAN PRODUK PERIKANAN DI KAB. PESISIR SELATAN:

III	STRATEGI: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAN INDUSTRI OLAHAN PRODUK PERIKANAN															
	A.	Kebijakan: Peningkatan Jenis, Nilai Tambah, Produksi dan Pemasaran Olahan produk perikanan														
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA				Output	Outcome	
					2019	2020	2021	2022	2023	Pem. Pusat	Pemprov	Pemko	DPRD			PT, Lemlit
		1.	Program pengembangan kelembagaan dan kapasitas pelaku usaha perikanan	a. Revitalisasi kelembagaan petani Olahan produk perikanan											Meningkatnya kelembagaan petani	Berkembang-nya kelembagaan dan kapasitas petani Olahan produk perikanan
				b. Peningkatan program kelembagaan dan SDM petani dalam penyediaan bahan baku Olahan produk perikanan											program kelembagaan dan SDM petani dalam penyediaan bahan baku Olahan produk perikanan	
				c. Revitalisai balai latihan kerja dan SMK											Meningkatnya kualitas pelayanan balai latihan kerja dan SMK	
				d. Peningkatan kapasitas aparatur terkait pengembangan Industri Olahan produk perikanan											Meningkatnya kualitas aparatur terkait pengembangan Industri Olahan produk perikanan di Kab.Pesisir Selatan	

				e. Penguatan poktan/gapoktan dan asosiasi penyuling											Meningkatnya fungsi poktan/gapoktan dan asosiasi penyuling	
				f. Pembentukan forum komunikasi antara poktan, dinas pertanian, pelaku usaha											Terbentuknya forum komunikasi antara poktan, dinas pertanian dan pelaku usaha	
				g. Peningkatan pengembangan pelaku usaha											Tersedianya penyediaan bibit bersertifikasi	
				h. Penguatan kemitraan antara petani/poktan dan pelaku industri pengolahan Olahan produk perikanan											MoU dan MoA (kegiatan kerja sama) antara antara petani/poktan dan pelaku industri pengolahan Olahan produk perikanan	
				i. Implementasi program pengembangan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) Olahan produk perikanan											Terbentuknya lembaga Pusat Alih Teknologi	
				j. Insentif untuk penelitian dan pengembangan produk Olahan produk perikanan											Tersedianya dana, panduan dan luaran hasil penelitian Olahan produk perikanan	
				k. Implementasi Program Riset Dasar dan terapan tentang Olahan produk perikanan											Tersedianya Program Riset Dasar dan terapan tentang Olahan produk perikanan	

				l. Implementasi Skema Pendanaan Bersama (Pusat, Prov, PT, CSR dan Non Bank)											Tersedianya Skema Pendanaan Bersama (Pusat, Prov, PT, CSR dan Non Bank)	
				m. sosialisasi kegiatan untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha industri Olahan produk perikanan											Jumlah peserta kegiatan usaha industri Olahan produk perikanan	
				n. studi komparasi, memfasilitasi proses belajar dan berkerja yang lebih praktis											Laporan studi komparasi	
				o. Pelatihan pada petani pengolah Olahan produk perikanan											Terlatihnya petani dalam penyediaan bahan baku	
		2.	Pembentukan kelembagaan pengembangan produk dan inkubasi IKM petani dan pengolah Olahan produk perikanan	a. Revitalisasi kelembagaan pengusaha olahan Olahan produk perikanan dan inkubasi IKM											Terbentuknya dan berkembangnya Pusat alih teknologi dan	Terbentuknya kelembagaan pengembangan produk dan meningkatnya jumlah IKM olahan produk Olahan perikanan
				b. Penataan kembali tata kelola sentra IKM produk Olahan produk perikanan yang sudah ada											Tata kelola sentra IKM Olahan produk perikanan	
				c. Pembentukan dan pengembangan klaster industri Olahan produk perikanan											Dokumen klaster industri Olahan produk perikanan dan SK Perbup tentang klaster inovasi/industri Olahan produk perikanan serta daftar para pihak	

																		yang termasuk dalam klaster	
				d. Pengembangan pusat promosi produk olahan Olahan produk perikanan														Berkembangnya pusat promosi produk olahan Olahan produk perikanan	
				e. Pendampingan dan inkubasi kelompok petani dan pengusaha Olahan produk perikanan														Bertambahnya IKM produk olahan Olahan produk perikanan	
		3.	Pembentukan sistem dan pelaksanaan pengadaan bahan baku dan berkualitas	a. Pembentukan unit pengadaan bahan baku untuk produk olahan Olahan produk perikanan														Terbentuknya unit pengadaan bahan baku untuk produk olahan Olahan produk perikanan	Terbentuknya sistem pengadaan dan tersedianya bahan baku halal, murah, dan berkualitas
				b. Tersedianya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industry														Tersedianya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industry	
				c. MoU dengan pengusaha dan daerah pemasok bahan baku														Tersedianya MoU dengan pengusaha dan daerah pemasok bahan baku	
		4.	Peningkatan permodalan	a. Perluasan akses bantuan modal (CSR)														Semakin luasnya akses bantuan modal	Meningkatnya permodalan IKM
				b. pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang															

[illegible]

				b. Peningkatan mutu produk melalui penerapan GAP, Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI)													Produk Olahan produk perikanan yang bermutu	
		7.	Diversifikasi jenis produk olahan Olahan produk perikanan melalui inovasi	a. Litbang produk olahan Olahan produk perikanan inovatif													Berbagai produk olahan Olahan produk perikanan inovatif	Beragamnya jenis produk olahan Olahan produk perikanan bernilai komersial
				b. Produksi produk olahan Olahan produk perikanan inovatif													Produksi produk olahan Olahan produk perikanan inovatif	
				c. Pelatihan SDM													Terlatihnya SDM	
		8.	Pengembangan SDM petani dan IKM pengolah Olahan produk perikanan	a. Pelatihan petani untuk melakukan budidaya berdasarkan Good Agricultural Practises (GAP) dan Good Agricultural and Collection Practises (GACP)													Jumlah petani yang terlatih	Berkembang-nya petani dan SDM IKM pengolahan Olahan produk perikanan
				b. Pembinaan melalui pendampingan teknologi oleh PT, Litbang, eksportir													Jumlah petani/poktan yang di bina dan didampingi	
				c. penyuluhan dan pelatihan tentang Good Manufacturing Practice														

[illegible]

11.	Memperkuat infrastruktur dan regulasi dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif	a. Penyediaan lahan																Luas lahan untuk	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan regulasi dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif
		b. Penyediaan jaringan, listrik, air dan telekomunikasi																tersedianya jaringan, listrik, air dan telekomunikasi	
		c. Pembangunan dan rehabilitasi transportasi darat,																Terbangunnya dan rehabilitasi transportasi darat,	
		d. Penyediaan informasi Industri Olahan produk perikanan																Tersedianya informasi Industri Olahan produk perikanan	
		e. Penyediaan penunjang standarisasi																Tersedianya penunjang standarisasi	
		f. Pengelolaan lingkungan Industri																Terkelolanya lingkungan industri yang ramah lingkungan	
		g. Penguatan kelembagaan dan regulasi iIndustri																Meningkatnya kelembagaan dan regulasi iIndustri	
12.	Pelaporan Monev Program Peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan Olahan produk perikanan Program Inovasi	Penyusunan laporan penyiapan program pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan Olahan produk perikanan																Dokumen laporan penyiapan Program Pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan Olahan produk perikanan	Program peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan Olahan produk perikanan untuk tahun berikutnya

BAB VIII

Rencana Aksi Detail SIDA Industri Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan

KEPARIWISATAAN

Merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. (UU 10/2009),

WISATA

Merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (UU 10/2009)

PARIWISATA

Merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (UU 10/2009)

Berdasarkan konsep diatas, maka salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan daya saing pariwisata adalah dengan mengusung konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) khususnya disesuaikan dengan kondisi daerah, dimana dalam sistem inovasi terdapat 2 komponen utama yaitu a) interaksi dan kolaborasi, serta b) pembelajaran, kajian ini melakukan upaya Operasionalisasi Konsep SIDa pada suatu lokasi terpilih dengan topik Revitalisasi Kegiatan Pariwisata

Pengembangan Ekowisata atau ecotourism merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran

dan pendidikan. Secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya. Pengembangan agrowisata terkait erat dengan masyarakat di sekitar kawasan agrowisata. Masyarakat lokal berperan besar dalam keberhasilan agrowisata. Menurut Laverack dan Thangphet (2009), dalam Dwiridotjahjono dkk (2017), keterlibatan masyarakat dan pemberdayaannya juga merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan rakyat yang selama ini dinilai relatif lemah, serta sekaligus akan membantu pemerintah dalam memerangi terjadinya urban sprawl yang selama ini belum ada cara ampuh untuk mengatasinya. Peran masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan agrowisata dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi, kantin, transportasi, kerajinan tangan dan aneka oleh-oleh, serta jenis layanan lainnya. Meski banyak sisi positif, pengembangan agrowisata juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi, seperti hilangnya sumber daya alam yang bernilai, rendahnya keterampilan pengelolaan, pemasaran, dan kewirausahaan, serta kurangnya rasa memiliki warga lokal terhadap objek agrowisata, juga ketergantungan terhadap sumber dana dari luar. Jenis kegiatan ekowisata yang potensial dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain kegiatan sektor wisata pantai, kesenian dan budaya, wisata belanja, kerajinan, wisata alam, dan wisata buatan.

SIDA Pariwisata merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke 4 pembangunan daerah yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.

Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan antara lain

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi pertumbuhan ekonomi :
 - a. Kawasan Strategis Pelabuhan Panasahan – Wisata Carocok Bukit Langkisau (Pacar Bulan)
 - b. Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan
 - c. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Kambang
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi sosial budaya/sejarah
 - a. Kawasan Strategis Istana Indrapura
 - b. Kawasan Strategis Rumah Mandeh Rubiah

3. Kawasan Strategis Kabupaten dari sisi fungsi dan daya dukung lingkungan
Kawasan Strategis Jembatan Akar – Bayang Sani

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

1. Bidang Pariwisata

- a. Menjadikan kawasan wisata terpadu Mandeh sebagai icon pariwisata utama di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mewujudkan kawasan wisata Mandeh menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tahun 2017
- c. Pengembangan kerjasama dengan semua stake holder
- d. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku-pelaku pariwisata
- e. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
- f. Peningkatan promosi melalui berbagai media
- g. Peningkatan kerjasama dengan daerah-daerah tujuan wisatayang telah maju
- h. Mendorong terlaksananya dan keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan even-even di luar daerah maupun di dalam daerah.

2. Bidang Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah
- b. Peningkatan kerjasama dan PHRI dan semua instansi dalam rangka penampilan seni budaya dan adat istiadat
- c. Meningkatkan aktifasi seni dan budaya melalui even di dalam maupun di luar daerah.
- d. Mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasiskan iptek dan potensi lokal

Adapun permasalahan pariwisata di daerah ini adalah

1. Masih terbatasnya aksesibilitas dan sarana transportasi untuk menuju kekawasan destinasi utama
2. Masih minimnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di kawasan destinasi wisata
3. Masih terbatasnya pengelolaan dayatarik wisata baik alam maupun buatan serta religi dan budaya

4. Terbatasnya sarana akomodasi, kuliner dan sovenir di kawasan destinasi wisata
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam bidang kepariwisataan sebagai tuan rumah maupun sebagai pelaku wisata
6. Masih belum optimalnya kelembagaan kelompok sadarwisata sebagai penggerak utama di kawasan wisata.
7. Terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh modal usaha
8. Lemahnya koordinasi antar SKPD maupun dengan stakeholder yang terlibat dalam bidang pariwisata
9. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku wisata dengan organisasi ASITA maupun PHRI serta media massa dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata
10. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi dalam pengembangan industri pariwisata
11. Kurangnya Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata

Permasalahan Dalam Bidang Ekonomi Kreatif

1. Kurangnya minat pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif teknologi informasi maupun produk karya seni dan budaya yang inovatif
2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dan kelembagaan serta permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif
3. Terbatasnya bahan baku untuk kerajinan tertentu serta pemasaran produk yang masih sulit
4. Belum banyak sanggar seni yang dikelola secara profesional, sehingga tidak dapat ditampilkan saat dibutuhkan.
5. Belum ada kerja sama dengan tour operator untuk dijadikan paket perjalanan wisata .

Sistem Inovasi Daerah Pariwisata

Untuk mengatasi semua permasalahan pada industry pariwisata di daerah ini, maka diperlukan :

A. Strategi Penguatan SIDA pariwisata (Peraturan Bersama Menteri):

- I. Kebijakan penguatan SIDA pariwisata
- II. Penataan unsur SIDA pariwisata
- III. Pengembangan SIDA pariwisata

B. Strategi Peningkatan Kematangan SIDA pariwisata (Metode ANIS):

- I. Level Makro yang terkait dengan kebijakan inovasi pariwisata
- II. Level Messo yang terkait dengan kelembagaan dan program pengembangan pariwisata
- III. Level Mikro yang terkait dengan *capacity building* pelaku pengembangan, produksi dan pemasaran pariwisata

C.. Strategi Pengembangan Kawasan wisata strategis di Pessel

Penguatan SIDA pariwisata (Peraturan Bersama Menteri):

- I. Kebijakan penguatan SIDA pariwisata mesti tertera pada RPJMD dan RKPD
- II. Penataan unsur SIDA pariwisata
- III. Pengembangan SIDA pariwisata

Kondisi Kekuatan Sistem Inovasi Daerah Pariwisata Saat Ini (2022)

No	Aspek Kekuatan SIDA	Penilaian				
		Belum ada	Ada, belum terimple-mentasikan	Terimple-mentasikan, belum efektif	Efektif, belum unggul/optimal	Unggul/optimal
		0	1	2	3	4
1.	Komitmen dan kebijakan khusus SIDA pariwisata di RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Agam serta Tim Koordinasi Penguatan SIDA		√			
2.	<i>Roadmap</i> Penguatan dan Rencana Aksi Daerah SIDA pariwisata	√				
3.	MoU kerjasama Dinas pariwisata dengan Pemerintah Pusat, Pemprov, perguruan tinggi, balai riset, dan dunia usaha		√			

No	Aspek Kekuatan SIDA	Penilaian				
		Belum ada	Ada, belum terimple-mentasikan	Terimple-mentasikan, belum efektif	Efektif, belum unggul/optimal	Unggul/optimal
		0	1	2	3	4
4.	RPJMD berdasarkan Roadmap Penguatan SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek No. 03 dan 36 tahun 2012.	√				
5.	RKPD berdasarkan Rencana Aksi SIDA sesuai PB Mendagri dan Menristek No. 03 dan 36 tahun 2012.	√				
6.	Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Agam, Provinsi Sumbar dan Nasional	√				
7.	Penataan unsur-unsur SIDA melalui (a). Kelembagaan (lembaga/organisasi, peraturan, dan norma/etika/budaya), (b). Jaringan (komunikasi antarlembaga, mobilisasi SDM, dan optimalisasi IPTEK), dan (c). Sumber daya (kepakaran, kekayaan intelektual, dan informasi, dan sarpras IPTEK).	√				
8.	Pelaksanaan SIDA pariwisata(tim koordinasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan pelaporan)	√				
9.	Pengembangan SIDA (tahapan pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA, dan pemberlanjutan penguatan SIDA)	√				

Peningkatan Kematangan SIDA pariwisata (Metode ANIS):

- I. Level Makro yang terkait dengan kebijakan inovasi pariwisata
- II. Level Messo yang terkait dengan kelembagaan dan program pengembangan pariwisata

III. Level Mikro yang terkait dengan *capacity building* pelaku pengembangan, produksi dan pemasaran pariwisata

Level Makro:

Level makro merupakan level di kebijakan inovasi. Kebijakan Inovasi untuk mengembangkan industri Pariwisata di Kab.Pesisir Selatan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah yang inovatif dalam mendukung penumbuhan industri pariwisata di daerahnya secara optimal. Hal ini sesuai dengan teori Porter yang mengingatkan pentingnya kebijakan pengembangan produktivitas daerah dalam menumbuhkan aktifitas ekonomi melalui kekuatan inovasi yang diarahkan untuk mencapai dan menghasilkan nilai tambah.

Pada Level Makro ini yang harus disiapkan aktifitasnya adalah:

1. Terimplementasinya Kebijakan Sistem Inovasi Daerah untuk Industri pariwisata
2. Terbentuknya Tim Koordinasi sebagai optimalisasi koordinasi dan sinergitas antar actor dalam pengembangan industri pariwisata.
3. Terimplementasinya Kebijakan penyusunan Master plan Industri pariwisata
4. Terimplementasinya Kebijakan Pelatihan dan pendidikan bisnis Industri pariwisata
5. Implementasi Foresight R&D Agenda tentang Industri pariwisata di Kab.Pesisir Selatan
6. Implementasi kebijakan klaster Industri pariwisata di Kab.Pesisir Selatan
7. Implementasi regulasi yang ramah inovasi dengan Olahan perikanan

Level Meso

Kelembagaan inovasi Industri Pariwisata Kab.Pesisir Selatan terdiri dari:

1. Implementasi Inkubator di Kab.Pesisir Selatan
2. Implementasi kelembagaan pendukung inovasi berupa Klaster industri pariwisata di Kab.Pesisir Selatan
3. Implementasi Program pendampingan STI
4. Implementasi program kewirausahaan
5. Implementasi Program pengembangan klaster
6. Implementasi program fasilitas Internasional

Level Mikro

SIDa Level Mikro yaitu level program peranan Aktor yang terlibat dalam pengembangan industri pariwisata terdiri dari program-program, sebagai berikut:

1. Peningkatan peran universitas/PT dalam SIDA pariwisata di Kab.Pesisir Selatan
2. Peningkatan peran Inovator-inovator dalam SIDA pariwisata Kab.Pesisir Selatan
3. Peningkatan peran Investor Swasta dalam SIDA pariwisata Kab.Pesisir Selatan
4. Peningkatan peran Wirausahawan dalam SIDA pariwisata Kab.Pesisir Selatan
5. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM/IKM) dalam SIDA pariwisata Kab.Pesisir Selatan
6. Peningkatan peran Industri Besar dalam SIDA pariwisata Kab.Pesisir Selatan

III	STRATEGI: PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA STRATEGIS DI PESIR SELATAN																
A. Kebijakan: Peningkatan daya saing kawasan wisata di Pesisir Selatan																	
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome	
					2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit			Dunia Usaha
		1.	Penyiapan tim koordinasi/pokja/konsorsium pengembangan Kawasan Wisata strategis Di Pesisir Selatan	a. Penyusunan anggota Tim Pokja											Tersusunnya Anggota Tim Pokja	Tersedianya tim koordinasi untuk pengembangan Kawasan Wisata di Pessel	
				b. Penyiapan SK Tim Pokja													SK
				c. Peluncuran <i>soft launching</i> dan penandatanganan SK kepala daerah tentang Tim Pengelola persiapan pengembangan kawasan wisata di Pessel													Launching
		2	Penyiapan lahan untuk persiapan pembangunan Kawasan Wisata sesuai dengan delinasi kawasan	a. sosialisasi dengan masyarakat tentang penggunaan lahan											Sosialisasi	Tersedianya lahan untuk pengembangan Kawasan Wisata kawasan	
				b. Kesepakatan penggunaan lahan													Penandatanganan kesepakatan
				c. Penyiapan sertifikat lahan													Sertifikat
		3	Perencanaan <i>grand design</i> atau <i>masterplan</i> , <i>business plan</i> , FS & DED berdasarkan delinasi Kawasan Wisata	a. Penyusunan <i>grand design/masterplan</i>											<i>Grand design/masterplan</i>	Tersedianya <i>grand design</i> atau <i>masterplan</i> , <i>business plan</i> , studi kelayakan FS, dan DED Kawasan Wisata di Pessel	
				b. Penyusunan <i>business plan</i>													<i>Business plan</i>
				c. Penyusunan <i>FS</i>													Document FS
				d. Penyusunan <i>DED</i>													Dokumen DED
		4	Penyiapan pembangunan infrastruktur wisata (amenitas):	a. Pembangunan transportasi											Akses jalan yang memadai	Tersedianya infrastruktur di kawasan Wisata di Pessel	
				b. Penyiapan pembangunan telekomunikasi													

			transportasi, telekomunikasi, energi (stasiun pengisian bahan bakar), air minum, fasilitas umum, sanitasi.	c. Penyiapan pembangunan energi (stasiun pengisian bahan bakar)													Stasiun pengisian bahan bakar	
				d. Penyiapan pembangunan fasilitas air minum													Sumber air bersih	
				e. Penyiapan pembangunan fasilitas umum													Mushala, lapangan parkir,	
				f. Penyiapan pembangunan fasilitas sanitasi													Toilet bersih, tempat sampah	
				g. Pembangunan rest area sebagai pusat penjualan cinderamata, hasil kerajinan													Rest area, pusat penjualan cinderamata dan hasil kerajinan	
				h. Pembangunan fasilitas penginapan													Hotel dan homestay	
				i. Pembangunan fasilitas restoran dan kuliner													Restorant dan kafe	
		5	Penguatan kelembagaan Badan Pengelola kawasan wisata strategis di Pessel	a. Penyusunan tata kelola kelembagaan Badan Pengelola kawasan wisata													Tersusunnya Tata kelola	Badan Pengelola kawasan wisata di Pessel
				b. Pelatihan manajerial pengelolaan kelembagaan Badan Pengelola kawasan wisata													Jumlah pengelola yang terlatih	
		6	Penguatan kelembagaan dan SDM di kawasan wisata di Pessel	a. Penyusunan tata kelola Pokdarwis pada masing-masing delinasi kawasan wisata/ (Destination Management Organisation/DMO),													Tersusunnya Tata kelola Pokdarwis pada masing-masing delinasi kawasan wisata	kelembagaan dan SDM di kawasan wisata di Pessel
				b. Pelatihan manajerial Pokdarwis pada masing-masing delinasi kawasan wisata													Jumlah pengelola yang terlatih	

			c. Pengembangan SDM pelaku wisata dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan melalui POKDARWIS dan desa wisata													Berkembangnya SDM IKM pengelola Pariwisata di Kab.Pesisir Selatan	
		7	Pelaksanaan inkubasi inovasi bisnis UMKM di objek wisata dan produk Kawasan Wisata di Pessel	a. Sosialisasi pra inkubasi												Jumlah tenant yang mengikuti sosialisasi	Terlaksananya inkubasi inovasi bisnis UMKM
				b. Seleksi calon tenant												Jumlah tenant yang lulus seleksi	
				c. Pembekalan dan uji coba inkubasi												Materi pembekalan	
				d. Pembinaan tenant												Jumlah tenant yang terbina	
		8	Peningkatan akses pendanaan dan pemodalan bagi UMKM di kawasan wisata di Pessel	a. MoU dengan pengusaha dan para investor												Jumlah MoU	aksesability pendanaan dan pemodalan bagi UMKM di kawasan wisata di Pessel
				b. Pelatihan penyusunan bisnis plan												Pelatihan	
				c. Membuat proposal bisnis												Proposal bisnis	
				d. Perluasan akses bantuan modal												Jumlah akses bantuan modal	
				e. Pinjaman lunak bank												Jumlah pinjaman	
				f. Mendatangkan investasi												Investasi	
		9	Penyiapan konten edukasi di kawasan wisata strategis di Pessel	a. Kerjasama dengan universitas dalam penyusunan konten												Mou dengan Universitas	Tersedianya konten edukasi kawasan wisata strategis di Pessel
				b. Pelaksanaan penyusunan konten												Konten edukasi	
		10	Pengembangan promosi dan pasar bagi Kawasan Wisata di Pessel	a. Penyediaan informasi profil investasi di Kabupaten Pessel												Berkembangnya pemasaran	Berkembang-nya pemasaran, penyuluhan konsumen, dan purna jual destinasi wisata di Pessel
				b. Pembangunan TIC (Tourist Information Center) Pusat Pelayanan Informasi Terpadu Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pessel												Semakin banyak konsumen yang kenal destinasi wisata	

				c. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik,dan internet													Berkembangnya purna jual	
				d. Evaluasi pembangunan Kawasan Wisata di Pessel													Jumlah objek dan produk wisata yang dinkubasi	
		B. Kebijakan: Peningkatan Jenis, Nilai Tambah, Produksi dan Pemasaran Produk dan bisnis UMKM di Kawasan Wisata di Pessel																
		No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA					Output	Outcome		
					2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemko	DPRD	PT, Lemlit				
		1.	Pembentukan kelembagaan pengembangan produk UMKM sekitar Kawasan Wisata	a. Peningkatan kelembagaan UMKM sekitar Kawasan												Meningkatnya kelembagaan UMKM sekitar Kawasan	Berkembangnya kelembagaan dan kapasitas UMKM sekitar Kawasan	
				b. Pelatihan UMKM dalam penyediaan bahan baku olahan produk pertanian												Terlatihnya petani dalam penyediaan bahan baku olahan pertanian		
		2.	Pembentukan kelembagaan pengembangan produk dan inkubasi UMKM olahan produk pertanian dan perikanan	a. Pembentukan dan pengembangan klaster industry produk olahan pertanian dari UMKM												Terbentuknya dan berkembangnya klaster produk olahan pertanian	Terbentuknya kelembagaan pengembangan produk dan meningkatnya jumlah UMKM olahan produk pertanian	
				b. Pengembangan pusat promosi produk olahan pertanian												Berkembangnya pusat promosi produk olahan pertanian		
				c. Pendampingan dan inkubasi pengusaha produk olahan pertanian												Bertambahnya IKM produk olahan pertanian		
		3.	Pembentukan sistem dan pelaksanaan pengadaan bahan baku halal, murah, dan berkualitas	a. Pembentukan unit pengadaan bahan baku untuk produk olahan pertanian												Terbentuknya unit pengadaan bahan baku untuk produk olahan pertanian	Terbentuknya sistem pengadaan dan tersedianya bahan baku halal, murah, dan berkualitas	
				b. Pembentukan MoU dengan pengusaha dan daerah pemasok bahan baku												Tersedianya MoU dengan pengusaha dan daerah pemasok bahan baku		
		4.	Peningkatan	a. Perluasan akses bantuan												Semakin luasnya akses	Meningkatnya	

		permodalan	modal														bantuan modal	permodalan IKM
			b. Peningkatan pinjaman lunak bank														Semakin meningkat pinjaman lunak bank	
			c. Peningkatan investasi														Semakin banyaknya investasi	
	5.	Revitalisasi teknologi produksi IKM untuk produk olahan pertanian melalui inovasi	a. Bantuan modernisasi teknologi produksi														Terbantunya modernisasi teknologi produksi	Semakin lengkap dan efektifnya teknologi produksi IKM produk olahan pertanian
			b. Diversifikasi komponen produksi produk olahan pertanian														Tersedianya komponen produksi produk olahan pertanian	
	6.	Pengembangan produk olahan pertanian yang murah dan berkualitas melalui inovasi	a. Pengembangan produk olahan yang murah dan berkualitas melalui inovasi														Berkembangnya produk yang murah dan berkualitas melalui inovasi	Berkembangnya produk olahan pertanian yang murah dan berkualitas
	7.	Diversifikasi jenis produk olahan pertanian melalui inovasi	b. Litbang produk olahan pertanian inovatif														Berbagai produk olahan pertanian inovatif	Beragamnya jenis produk olahan pertanian bernilai komersial
			c. Produksi produk olahan pertanian inovatif														Produksi produk olahan pertanian inovatif	
	8.	Pengembangan SDM IKM produk olahan pertanian	a. Pelatihan SDM														Terlatihnya SDM	Berkembangnya SDM IKM produk olahan pertanian
			b. Rekrutmen enjiner dan sarjana														Bertambahnya SDM enjiner dan sarjana	
	9.	Penerapan sertifikasi halal dan SNI produk olahan pertanian	a. Sertifikasi halal produk olahan pertanian														Tersertifikasi halal produk olahan pertanian	Tersertifikasi halal dan SNI produk olahan pertanian
			b. Sertifikasi SNI produk olahan pertanian														Tersertifikasi SNI produk olahan pertanian	
	10.	Pengembangan pemasaran, penyuluhan konsumen, dan purna jual	a. Pengembangan pemasaran														Berkembangnya pemasaran	Berkembangnya pemasaran, penyuluhan konsumen, dan purna jual produk olahan produk pertanian Pessel
			b. Penyuluhan konsumen														Semakin banyak konsumen yang kenal produk	
			c. Pengembangan purna jual														Berkembangnya purna jual	

		11.	Pelaporan Monev Program Peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri olahan produk pertanian melalui Inovasi	Penyusunan laporan penyiapan program pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri olahan produk pertanian Pessel													Dokumen laporan penyiapan Program Pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri olahan produk pertanian Pessel	Program peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri olahan pertanian Pessel untuk tahun berikutnya
--	--	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IX

Rencana Aksi Detail SIDA Peternakan (Sapi Potong) di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah populasi ternak sapi yang cukup besar, ini dibuktikan dengan total populasi sapi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah 85.031 ekor, Jumlah ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten dengan total populasi urutan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat, kemudian disusul pada Kab.Limah Piluh Kota, Dharmasraya, Kab.Solok sehingga menjadi salah satu daerah basis sapi potong Sumatera Barat, sedangkan jumlah kelompok peternak yang tersebar di 15 Kecamatan di Pesisir Selatan sebanyak 524 kelompok petani peternak (BPS Kab. PESSEL, 2021). Di Kabupaten Pesisir Selatan ini telah ditetapkan Kategori Kawasan Agribisnis Sapi Potong di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Pada bagian tengah Kabupaten (Kec. Sutera, Kec. Lengayang/penyangga Kec. Batang Kapas dan Kec. Linggo Sari Baganti. Sapi pesisir yang merupakan plasma nutfah di Sumatera Barat merupakan komoditi andalan peternakan di Kab.Pesisir Selatan, maka Wilayah konservasi Plasma Nutfah Sapi Pesisir, telah dibuat P4 (Percepatan peningkatan produktifitas produksi dan populasi) di Lengayang

Adapun Arah Kebijakan Pengembangan Sub Sektor Peternakan ini untuk:

- 1). meningkatkan produksi peternakan melalui bantuan peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi peternakan (terutama bibit unggul, pakan ternak, sarana dan prasarana, obat-obatan dan vaksin serta inseminasi buatan) terutama bagi peternak rakyat atau kecil. Hal ini terutama meliputi faktor-faktor produksi ternak terutama bibit unggul; pakan ternak; obat-obatan dan vaksin; inseminasi buatan; alsinak; kandang isolasi ternak; kandang istirahat ternak; peralatan pengolahan; Rumah Potong Hewan (RPH) berikut pengolah limbah dan sarana air bersih yang memadai; pengolahan limbah perkebunan dan pertanian menjadi pakan siap saji; pengelolaan dan pengembangan laboratorium produksi, nutrisi/pakan ternak, kesehatan hewan, teknologi hasil ternak, pengujian mutu hasil dalam bidang peternakan.

2) Pengembangan Sentra-Sentra dan Kawasan Komoditas Peternakan

Arah kebijakan ini merupakan landasan bagi peningkatan produksi peternakan pada sentra-sentra dan kawasan-kawasan peternakan, serta pembangunan dan pengusulan kawasan-kawasan peternakan yang baru.

3) Peningkatan Nilai Tambah, Mutu dan Daya Saing Komoditas dan Produk-Produk Hasil Peternakan.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*), mutu dan daya saing komoditas dan produk-produk hasil peternakan melalui perluasan dan pengembangan serta penerapan sistem standar mutu bagi komoditas dan produk-produk hasil peternakan melalui serta agroindustri dengan bahan baku asal komoditas peternakan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk ikutan atau sampingan, seperti biogas.

4) Peningkatan Manajemen dan Kelembagaan

Arah kebijakan ini dimaksudkan terutama untuk meningkatkan tata-kelola dan manajemen pembinaan dan pengelolaan berbagai program bantuan peternakan untuk peternak dari pemerintah; meningkatkan komunikasi serta kerjasama dan kemitraan antar stakeholder; meningkatkan sistem informasi bidang peternakan; serta kelembagaan peternak dan kelompok peternak.

Untuk aspek manajemen, salah satu yang perlu dilakukan adalah perbaikan atau peningkatan harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi serta pelaksanaan kerja pada dinas-dinas atau institusi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Kabupaten kabupaten, termasuk Puskesmas di kecamatan-kecamatan.

5). Peningkatan Investasi Pada sub Sektor Peternakan

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi pada sub sektor peternakan, baik pada peningkatan populasi ternak maupun nilai tambah (*added value*), mutu dan daya saing komoditas dan produk-produk hasil peternakan melalui perluasan dan pengembangan serta penerapan sistem standar mutu bagi komoditas dan produk-produk hasil peternakan serta agroindustri dengan bahan baku asal komoditas peternakan. Termasuk dalam kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk ikutan atau sampingan, seperti biogas.

6) Pengembangan dan Penguatan Usaha Pembibitan oleh Peternak

Pengembangan dan penguatan usaha pembibitan oleh peternak sangat diperlukan untuk mencapai swasembada bibit ternak unggulan sekaligus mengembangkan usaha peternak dan akhirnya pendapatan peternak

Kondisi peternakan kita pada umumnya termasuk daerah kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar merupakan usaha peternakan skala kecil yang dikelola peternak di pedesaan. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar peternak rendah dan tidak berorientasi bisnis untuk menjadi usaha pokok. Peternak berskala kecil berpotensi besar untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan pangan asal ternak sehingga diperlukan pemberdayaan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam membentuk unit usaha berbasis kawasan yang mampu merancang dan mengelola bisnis secara mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan usaha peternakan berbasis kawasan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari sub sistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan. Pengembangan kawasan peternakan berbasis sistem inovasi dapat berupa korporasi sebagai jawaban dan alternatif solusi untuk mengembangkan peternakan rakyat menuju usaha bisnis kolektif yang feasible, bankable dan berdaya saing.

Oleh sebab itu, pengembangan peternakan yang diutamakan adalah ternak sapi potong terutama sapi pesisir. Model kelembagaan pendukung inovasi yang ditawarkan adalah klaster inovasi dan klaster industri. Oleh sebab itu dalam pengembangan kawasan peternakan sapi lebih ditekankan pada klaster dan korporasi. Kawasan peternakan berbasis korporasi merupakan program yang didesain dengan adanya transformasi kelembagaan yang awalnya berbasis kelompok menjadi kelembagaan korporasi yang tersentra dalam 1 (satu) kawasan, berskala ekonomi dan terintegrasi hulu hingga hilir, serta berorientasi profit untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di dalamnya. Korporasi peternakan ini merupakan salah satu model sistem kelembagaan ekonomi peternak yang berbentuk badan hukum seperti koperasi. Pengembangan kawasan peternakan juga dapat memperkuat sistem usaha peternakan secara utuh dalam satu manajemen kawasan, sekaligus dapat memperkuat

kelembagaan peternak dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, hingga dalam hal pengolahan dan pemasarannya.

STRATEGI: PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAN INDUSTRI UNGGULAN														
Kebijakan: Peningkatan jumlah populasi, Nilai Tambah, Produksi dan Pemasaran Produk Peternakan (sapi potong) di Pesisir Selatan														
No.	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN					PELAKSANA						Output
			2023	2024	2025	2026	2027	Pem. Pusat	Pemprov	Pemkab	DPRD	PT, Lemlit	Dunia Usaha	
1	Regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada pengembangan sapi potong di Pesisir Selatan	a. Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan korporasi sapi potong												Regulasi dan kebijakan pengembangan kawasan korporasi sapi potong d
		b. Pembuatan Master Plann Kawasan Korporasi Sapi Potong												
		c. Penyusunan Riset dan Pengembangan sapi potong												
		d. Penyusunan kebijakan klaster inovasi pada kawasan korporasi sapi potong												
		e. Pembuatan <i>Detailed Engineering Design</i> Kawasan Korporasi Sapi Potong												
2	Pengembangan peternakan sapi yang terkait sektor dan sub sektor lain	a. Pembuatan pakan berbasis limbah pertanian												Integrasi bidang peternakan dengan bidang lainnya di sector peternakan
		b. Pembuatan pakan lokal alternative												
		c. Pembuatan <i>mixed farming</i> perkebunan												

14	Penerapan sertifikasi halal dan SNI produk olahan peternakan	a. Sertifikasi halal produk olahan peternakan														Tersertifikasi halal produk olahan peternakan
		b. Sertifikasi SNI produk olahan peternakan														Tersertifikasi SNI produk olahan peternakan
15	Pengembangan pemasaran, penyuluhan konsumen, dan purna jual	a. Pengembangan pemasaran														Berkembangnya pemasaran
		b. Pengembangan purna jual														Semakin banyak konsumen yang kenal produk
		c. Pengembangan purna jual														Berkembangnya purna jual
16	Pelaporan Monev Program Peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan peternakan Program Inovasi	Penyusunan laporan penyiapan program pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan peternakan														Dokumen laporan penyiapan Program Pelaksanaan peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri produk olahan peternakan

BAB X PENUTUP

Dokumen ini merupakan dokumen Sistem Inovasi Daerah yang secara detail menjelaskan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada Roadmap SIDa secara umum yang telah disusun pada tahun 2021.

Untuk mengoperationalkan rencana aksi detail ini telah diidentifikasi tugas pokok dan fungsi seluruh stakeholder yang terkait, baik internal maupun eksternal. Rencana aksi SIDa Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan kematangan (*maturity*) dan melakukan penguatan (*strengthening*) SIDa, dan meningkatkan daya saing produk dan bisnis/industri prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan laporan *Roadmap* dan Rencana Aksi Penguatan SIDa Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2025, disini ditampilkan kembali rencana aksi umum Penguatan SIDa Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2025 yang terdiri dari berbagai program, kegiatan, jadwal dan pelaksana kegiatan untuk empat program yaitu:

1. Peningkatan kematangan SIDa Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan ANIS (*Analytical of National Innovation System*),
2. Peningkatan kekuatan SIDa Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bersama Menristek No. 3 dan Mendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah,
3. Peningkatan daya saing produk dan bisnis/industri prioritas daerah Kabupaten Pesisir Selatan:
 - a. Peningkatan Produk dan bisnis/industri olahan gambir.
 - b. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk olahan perikanan
 - c. Pengembangan Kawasan Wisata Strategis di Pesisir Selatan

d. Pengembangan Peternakan Sapi Potong

Institusi pelaksana rencana aksi SIDA Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai perguruan tinggi (PT) atau universitas, berbagai lembaga penelitian, dan dunia usaha yang terdiri dari (pengusaha, industri, KADIN, bank, lembaga keuangan, dan lainnya).

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Detail Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan ada komitmen dan inisiatif dari OPD dan stakeholder terkait lainnya untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), serta untuk dapat menggerakkan SIDa diperlukan kemudahan dunia usaha dalam berinvestasi, dan hambatan berkaitan dengan investasi yang ada selama ini seperti keamanan, lahan, infrastruktur, energi, persepsi masyarakat, kemudahan perizinan dapat segera diselesaikan. Dengan dokumen ini dapat dilakukan peningkatan daya saing daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara sistematis. Dengan menguraikan program-program pada rencana detail tersebut, maka telah disusun rencana detail sistem inovasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan berbagai kegiatan untuk mencapai outcomes tersebut

Oleh sebab itu SIDA harus terdiri dari Sistem IPTEK Daerah, Sistem Industri, dan Perdagangan Daerah. Oleh sebab itu SIDA, harus merupakan jalinan kemitraan antara Lembaga LITBANG, Industri, dan Perdagangan di daerah, Pelatihan dan Pendidikan, Lembaga Promosi Bisnis, Inkubator Teknologi, Lembaga Pendanaan Inovasi, yang didukung penuh oleh Kepala Daerah, dengan semua OPD-nya, serta oleh DPRD-nya. Untuk itu diharapkan BALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan mampu menjadi katalisator, dan mengembangkan SIDA dengan didampingi oleh dan Mitra Peneliti dari kelitbangan dan perguruan tinggi yang ada.

REKOMENDASI

1. Sistem inovasi daerah digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Semakin kuat sistem inovasi daerah, semakin tinggi tingkat daya saing daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

diharapkan menyiapkan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat kabupaten. Tim Koordinasi yang dimaksud mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. Mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
 - c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
 - d. Melakukan penataan unsur SIDA di daerah;
 - e. Melakukan pengembangan SIDA di daerah;
 - f. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di daerah;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.
2. Untuk pengembangan peningkatan produksi dan nilai tambah produk gambir, maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan proposal dan audiensi ke pemerintah pusat untuk membantu pembentukan sentra gambir di daerah.
 3. Jika kelembagaan yang dimaksud disetujui untuk didirikan atau dibentuk maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Grand Design Inovasi/master plan Sentra Gambir
 4. Penguatan Sentra olahan perikanan mesti didukung dengan tata kelola kelembagaan dan perlunya Inkubator untuk penguatan bisnis UMKM
 5. Untuk Pengembangan Pariwisata, khususnya untuk kawasan Mandeh dan sekitarnya, maka perlu dilakukan pembentukan kelembagaan berupa Badan Pengelola Kawasan Wisata.
 6. Sedangkan untuk pengembangan peternakan sapi potong khususnya sapi pesisir, maka perlu dilakukan pembentukan dan penataan kawasan korporasi sapi potong berbasis klaster inovasi